



Jurnal Forum Ilmu Sosial

Volume 41 Nomor 2 Desember 2014

ISSN 1412-971X

Ketua Penyunting
Maman Rachman

Wakil Ketua Penyunting
Eva Banowati

Sekretaris Penyunting
Puji Lestari

Bendahara
Setiajid

Penyunting Pelaksana
YYFR Sunardjan
Juhadi
Sriyanto
Sunarto
Moh. Yasir Alimi
Ninuk Sholikhah Akhiroh

Penyunting Ahli
Wasino
Masrukhi

Mitra Bebestari
Warsono (Universitas Negeri Surabaya)
Udin S. Winataputra (Universitas Terbuka)
Wahyu (Universitas Lambung Mangkurat)
Sapriya (Universitas Pendidikan Indonesia)
Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Pelaksana Tata Usaha
Untung Waluyo
Januharto Partono
Suharyati
Basuki
Mariyam
Gunawan

Penerbit
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Alamat Penerbit
Gedung C7 Lantai 3 Kampus Sekaran
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 8508006
Email: jurnalfis@yahoo.com

Alamat E-Journal
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>

Daftar Isi

- 143-154 **Penerapan Kooperatif Model Stad Konsentrasi Gaya Kognitif FI dan FD untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah di Jurusan Sejarah FIS Unnes**
Ba'in
- 155-168 **Politik dan Birokrasi : Netralitas Birokrasi Kota Semarang pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014**
Puji Lestari
- 169-183 **Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
Indri Astuti
- 184-194 **Kompetensi Profesional dalam Pembelajaran Berbasis Multikultural Bagi Guru Sosiologi di Kota Semarang**
Totok Rochana
- 195-206 **Diversifikasi Produksi: Studi Ekonomi Politik Pedesaan di Jawa**
Aji Prasetya Wahyu Utama
- 207-222 **Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pasca Pemekaran**
Moh. Fakih dan Mohamad Tohari
- 223-231 **Implementasi CTL dalam Mata Kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi untuk Meningkatkan Kompetensi Bekerja Ilmiah pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Unnes**
Sriyanto dan Sutardji
- 232-244 **Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SMA Negeri 3 Rembang**
Badrus Sholeh
- 245-256 **Metode Pembelajaran TGT dengan Bermain Ular Tangga (Utang untuk Meningkatkan Hasil Belajar PPKN materi Pelanggaran HAM pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014**
Dargito
- 257-273 **Pengembangan model Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Konstruktivisme di Sekolah**
Mohammad Iqbal Birsyada

Pembina: Subagyo, Penanggungjawab: Eko Handoyo, Pengarah: Erni Suharini, Cahyo Budi Utomo.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 22 halaman, dengan format tercantum pada halaman kulit belakang ("Ketentuan Penulisan Artikel Forum Ilmu Sosial"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.



PENERAPAN KOOPERATIF MODEL STAD KONSENTRASI GAYA KOGNITIF FI DAN FD UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH KURIKULUM DAN BUKU TEKS SEJARAH DI JURUSAN SEJARAH FIS UNNES

Ba'in

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

cooperative learning model of STAD, cognitivestyle, understanding

Abstrak

Mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah umumnya kurang diminati dan mahasiswa cenderung pasif dalam mengikuti perkuliahan. Metode *cooperative learning* merupakan metode yang tepat untuk membantu meningkatkan minat, aktifitas dan pemahaman belajar mahasiswa. Metode ini bisa diterapkan baik untuk mahasiswa gaya kognitif FI maupun FD. Dengan belajar kelompok diharapkan mahasiswa mampu dan menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dengan aktifitas belajar kelompok mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dan disiplin tinggi sehingga tercipta kondisi belajar yang dinamis yang pada gilirannya pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran meningkat secara signifikan.

Setelah diterapkan metode *cooprative learning* model STAD keaktifan mahasiswa meningkat. Pada kondisi awal 77,5% masih memiliki minat rendah, pada siklus 1 minat mahasiswa meningkat menjadi 69,91% tinggi, dan pada siklus 2 menjadi 24,9% sangat tinggi dan 60% tinggi. Demikian pula keaktifan mahasiswa juga meningkat dari sama sekali tidak aktif mengikuti perkuliahan pada pra siklus menjadi aktif (62,5%) dan sangat aktif (12,5%) pada siklus 1, dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi aktif (52,5%) dan sangat aktif (47,5%). Untuk peningkatan pemahaman pada mahasiswa FI terdapat peningkatan pemahaman dari 49,33% pada pra siklus menjadi 72,86% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 81,90% pada siklus 2. Sementara untuk mahasiswa FD terdapat peningkatan pemahaman dari 47,00% pada pra siklus menjadi 67,14% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 78,86% pada siklus 2.

Abstract

The course Curriculum and History Textbooks generally less desirable and students tend to be passive in following the lecture. Cooperative learning is an appropriate method to help increase interest, activities and understanding of student learning. This method can be applied both to the student cognitive style FI and FD. With the expected student learning groups capable and aware that he has the potential to be developed. With a group learning activities students are required to take an active role and discipline so as to create a dynamic learning conditions which in turn students' understanding of the learning materials increased.

Having applied the method cooperative learning increases student activeness STAD model. At baseline 77.5% still have a low interest in cycle 1 student interest increased to 69.91% higher, and in cycle 2 to 24.9% and 60% very high high. Similarly, students also increased the activity of completely inactive following the lecture on pre-cycle becomes active (62.5%) and very active (12.5%) in cycle 1 and cycle 2 increased to aktif (52.5%) and very active (47.5%). To increase student understanding of the FI there is an increasing understanding of 49.33% in the pre cycles to 72.86% in cycle 1, and increased to 81.90% in cycle 2. As for the FD students there is an increasing understanding of 47, 00% on pre-cycle into 67.14% in cycle 1, and increased to 78.86% in the second cycle.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
bainyusup@gmail.com

PENDAHULUAN

Kurikulum dan Buku Teks Sejarah merupakan mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pada Jurusan Sejarah FIS Unnes, mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah diberikan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Semester III, dengan pertimbangan mahasiswa telah memiliki dasar pengetahuan yang cukup di bidang kesejarahan maupun kependidikan. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok mata kuliah kependidikan sejarah, melengkapi mata kuliah kependidikan sejarah lainnya, seperti Perencanaan Pengajaran Sejarah, Manajemen Pembelajaran Sejarah, Media dan Sumber Pembelajaran Sejarah, dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Mengingat pentingnya mata kuliah ini bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, perlu kiranya dicarikan terobosan-terobosan baru dalam pembelajarannya agar mudah diikuti oleh mahasiswa dengan nilai prestasi yang maksimal.

Secara umum mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah terdiri dari empat materi pokok yaitu : (1) pengertian, fungsi, komponen, model pengembangan dan pendekatan kurikulum; (2) sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga dewasa ini; (3) pengertian dan fungsi buku teks sejarah serta kriteria buku teks sejarah yang baik; dan (4) karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Jadi mata kuliah ini akan membekali mahasiswa pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai tentang hakikat kurikulum dan buku teks sejarah, perkembangan kurikulum di Indonesia, komponen kurikulum, isi kurikulum yang berlaku, keragaman buku teks, kriteria buku teks yang baik, dan buku-buku teks sejarah yang disarankan.

Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor mahasiswa, dosen, tujuan pembelajaran, sarana prasarana belajar, dan lingkungan (Slamet, 1987: 16). Dalam hubungan ini, disamping mahasiswa, dosen memegang peranan penting atas keberhasilan

proses pembelajaran Dosen berperan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses proses pembelajaran atau perkuliahan yang diselenggarakan. Kurang tepatnya dosen dalam memilih strategi menggunakan metode pembelajaran akan sangat mempengaruhi hasil belajar yang diharapkan. Selain itu juga diperlukan kreatifitas dosen dalam menyediakan sarana prasarana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Penggunaan metode yang tepat dalam perkuliahan akan meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar, yang pada gilirannya akan akan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Dosen juga berperan sebagai sumber belajar sehingga karenanya berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi kegiatan belajar mahasiswa. Salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan dan menentukan metode bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2002 : 88). Pemilihan metode ini didasari oleh sebuah keyakinan bahwa tidak semua metode tepat untuk mencapai semua jenis tujuan pembelajaran.

Untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam proses belajar perlu diupayakan melalui pemilihan metode tertentu yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas pembelajaran semakin meningkat sehingga hasil belajar pun semakin optimal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah *cooperative learning* atau belajar kelompok. Belajar sejarah tidak hanya dengan metode ceramah, yang cenderung berlangsung satu arah dari dosen kepada mahasiswa. Sudah saatnya mahasiswa diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses

pembelajaran di ruang kuliah.

Metode *cooperative learning* dianggap sebagai metode yang tepat untuk membantu meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, saling bekerja sama sekaligus meningkatkan pemahaman, khususnya pada pokok bahasan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Hal ini karena materi ini membahas hal-hal yang juga ada di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Mahasiswa secara berkelompok kecil dapat mencari sumber-sumber pembelajaran tersebut dan mengkajinya secara bersama-sama pula. Dengan belajar kelompok diharapkan mahasiswa mampu dan menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dengan aktivitas belajar kelompok mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dan didiplin tinggi sehingga tercipta kondisi belajar yang dinamis untuk menciptakan mahasiswa berprestasi (Solihatun dan Raharjo, 2007: 28).

Metode *Cooperative learning* mengkondisikan siswa untuk bisa belajar mandiri. Disini pengetahuan dibentuk dan dikembangkan oleh siswa sendiri. Belajar menetapkan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa membentuk makna dan bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan meyimpannya dalam ingatan sewaktu-waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut.

Melalui metode *Cooperative learning* siswa dapat membangun pengetahuan secara aktif. Penyusunan pengetahuan yang terus menerus akan menempatkan siswa sebagai peserta aktif. Dari langkah-langkah yang demikian maka keaktifan siswa akan terbina

di bidang-bidang lainnya. Akhirnya muncul manusia-manusia yang aktif dan kreatif. Dengan metode *Cooperative learning* siswa dapat mengembangkan kompetensi dan potensi dirinya, berdasarkan asumsi bahwa usaha dan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan siswa (Anita Lie, 2001: 7).

Menurut Muslimin Ibrahim (2000 : 20) ada beberapa macam pembelajaran kooperatif yaitu : STAD (*Student Team Achievement Division*), Jigsaw, TGT (*Team Games Turnamnet*), TAI (*Team Achievement Investigation*), CIRC (*Cooperative Integrated Reading and Composition*). Dari kelima macam model pembelajaran kooperatif di atas yang diteliti pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Team Achievement Division*).

Dalam penelitian ini pembelajaran kooperatif yang dipilih adalah *Student Team Achievement Division* (STAD). STAD merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang diterapkan untuk menghadapi kemampuan peserta didik yang heterogen. Dimana model ini dipandang sebagai metode yang paling sederhana dan langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Metode ini paling awal ditemukan dan dikembangkan oleh para peneliti pendidikan di John Hopkins Universitas Amerika Serikat dengan menyediakan suatu bentuk belajar kooperatif. Di dalamnya peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, STAD adalah model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan kerjasama, kreatif, berpikir

kritis dan ada kemampuan untuk membantu teman (Anni dkk, 2004 : 19).

Menurut Slavin STAD terdiri dari lima komponen utama. Pertama, penyajian materi, dalam STAD materi mula-mula diperkenalkan dalam penyajian materi biasanya disampaikan oleh guru dan siswa menyadari bahwa mereka harus memperhatikan penyajian materi di kelas, karena dengan demikian mereka akan bisa mengerjakan kuis dengan baik, karena skor kuis mereka menentukan skor kelompok mereka. Kedua, tim atau kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan prsetasi akademik, jenis kelamin, ras, dan etnis yang bervariasi. Selama belajar kelompok tugas anggota kelompok, tugas anggota kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan yang sedang diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka dan teman satu kelompok. Ketiga, kuis, setelah satu sampai dua periode penyajian guru dan latihan tim siswa mengikuti kuis secara individu. Kuis dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa setelah belajar dalam kelompok. Keempat, skor peningkatan individu, ide yang melatar belakangi skor peningkatan individu adalah memberikan prestasi yang harus disiapkan oleh setiap siswa jika ia bekerja keras dan mencapai hasil belajar siswa lain pada kuis yang serupa. Kemudian siswa mendapatkan poin untuk timnya berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis dan skor dasarnya. Kelima, penghargaan kelompok, tim dimungkinkan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lain apabila skor rata-rata mereka melebihi kriteria

tertentu (Nurhadi, 2004: 14).

Sebagai sebuah inovasi pembelajaran, STAD tentu memiliki beberapa kelebihan. Adapun kelebihan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD antara lain : (1) mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir kritis dan kerja kelompok, (2) menerapkan bimbingan oleh teman, (3) menerapkan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah.

Akan tetapi STAD juga memiliki kelemahan, antara lain kerja kelompok dalam STAD hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan, sementara pembelajaran kadang-kadang menuntut pengajaran yang berbeda sesuai dengan gaya kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Gaya Kognitif secara psikologi meliputi gaya kognitif *Field Independent* dan gaya kognitif *Field Dependent*. Orang yang memiliki gaya kognitif *Field Independent* merespon suatu tugas cenderung berpatokan pada syarat-syarat yang ada di dalam diri sendiri. Sedangkan orang yang dengan gaya kognitif *Field dependent* melihat syarat lingkungan sebagai petunjuk di dalam merespon suatu stimulus. Selanjutnya orang yang memiliki gaya kognitif *Field Independent* lebih bersifat kritis, mereka dapat memilih stimulus berdasarkan situasi, sehingga persepsinya hanya sebagian kecil ketika ada perubahan situasi. Sedangkan gaya kognitif *field Dependent* mengalami kesulitan dalam membedakan stimulus melalui situasi yang dimiliki sehingga persepsinya mudah dipengaruhi oleh manipulasi dari situasi di sekelilingnya. Orang yang memiliki gaya FI lebih suka memisahkan bagian-bagian dari

pola dan menganalisis pola berdasarkan komponen-komponennya. Sedangkan yang memiliki gaya FD cenderung memandang pola sebagai suatu keseluruhan, tidak memisahkan ke dalam bagian-bagiannya. Dari penjelasan di atas orang dengan gaya kognitif FI mempunyai kecenderungan di dalam merespon stimulus dengan menggunakan persepsi yang dimilikinya sendiri, lebih analitis, dan menganalisis pola berdasarkan komponen-komponennya. Sedangkan Orang yang memiliki Gaya Kognitif FD Mempunyai kecenderungan dalam merespon suatu stimulus menggunakan syarat lingkungan sebagai dasar persepsinya, dan kecenderungan memandang suatu pola sebagai suatu keseluruhan. tidak memisahkan bagian-bagiannya (Wolfok, 1993: 129).

Untuk itu dalam penelitian ini juga akan dilihat peningkatan pemahaman mahasiswa yang bergaya kognitif FI dan mahasiswa yang bergaya kognitif FD pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Tes Sejarah pada pokok bahasan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif Model STAD. Dalam pengajaran Kurikulum dan Buku Teks Sejarah, metode dan pendekatan serta model yang telah dipilih merupakan alat komunikasi yang baik antara pengajar dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa sehingga setiap pengajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar (Kasmadi, 2001 :2).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), yaitu penelitian yang sengaja membangkitkan tumbuhnya suatu keadaan dengan cara atau media baru, kemudian diteliti hasil aksi atau hasil kerja. Dalam penelitian Penerapan Kooperatif Learning Model STAD untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah pada pokok bahasan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah beberapa pihak yang akan diteliti adalah (1) mahasiswa jurusan sejarah prodi pendidikan sejarah semester III rombel I tahun akademik 2014/2015 sebanyak 40 mahasiswa, faktor yang diteliti adalah keaktifan dalam proses perkuliahan dan hasil belajar, dan (2) . dosen mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah Jurusan Sejarah FIS Unnes bertugas menyajikan pembelajaran berdasarkan arahan dan hasil diskusi dengan peneliti. Faktor yang diteliti adalah kemampuan dosen dalam mengelola proses pembelajaran dengan metode *cooperative learning* model STAD.

Sebenarnya populasi mahasiswa dalam penelitian ini berjumlah tiga (3) rombel dan 109 mahasiswa, terdiri dari rombel 1 berjumlah 40 mahasiswa, rombel 2 berjumlah 44 mahasiswa, dan rombel 3 berjumlah 25 mahasiswa. Rombel 1 yang terdiri dari 40 mahasiswa ditetapkan sebagai sampel penelitian karena (1) mahasiswa pada ketiga rombel tersebut memiliki nilai awal yang rata-rata sama sehingga dianggap homogen, dan (2) rombel 1 berdasarkan pengamatan dalam proses perkuliahan

selama ini relatif kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah mahasiswa Semester III Prodi Pendidikan Sejarah Tahun Akademik 2014/2015, data nilai ujian mid semester dan hasil pengamatan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat gaya kognitif mahasiswa dan tentang penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan dengan pokok bahasan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tes gaya kognitif, pre test dan post test yang berisi soal-soal tentang karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurusan Sejarah merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial UNNES, dengan alamat kantor di Gedung C2 Lt. 1. Jurusan Sejarah memiliki dua program studi yaitu Prodi Pendidikan Sejarah dan Prodi Ilmu Sejarah. Prodi Pendidikan Sejarah berdiri pada bulan Maret 1965 melalui SK Presiden Republik Indonesia No. 271 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Berdasarkan SK BAN-PT No.004/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2012 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di PT. Prodi Pendidikan Sejarah S1 dinyatakan terakreditasi A.

Rombel 1 Angkatan 2013 Jurusan

Sejarah terdiri dari 40 mahasiswa, dengan latar belakang kedaerahan yang berbeda-beda. Selain itu latar belakang pendidikan di SMA juga berbeda, tetapi sebagian besar adalah SMA dengan jurusan Ilmu Sosial, sebagian lagi jurusan Ilmu Alam dan dari STM. Dari hasil tes gaya kognitif terhadap 40 mahasiswa Rombel 1 tersebut di atas didapatkan hasil: sebanyak 25 mahasiswa bergaya kognitif FD (*Field Dependent*) dan sisanya sebanyak 15 mahasiswa bergaya kognitif FI (*Field Independent*).

Selanjutnya sejumlah 40 mahasiswa tersebut dibagi menjadi 6 kelompok secara acak tanpa memperhitungkan gaya kognitif mahasiswa dalam rangka penerapan pembelajaran *Cooperative Learning* model STAD, baik untuk mahasiswa bergaya kognitif FD maupun FI. Hal itu dilakukan oleh karena penelitian ini ingin meningkatkan pemahaman materi perkuliahan dan keaktifan mahasiswa yang menjadi subyek penelitian secara keseluruhan pada mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah. Penelitian dilakukan karena sebelumnya mahasiswa mempunyai pemahaman terhadap materi perkuliahan dan keaktifannya yang relatif rendah. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu cara agar pemahaman materi perkuliahan semakin meningkat termasuk tingkat keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Adapun pokok materi pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah ini adalah karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah.

Sebelumnya, banyak mahasiswa yang merasa kurang berminat terhadap mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dan

cara dosen melaksanakan perkuliahan. Hal ini karena dosen kurang jelas dalam menerangkan materi perkuliahan. Selain itu metode yang digunakan hanya berupa metode ceramah, jarang menggunakan metode lainnya. Akibatnya tingkat keaktifan mahasiswa yang muncul dalam bentuk keberanian bertanya maupun menjawab pertanyaan dosen relatif rendah. Setelah dilakukan perkuliahan dengan variasi metode *cooperative learning* STAD, mahasiswa sangat senang dengan metode baru tersebut dalam perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah, karena dengan metode bervariasi itu mahasiswa tidak lagi merasa bosan dalam pembelajaran dan karenanya mahasiswa terangsang untuk mengikuti perkuliahan dengan semangat.

Berdasarkan analisis angket menunjukkan bahwa pada kondisi awal 31 mahasiswa atau 77,5% masih memiliki minat yang rendah, artinya mereka kurang sungguh-sungguh dan memusatkan perhatian dengan baik dalam mengikuti perkuliahan. Hanya 7 mahasiswa atau 17,5% yang memiliki minat belajar yang tinggi dan 2 mahasiswa atau 5% yang mempunyai minat mengikuti perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dengan kategori sangat tinggi.

Pada siklus I dilaksanakan perkuliahan selama 2 kali pertemuan (4 x 50 menit) yang dibagi menjadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Hal ini karena jumlah SKS mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah satu minggu hanya 2 SKS. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui tahap pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan dosen memberikan apresiasi, motivasi dan pre-test. Pada kegiatan perkuliahan inti dosen memberikan

penjelasan secukupnya tentang materi perkuliahan. Selanjutnya sesuai dengan kelompok mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen sesuai dengan tahap dalam perkuliahan *cooperative learning*. Selanjutnya dosen mengamati aktivitas mahasiswa selama melaksanakan tugas. Sesekali dosen mendorong mahasiswa yang kurang aktif untuk terlibat dalam kelompok kerja. Hasil kerja kelompok dibahas bersama dengan bimbingan dosen.

Pada minggu berikutnya, dilakukan pertemuan kedua, masih pada siklus pertama. Sesuai dengan rencana memang setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan agar kesan mahasiswa lebih mendalam dan observasi yang dilakukan oleh dosen terhadap keaktifan mahasiswa mendapatkan hasil yang lebih mendekati keadaan sebenarnya. Pada pertemuan kedua ini, tahap pembelajaran awal yaitu pendahuluan dosen mengulas sedikit tentang materi pertemuan pertama, selanjutnya memberikan pre-test dan motivasi. Pada tahap ini dosen langsung memberikan tugas kelompok dari materi-materi yang sudah diketahui mahasiswa pada pertemuan pertama. Kelompok terdiri dari kelompok kecil masing-masing 5 mahasiswa, tugas yang diberikan dosen pun secara lisan. Selanjutnya hasil kerja kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Pertemuan kedua ditutup dengan pemberian motivasi, nasehat, dan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk pertemuan minggu berikutnya.

Berdasarkan analisis hasil angket pengamatan diketahui bahwa sebanyak 9 dari 40 mahasiswa atau 22,5% masih memiliki minat rendah, 28 mahasiswa atau 69,91% memiliki minat tinggi dan 3 mahasiswa atau

7,5% memiliki minat sangat tinggi. Untuk keaktifan mahasiswa, sebanyak 25 dari 40 mahasiswa atau 62,5% memiliki keaktifan dalam proses perkuliahan yang tinggi, bahkan terdapat 5 mahasiswa atau 12,5% mahasiswa memiliki keaktifan dengan kategori sangat tinggi, tetapi masih terdapat 10 mahasiswa atau 25% yang memiliki tingkat keaktifan rendah. Untuk peningkatan pemahaman karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah, pada mahasiswa dengan gaya kognitif FI mengalami peningkatan pemahaman dari 49,33% pada pra siklus menjadi 72,86% pada siklus 1. Pada mahasiswa FD juga mengalami peningkatan pemahaman dari 47,00% pada pra siklus menjadi 67,14% pada siklus 1.

Secara umum kegiatan perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dengan materi pokok karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah pada siklus I telah mampu meningkatkan keaktifan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan karena keaktifan mahasiswa termasuk tinggi. Demikian pula dalam hal pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang juga mengalami peningkatan pemahaman sebesar 23,53% pada mahasiswa FI dan 20,14% pada mahasiswa FD. Namun demikian masih ada beberapa hal yang dinilai masih kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti terhadap dosen, mahasiswa dan pelaksanaan perkuliahan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Berdasarkan hasil refleksi tersebut maka dosen bersama peneliti melanjutkan diskusi dan evaluasi kelemahan-kelemahan pada perkuliahan siklus I dan segera

menyusun rencana untuk melaksanakan Siklus II. Sebelum dilakukan Siklus II dosen terlebih dahulu berupaya untuk memahami dengan baik tahap-tahap metode *cooperative learning* model STAD. Hasil diskusi diperoleh kesepakatan bahwa dosen akan lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam proses perkuliahan dari awal sampai pembahasan hasil diskusi.

Untuk lebih meningkatkan keaktifan seluruh mahasiswa dilakukan perkuliahan siklus II dengan materi kelanjutan dari materi pada siklus I tentang karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Pada Siklus II dilaksanakan pembelajaran selama 2 kali pertemuan (4x50 menit) yang dibagi menjadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua sama seperti pada Siklus I. Pada Siklus II ini sejak awal dosen berupaya untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam perkuliahan, bukan hanya pada saat diskusi kelompok. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui tahap pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan dosen memberikan apresiasi, motivasi dan pre-test. Pada kegiatan perkuliahan inti, dosen memberikan penjelasan secukupnya tentang materi perkuliahan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Selanjutnya sesuai dengan kelompok mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen sesuai dengan tahap dalam perkuliahan *cooperative learning*. Sambil membimbing diskusi dosen mengamati aktivitas mahasiswa selama melaksanakan tugas kelompok. Sesekali dosen mendorong mahasiswa yang kurang aktif untuk terlibat dalam kerja kelompok. Hasil kerja kelompok dibahas bersama dengan bimbingan dosen.

Pada minggu berikutnya, dilakukan pertemuan kedua, masih pada Siklus II. Sesuai dengan rencana, memang setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan agar kesan mahasiswa lebih mendalam dan observasi yang dilakukan oleh dosen terhadap keaktifan mahasiswa mendapatkan hasil yang lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Pada pertemuan kedua ini, tahap perkuliahan awal yaitu pendahuluan dosen mengulas sedikit tentang materi pertemuan pertama, selanjutnya memberikan motivasi dan pre-test. Pada tahap ini dosen langsung memberikan tugas kelompok dari materi-materi yang sudah diketahui mahasiswa pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua ini kelompok berbeda dengan kelompok pada pertemuan pertama. Kelompok terdiri dari kelompok kecil masing-masing 4 mahasiswa, tugas yang diberikan dosen pun secara lisan. Selanjutnya hasil kerja kelompok dibahas bersama dengan dosen, dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah pembahasan materi hasil diskusi, dosen memberikan kuis untuk dijawab oleh mahasiswa. Kuis inilah yang ternyata mampu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan.

Pada Siklus II ini berdasarkan pengamatan, sebagian besar mahasiswa lebih aktif dan antusias mengikuti proses perkuliahan sejak awal. Sejak dosen memberikan apersepsi, mahasiswa sudah nampak melibatkan diri dalam proses perkuliahan yang dilakukan dosen. Demikian juga pada saat diskusi kelompok, mahasiswa yang pada siklus pertama sudah aktif menjadi lebih aktif lagi, dan yang masih kurang aktif sudah nampak meningkat keaktifannya.

Untuk minat pada siklus 2 ini terjadi peningkatan minat yang cukup berarti. Dari 40 mahasiswa sebanyak menjadi 6 mahasiswa atau 15% ternyata masih memiliki minat rendah, 24 mahasiswa atau 60% memiliki minat tinggi dan 10 mahasiswa atau 24,9% berhasil memiliki minat yang sangat tinggi. Demikian pula untuk keaktifan mahasiswa pada siklus 2 ini juga meningkat cukup pesat. Sebanyak 21 mahasiswa atau 52,5% memiliki tingkat keaktifan yang sangat tinggi dan 19 mahasiswa atau 47,5% memiliki tingkat keaktifan yang tinggi, dan tidak satupun mahasiswa yang tidak aktif. Itu artinya sudah semua mahasiswa terlibat dalam proses perkuliahan, walaupun dengan tingkat yang tidak sama. Untuk peningkatan pemahaman materi perkuliahan pada siklus 2 ini kelompok mahasiswa FI mengalami peningkatan pemahaman dari 49,33% pada siklus 1 menjadi 81,90% pada siklus 2, sedangkan untuk kelompok mahasiswa FD mengalami peningkatan pemahaman dari 47,00% pada siklus 1 menjadi 78,86% pada siklus 2.

Sebagian besar mahasiswa mempunyai anggapan yang positif terhadap perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dengan metode *cooperative learning* model STAD pada pokok materi karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah. Hal ini nampak pada tanggapan mahasiswa yang terangkum dalam angket berikut ini. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah materi pokok karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah dengan metode *cooperative learning* cukup

menarik dan mampu mendorong mahasiswa untuk belajar lebih giat. Ketika mengikuti perkuliahan, mahasiswa merasa terdorong untuk lebih aktif dan menyebabkan mahasiswa menjadi lebih antusias untuk bertanya. Mereka lebih memahami materi karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah Mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah yang menjadi topik pembahasan saat pertemuan tersebut serta berani mengemukakan pendapat. Mereka juga mempunyai wawasan yang luas serta percaya diri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen.

HASIL PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan dan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut di atas maka diterapkannya metode *cooperative learning*. Metode *cooperative learning* sebagai metode inovatif diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan sehingga hasil belajar dapat lebih optimal.

Setelah dilakukan dua kali perkuliahan masing-masing satu pertemuan 100 menit dengan metode *cooperative learning* dengan materi perkuliahan karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah, nampak bahwa peran serta mahasiswa dalam perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah tersebut meningkat. Dalam perkuliahan tersebut aktivitas mahasiswa perkuliahan meningkat tajam, terbukti rata-

rata keaktifan mahasiswa mencapai 69,91%. Banyak mahasiswa yang aktif bertanya, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dosen, dan berinteraksi secara aktif dalam kerja kelompok. Tingginya aktivitas ini menjadi bukti dari adanya minat yang tinggi serta meningkatnya motivasi mahasiswa dalam belajar. Perkuliahan dengan metode *cooperative learning* bagi mahasiswa merupakan perkuliahan yang jarang dilakukan sebelumnya, sehingga perhatian mahasiswa meningkat.

Sikap dan perilaku aktif mahasiswa ternyata terus ditingkatkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apabila ketika berbagai kelemahan dosen pada tahap pertama diperbaiki. Pada pertemuan ketiga dan keempat, kembali mahasiswa diajak untuk belajar Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dengan metode *cooperative learning*. Setelah berdiskusi kelompok, hasilnya dibahas bersama dengan dosen dan dilanjutkan dengan pemberian kuis. Aktivitas mahasiswa ternyata makin meningkat dengan rata-rata 80% termasuk dalam kategori tinggi. Mereka lebih aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan berinteraksi dengan mahasiswa lainnya, baik dalam kerja kelompok maupun dalam pembahasan diskusi kelas.

Perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah pokok materi karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah pada Rombel 1 Prodi Pendidikan Sejarah dengan metode *cooperative learning* ternyata direspon positif oleh sebagian besar mahasiswa. Terbukti berdasarkan angket mahasiswa sangat tertarik dengan perkuliahan Kurikulum dan Buku Teks Sejarah menggunakan metode *cooperative*

learning tersebut. Mereka terdorong untuk aktif dan antusias bertanya. Sebagian besar mahasiswa juga semakin memahami materi perkuliahan dan lebih berani mengemukakan pendapat. Mereka lebih percaya diri, berwawasan luas, toleransi, serta mampu melaksanakan tugas yang diberikan dosen. Sebagian besar mahasiswa lebih senang belajar mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dengan metode *cooperative learning* daripada dengan metode ceramah. Respon positif ini menunjukkan bahwa minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah dapat semakin meningkat.

Dalam hal gaya kognitif mahasiswa antara mahasiswa FI dan FD terhadap peningkatan pemahaman materi karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah ternyata tidak terdapat perbedaan yang mencolok, karena baik mahasiswa FI maupun FD sama-sama mengalami peningkatan pemahaman setelah diajar dengan *cooperative learning* model STAD. Peningkatan skornya pun tidak berbeda terlalu jauh, yaitu pada mahasiswa FI terjadi peningkatan 23,53% dari pra siklus ke siklus 1 dan 9,04% dari siklus 1 ke siklus 2. Sedangkan skor peningkatan pemahaman mahasiswa FD adalah 20,14% dari pra siklus ke siklus 1 dan 11,72% dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini berarti bahwa gaya kognitif tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa yang diajar dengan *cooperative learning* model STAD pada materi karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah.

SIMPULAN

Untuk peningkatan pemahaman antara mahasiswa bergaya kognitif FI dan FD terhadap materi pembelajaran karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah kedua-duanya sama-sama mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada mahasiswa FI terdapat peningkatan pemahaman materi perkuliahan dari 49,33% pada pra siklus menjadi 72,86% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 81,90% pada siklus 2. Sementara untuk mahasiswa FD terdapat peningkatan pemahaman materi perkuliahan dari 47,00% pada pra siklus menjadi 67,14% pada siklus 1, dan meningkat lagi menjadi 78,86% pada siklus 2. Gaya kognitif mahasiswa ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pemahaman materi pembelajaran karakteristik, jenis dan dasar-dasar pemilihan dan penggunaan buku teks sejarah pada Mata Kuliah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Anni, Chatarina Tri, dkk. 2006. *Psikologi Belajar*. Semarang. UPT UNNES Press.
- Anita, Lie. 2002. *Cooperative Learning*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Muslimin, dkk. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: UNESAUP.
- Kasmadi, H. 2001. *Pengembangan Pembelajaran dengan Model-Model Pengajaran Sejarah*. Semarang: PT Prima Nugraha Pratama.
- Nurhadi, dkk. 2004. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Slamet. 1987. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar*. Salatiga: Bina Aksara.
- Solihatun, Etin dan Raharjo. 2007. *Metode Cooperative Learning dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wolfok, E Arita. 1993. *Educational Psychology (5Ed)*. Singapore: Al & Bcn.

POLITIK DAN BIROKRASI : NETRALITAS BIROKRASI KOTA SEMARANG PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Puji Lestari

DosenPPKn, FIS UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

neutrality, bureaucracy, legislative election, president election.

Abstrak

Penelitian mengenai netralitas birokrasi masih perlu dilakukan untuk melihat sikap birokrasi yang tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/ golongan partai politik tertentu, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik dalam pelayanan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada birokrasi Pemerintah Kota Semarang. Yakni mengenai bagaimana netralitas birokrasi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014? Dan jika terdapat ketidaknetralan, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku birokrasi?

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang meneliti birokrasi Kota Semarang (pegawai negeri sipil). Hasil penelitian menunjukkan netralitas birokrasi kurang terjaga. Ditemukan hasil bahwa beberapa anggota birokrasi Kota Semarang masih melakukan pemberian dukungan seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, membagikan atribut partai politik/calon legislatif, menghadiri kegiatan kampanye. Namun, karena kontrol publik, media dan partai politik lain yang semakin terbuka maka sudah tidak terjadi pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada partai politik/calon legislatif. Dalam pemilu legislatif, masih ditemui pelanggaran pada Keputusan MenPAN No. 07 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi netralitas birokrasi dalam pemilu.

Abstract

The research about bureaucratic neutrality is feasible, considering that as a merit system bureaucracy, it is often found that a political bureaucracy (not neutral). This research was conducted in government bureaucracy of Semarang city. This is about; how bureaucratic neutrality of Semarang can be implemented on legislative and presidential elections in 2014? And if found non-neutrality of bureaucracy Semarang, what factors influence the attitudes and behavior of bureaucrats Semarang?

The research was conducted with a qualitative approach to investigate PNS (civil servants) at the Department of Education of Semarang and in the District of Gunungpati. The data showed that the neutrality of Semarang bureaucracy is not good. In the legislative elections in the city of Semarang still found a violation of MenPAN Circular No 07 of 2009 and Government

* Alamat korespondensi
vangavian@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pemilu 2014 merupakan wujud pelaksanaan mekanisme demokrasi Indonesia yang keempat pasca reformasi. Dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun, perkembangan demokrasi diharapkan semakin membaik dan membawa pada perubahan positif cara berpolitik seluruh masyarakat Indonesia.

Proses politik yang didukung oleh transparansi dan independensi dari pelaku-pelaku politik merupakan salah satu indikator kematangan berpolitik selama ini. Salah satu penentu kematangan berpolitik dalam sebuah negara modern adalah partai politik. Partai politik merupakan keniscayaan dalam pemerintahan yang demokratis. Partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang intinya merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan serta untuk memerintah. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, partai politik berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini dilaksanakan oleh partai politik, baik pada saat membentuk pemerintahan atau ketika partai politik berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran partai politik dalam pemerintahan seringkali ditentukan dari seberapa besar kemenangan mereka dalam pemilihan umum yang dijalankan. Walaupun pernyataan

tersebut belum tentu selamanya terjadi. Adakalanya, partai politik yang memperoleh banyak suara tidak ikut masuk dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam parlemen, bisa dipastikan bahwa partai politik yang memperoleh banyak suara dapat mempengaruhi kebijakan politik nasional.

Partai politik dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Partai politik ada dalam negara dengan maksud untuk mencapai kekuasaan baik dalam pemerintahan atau eksekutif, maupun dalam lembaga legislatif. Ironisnya, dengan alasan kekuasaan ini partai politik sering kali “lupa diri”. Saat terlibat dalam membentuk pemerintahan misalnya, dari waktu ke waktu partai politik dinilai sering mengesampingkan aspek profesionalisme. Berdasarkan pengalaman selama ini, ada baiknya keinginan Bung Hatta dulu untuk membangun pemerintahan sipil yang demokratis bisa digunakan untuk menentukan kriteria pengangkatan seorang menteri dalam kabinet presidensial. (MiftahThoha, 2014: 164). Begitu seseorang sudah menduduki jabatan menteri, yang bersangkutan harus berbakti untuk negara bukan lagi untuk partainya. Sebagai pejabat negara, mereka seharusnya tidak loyal pada partai politik. Rangkap jabatan antara jabatan pimpinan partai politik dan pejabat negara telah lama dikeluhkan. Rangkap jabatan dilihat dari perspektif apapun baik etika, manajemen, sosial, politik dan ekonomi

kurang bagus. Dualisme loyalitas ini tentu akan berbahaya dan akan menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kondisi demikian akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Loyalitas para kader partai politik yang memegang pemerintahan untuk partainya, sangat mempengaruhi kinerja birokrasi di bawahnya. Tidak dipungkiri berdasarkan pengalaman pemerintahan Indonesia, hadirnya partai politik dalam sistem pemerintahan memang memberi pengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintah. Birokrasi merupakan mesin bagi negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap negara modern membutuhkan birokrasi yang dapat mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Birokrasi pada dasarnya merupakan “alat pemerintah” yang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijakan pemerintahan dalam rangka pencapaian kepentingan rakyat.

Pada awalnya, secara teoritik birokrasi terkait dengan kekuasaan pemerintah, akan lebih mengarah pada bagaimana netralitas birokrasi itu sendiri dijalankan. Perdebatan antara Karl Marx dan Hegel tentang netralitas birokrasi mengawali pemikiran bagaimana posisi birokrasi dijalankan dalam pemerintahan. Marx berpendapat bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan umum akan tetapi kepentingan khusus dari kelas dominan sehingga masa depan dan kepentingan birokrasi menurut konsep Marx pada tingkat tertentu menjalin hubungan sangat intim dengan kelas dominan dalam suatu negara (Miftah Thoha, 2012: 55). Dengan arti kata Marx menyatakan bahwa

birokrasi jelas tidak netral dan harus memihak kelas yang dominan. Disinilah netralitas birokrasi akan dibahas. Sedangkan Hegel menghendaki netralitas birokrasi dimana birokrasi diletakkan di tengah-tengah sebagai perantara antara masyarakat yang terdiri dari kaum profesi dan pengusaha dan pemerintah.

Birokrasi Indonesia dari waktu ke waktu sering diolok-olok sebagai birokrasi yang besar, bertele-tele dan memihak. Birokrasi dijalankan berdasarkan keinginan penguasa yang seringkali tidak dapat melepaskan jeratan kepentingan partai politik (Hariandja, 2009: 94). Masa Orde Baru, birokrasi menjadi sarana dan alat yang efektif bagi partai politik pembentuk pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan meraih kemenangan suara pada setiap penyelenggaraan pemilu. Para birokrat yang berstatus sebagai pegawai negeri menjadi pengikut setia kebijakan yang diambil oleh penguasa. Demikian juga penggunaan fasilitas negara saat itu oleh partai politik pemerintah mengekspresikan “kebodohan” birokrasi yang tidak netral dan masuk dalam kepentingan partai politik tertentu. Birokrasi di Indonesia sesungguhnya ditetapkan sebagai birokrasi merit (Meyer and Blau, 2002:55).

Hal ini tergambar dari adanya ketentuan mengenai netralitas birokrasi dari politik. Merit sistem birokrasi, menekankan pada profesionalisme bagi pengisian jabatan birokrasi. Seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan oleh suatu jabatan dapat diangkat untuk menduduki jabatan tersebut (jabatan karier). Namun demikian, disadari tidak semua jabatan harus diisi oleh pejabat karier.

Departemen pemerintah merupakan suatu lembaga yang dipimpin melalui jalur politik yang berasal dari partai politik. Hanya disinilah partai mempunyai jalur untuk mewujudkan kebijakan politiknya dalam memimpin pemerintahan. Namun kesempatan ini dibatasi hanya pada pimpinan departemen, bukan seluruh aparat departemen. Di Indonesia, pemerintah (presiden, wakil presiden, menteri/pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati atau walikota) merupakan hasil pemilu dan produk proses politik lainnya menurut konstitusi dan undang-undang. Sedangkan birokrasi, merupakan hasil rekrutmen berdasarkan kriteria kemampuan prestasi, keahlian, pengalaman kerja, pelatihan dan pembinaan lainnya. Termasuk dalam jajaran birokrasi sipil adalah mulai dari pangkat tertinggi IVE sampai IA atau dari eselon I sampai V, dari jenderal/ laksamana/ marsekal sampai prajurit dalam jajaran birokrasi tentara/polisi, pada instansi pusat atau daerah, BUMN maupun BUMD (Kusumah, 2000: 84).

Sejak tahun 1998, perubahan dan penataan berpolitik dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah reformasi di bidang kepegawaian yang merupakan konsekuensi dari perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial yang begitu cepat terjadi sejak paruh pertama tahun 1998. Berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai peraturan perundang-undangan yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dengan pokok bahasan yang sama tersebut, kemudian diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, baik yang berupa Peraturan

Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres), untuk menjamin terlaksananya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ini secara baik dan terarah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 merupakan langkah strategis dalam penataan politik saat itu, mengingat pegawai dalam birokrasi Indonesia yang sangat besar jumlahnya dan pengalaman sejarah masa Orde Baru memperlihatkan pegawai merupakan alat penguasa yang paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Demikian, pengalaman negara lain (Amerika Serikat, Inggris) menunjukkan bahwa birokrasi merupakan komponen yang penting dalam penataan politik negara. Artinya, apakah birokrasi akan terlibat dalam politik atau birokrasi akan a politis atau netral terhadap politik. Pada masa Orde Baru peran dan fungsi birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS) sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak berjalan secara optimal. Akibatnya terjadi diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS, konflik kepentingan dan mereka menjadi tidak profesional lagi. Keberpihakan birokrasi pada Golkar sebagai salah satu kontestan pemilu selama kurang lebih dua dekade merupakan strategi penguasa yang paling efektif dalam mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi menjadi “alat” kekuatan sosial dan politik yang dominan. Kemenangan Golkar pada empat kali pemilu, salah satu faktor yang menentukan kemenangan itu adalah peranan birokrasi. Birokrasi ikut memilih dalam pemilu, dan “tidak diperbolehkan” ada alternatif lain yang dipilih kecuali Golkar. Pada masa Orde Baru, birokrasi “diwajib-

kan” memihak ke Golkar.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 kemudian dirumuskan beberapa UU dan peraturan perundangannya, UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD (Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84), UU 32 Th 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri; Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, netralitas birokrasi masih tetap dirisaukan masyarakat disetiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sifat masyarakat negaranegara sedang berkembang merupakan pangkal ketidaknetralan birokrasi. Pada umumnya masyarakat di negara-negara tersebut adalah masyarakat transisi, yakni antara masyarakat yang mempunyai karakteristik tradisional sekaligus modern. Masyarakat demikian biasa dikenal dengan *prismatic society* (masyarakat prismatic). Menurut Fred W. Riggs dalam Prijono Tjiptoherijanto, masyarakat prismatic mempunyai tiga ciri utama. 1. *Heteroginitas* yakni perbedaan dan percampuran yang

nyata antara sifat-sifat tradisional dan modern; 2. *Formalisme* menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktek atau tindakan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita; 3. *Overlapping* merupakan gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang dideferensiasikan dan dispesialisasikan dengan berbagai struktur informal yang belum dideferensiasikan dan dispesialisasikan. Namun demikian, harapan terciptanya birokrasi yang netral dari politik dan professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap menjadi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi.

Persoalan mengenai lemahnya netralitas birokrasi akhir-akhir ini sering kali disinyalir banyak terjadi di daerah (pemerintah kota dan kabupaten) mengingat adanya kewenangan kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 yang memungkinkan Gubernur, Bupati dan Walikota mengangkat dan memberhentikan PNS di daerahnya mulai dari pangkat I/a sampai dengan golongan IV/e, Pembina Utama. Secara nasional tentu ini melemahkan tuntutan netralitas birokrasi daerah terutama daerah yang dalam pengangkatan pegawai baru dan promosi serta mutasi tidak mengikuti prinsip *merit sistem* tetapi lebih pada *marriage sistem* (sistem kekeluargaan). Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang netralitas birokrasi dalam pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014, layak untuk dilakukan. Birokrasi Kota Semarang sebagai subjek penelitian untuk melihat birokrasi

Indonesia dalam skope yang sempit. Mengingat besarnya birokrasi pada pemerintah Kota Semarang. Selain itu, pada pelaksanaan pemilu legislatif 2014 Kota Semarang dalam perolehan angka politik cukup dinamis dalam perolehan suara masing-masing partai politik. Artinya, tidak ada partai yang dominan dalam perolehan suara. Hal ini sama seperti perolehan suara partai politik secara nasional yang menggambarkan tidak ada satu partai dominan dalam perolehan suara pada pemilihan legislatif 2014. Netralitas birokrasi yang dimaksud meliputi sikap birokrasi yang tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok/golongan partai politik tertentu, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik dalam pelayanan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin diteliti dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana netralitas birokrasi Kota Semarang dalam pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014? dan jika ditemukan ketidaknetralan birokrasi Kota Semarang, faktor apa yang mempengaruhi sikap dan perilaku birokrat Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diharapkan dapat mengungkap netralitas birokrasi Kota Semarang dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Fokus penelitian diujukan pada netralitas birokrasi yang dapat

diukur berdasarkan pada ditaatinya peraturan yang telah ditetapkan mengenai netralitas birokrasi. Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2014 saat menjelang dan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Kota Semarang. Penelitian dilaksanakan pada birokrasi Kota Semarang. Subjek penelitian adalah birokrasi di Kota Semarang. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota birokrasi Kota Semarang, pengurus partai politik dan masyarakat secara mendalam mengenai sikap, perilaku dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang secara umum dan para birokrat, PNS mengenai netralitas mereka dalam pemilu 2014 dan pemilihan presiden 2014. Dokumentasi sebagai sumber data dapat diperoleh tim peneliti dari data laporan dan pelaporan Bawaslu Kota Semarang jika ditemukan pelanggaran pemilu oleh PNS birokrat Kota Semarang. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan langkah dan pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan diakhiri dengan penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paska reformasi 1998 salah satu topik yang selalu menarik dikaji dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai birokrasi di Indonesia. Beberapa penelitian dan kajian terfokus juga pada peran dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi “mesin” birokrasi, hubungan mereka dengan partai politik, kiprah mereka dalam proses pemilihan umum dan

sebagainya. Perjalanan politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi/Pegawai Negeri Sipil khususnya, merupakan instrumen politik yang sangat efektif dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaannya. Hal ini bukanlah suatu hal yang baru, karena pola-pola pemanfaatan birokrasi sebagai suatu instrumen politik rezim terjadi sejak masa pemerintahan kolonial.

Demikian juga penelitian ini mengkaji mengenai dinamika yang terjadi dalam hubungan birokrasi dengan politik partai politik yang terselenggara di Kota Semarang khususnya dalam siklus lima tahunan sistem politik Indonesia dilaksanakan tahun 2014.

Netralitas Birokrasi di Kota Semarang

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap netralitas pegawai negeri sipil di Kota Semarang. Netralitas yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dan PNS Kecamatan Gunungpati. Sebagai abdi negara dan pelayan rakyat sudah seharusnya PNS bersikap netral terhadap partai politik, tidak mendukung secara terang-terangan dan konfrontatif sebuah partai politik.

Pada pemilu tahun 2014 ini, PNS Kota Semarang cukup berhati-hati dalam berpolitik praktis. Ini disebabkan pengawasan dari berbagai pihak serta sikap kritis masyarakat yang mengawal pelaksanaan pemilu. Netralitas pegawai negeri sipil pada pemilihan presiden 2014 juga menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Kota Semarang (Suara Merdeka, 16 Juni 2013). Pada pembacaan pandangan fraksi di Rapat Paripurna Laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota tahun 2013 di DPRD Kota Semarang, PKS diwakili oleh Johan Rifai (anggota Fraksi PKS) menyampaikan beberapa hal terkait dengan kinerja PNS di Kota Semarang. Hal ini merespon keterlibatan kampanye salah satu calon presiden.

“Perlu kami sampaikan, ini sangat memprihatinkan karena posisi PNS seharusnya bisa netral. Setiap pribadi memiliki pilihan, itu kami hormati. Tapi sebagai pamong praja bukanlah wajar jika dituntut untuk netral dan bisa menempatkan diri”.(Suara Merdeka, 16 Juni 2013).

Anang Budi Utomo (Anggota Fraksi Golkar-Wakil ketua Komisi D DPRD) pada Rapat tersebut juga menjelaskan;

“netralitas harus dijaga agar pesta demokrasi benar-benar dirasakan dan dimiliki oleh masyarakat. Kami semua tentu ingin demokrasi bisa berjalan sesuai ketentuan. Khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Netralitas perlu dijaga untuk kewibawaan PNS apalagi ini sudah diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.”

Selain sorotan netralitas ini disampaikan di dalam sidang Dewan, masyarakat juga sedemikian aktif dan intensif dalam mengawasi dan menyuarkan jika terjadi pelanggaran netralitas oleh PNS. Namun demikian, masih juga ditemukan pelanggaran oleh PNS di Kota Semarang, seperti yang terjadi pada Lurah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu yang dilaporkan oleh warga telah melanggar ketentuan netralitas PNS. Lurah dan sekretaris Lurah

telah membagi-bagikan alat peraga kampanye calon tertentu berupa foto kampanye. Sampai dengan dilaksanakannya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, pemerintah Kota Semarang telah melakukan pembinaan pada PNS dari Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu. Namun demikian dalam penelusuran yang dilakukan peneliti, PNS yang telah melanggar tersebut hanya terkena sanksi hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 2 yakni sanksi hukuman teguran tertulis. Ketua Panwaslu Kota Semarang menyatakan;

“surat bernomor 862/3297 tertanggal 25 Maret 2014 dengan kop yang ditandatangani Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto telah diterima Panwaslu. Menjelaskan bahwa Pimpinan telah memberikan sanksi dan pembinaan pada PNS yang melakukan pelanggaran tentang aturan netralitas”. (Suara Merdeka, Jumat 28 Maret 2014).

Demikian ketatnya pengawasan terhadap perilaku politik PNS di Semarang menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Yang kurang diimbangi dengan sanksi yang bisa berakibat jera pada PNS. Namun demikian, ini berimbas pada PNS lainnya di Kota Semarang.

PNS di lingkungan Dinas Pendidikan misalnya. Guru secara umum memiliki sikap netral. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap guru-guru, mereka menyatakan netralitas PNS terutama guru itu pasti terpenuhi. Hasil wawancara dengan Muhammad (53 tahun) Kepala Sekolah SDN Pakintelan 2;

“ Sebagai seseorang yang mencari makan dengan profesi PNS apalagi jadi

guru, sudah sepatutnya PNS menjaga netralitasnya. Rakyat yang dilayani PNS berasal dari berbagai macam warna politik, maka PNS harus bisa menjaga perasaan rakyat terkait partai politik. Meskipun diperbolehkan memihak dalam pemilu namun bukan berarti PNS bisa secara konfrontatif memberikan dukungannya pada sebuah partai politik. Dukungan dari PNS kepada partai politik sebaiknya hanya digunakan dalam bilik suara saat pemilu tiba (wawancara 6 Agustus 2014).

Ketatnya pengawasan terhadap PNS dalam politik, tidak selamanya berimbas pada terwujudnya perilaku PNS yang apolitis. Seperti yang terjadi menjelang pemilu legislatif dilaksanakan, pada tanggal 7 April 2014 datang dari rumah kerumah di lingkungan RT 04 RW I Kelurahan Sekaran seorang kader partai yang meminta dukungan untuk mencoblos nama-nama yang ada di kartu yang dibawanya;

“Niki kulo sowan, kepareng matur nyuwun dukungan kagem nyoblos nami-nami meniko. Menawi saget kagem wigatosan, supados Pak Lurah mboten dipindah-pindah kersanipun dados Lurah wonten Sekaran (Ini saya datang, mohon dukungan supaya bisa mencoblos nama-nama ini. Untuk diperhatikan dukungan ini supaya Pak Lurah tidak dipindah-pindah, tetap menjadi Lurah Sekaran)”.

Permintaan dukungan ini disampaikan oleh salah seorang kader partai dengan “membawa nama” PNS Lurah Sekaran. Dalam pengamatan peneliti, cara ini cukup efektif untuk memperoleh suara. Terbukti perolehan suara legislatif di TPS RW I hampir

72 persen suara diperoleh oleh partai tersebut. Selain itu, isu yang diusung dalam menghimpun suara cukup menarik dukungan masyarakat.

Dukungan masyarakat atau mayoritas masyarakat dimana birokrat itu tinggal terhadap calon tertentu, biasanya juga dapat menjadikan mereka memihak dan berperilaku tidak netral. Berlatar belakang dari temuan di atas, peneliti berpendapat bahwa netralitas PNS masih belum maksimal. Dapat dikatakan netral, namun pada kenyataannya walaupun secara langsung tidak menggerakkan massa, membagikan atribut kampanye, dan sebagainya, namun PNS tetap memegang peranan dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat untuk memilih. Ketidak netralan PNS akan sangat berpengaruh, mengingat peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Akan terjadi diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS, konflik ke-pentingan dan lebih jauh mereka menjadi tidak profesional lagi.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Netralitas Birokrasi

Membebaskan birokrasi dari fungsi kontrol politik terhadap masyarakat sudah dimulai sejak pemerintahan transisi Habibie. Penataan birokrasi dalam masyarakat modern dilakukan berkaitan dengan kinerja birokrasi. Mengenai birokrasi Kota Semarang dalam kegiatan politik, seperti halnya secara menyeluruh di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh rambu-rambu dalam Surat Edaran MenPAN No 07 Tahun 2009 mengatur secara jelas bahwa PNS harus netral dan tidak boleh melibatkan diri dalam

politik. Selain itu, ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara ketat mengatur bahwa PNS harus netral.

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13, PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c, diberi sanksi disiplin berat terdiri dari;

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 12, PNS yang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, angka 14; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara

terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d. diberi sanksi disiplin sedang terdiri dari;

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Peneliti mengamati dan mencatat beberapa hal yang terjadi pada pra pemilu di Kecamatan Gunungpati. Stakeholder tidak berpengaruh terhadap netralitas PNS dalam politik di Kota Semarang namun ketatnya pengawasan dari masyarakat terhadap netralitas masyarakat Kota Semarang berakibat pada perubahan pola perilaku PNS dalam “berpolitik”. Tidak seperti pada masa 10 tahun yang lalu, dimana banyak PNS yang secara terang-terangan ikut terlibat dalam kampanye misalnya dengan membagi-bagikan sembako, menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan sebagainya, saat ini PNS tidak secara terang-terangan memperlihatkan keberpihakan mereka dalam arena politik. Hasil catatan peneliti, seperti halnya saat pemilihan gubernur pada tahun sebelumnya, PNS di lingkungan kelurahan di Kecamatan Gunungpati sangat dipengaruhi

oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai politik pengusung Wali Kota yang menjabat. Walau tidak langsung dan hanya berhenti pada pembicaraan-pembicaraan beberapa orang menyatakan bahwa beberapa lurah dihimbau untuk mendukung perolehan suara partai tersebut. Hasil wawancara peneliti bersama Minulyo (49 tahun) salah seorang kader PDI Perjuangan di Kecamatan Gunungpati diperoleh keterangan jika pendekatan yang dilakukan masih melalui tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan.

Dalam waktu jauh sebelum pemilu dilaksanakan, diberbagai kegiatan menjelang kampanye legislatif, beberapa PNS pejabat publik menggunakan dan memanfaatkan momen-momen kegiatan dalam masyarakat untuk masuk dan memperkenalkan diri dalam masyarakat. Seperti saat pelaksanaan kegiatan peringatan hari kemerdekaan tanggal 20 Juli 2013 salah seorang bakal calon yang kebetulan adalah istri PNS pejabat publik dari PNS ikut hadir di RW I Kelurahan Sekaran. Pada kegiatan ini, yang bersangkutan berkampanye secara langsung dengan memperkenalkan diri, minta doa, restu dan dukungan untuk ikut maju dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Hal yang serupa dilakukan juga pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di beberapa kelurahan di Kecamatan Gunungpati. Misalnya saat diselenggarakan *lunching posdaya* di Kelurahan Pakintelan, pertemuan PWRI Kecamatan Gunungpati bakal calon melakukan hal yang serupa. Kehadiran bakal calon ini, tentu saja bukan suatu kebetulan. Memang ada maksud untuk berkampanye dan bukan kerena yang bersangkutan adalah istri pejabat kerena ritual hadir dalam suatu kegiatan masyarakat secara intensif bukan

merupakan kebiasaan yang bersangkutan. Yang menarik untuk dicari jawabnya oleh peneliti adalah “bagaimana yang bersangkutan tersebut tahu jika akan ada kegiatan di kelurahan itu?” Jawaban dari panitia kegiatan;

“panitia tidak mengundang tetapi Pak Lurah yang menginformasikan bahwa acara akan dihadiri oleh bakal calon yang sekaligus ia adalah istri PNS pejabat di Kecamatan Gunungpati” (wawancara dengan Indi, Ketua Panitia Kegiatan Lounching Posdaya Pakintelan 9 September 2013).

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa ada komunikasi non formal yang terjalin antara PNS atasan dan bawahan untuk memberi kesempatan kepada salah satu calon untuk ikut bersosialisasi sebelum tahapan kampanye dilakukan. Namun hal ini tentu bukan termasuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena yang dimaksudkan netral dalam dalam Surat Edaran Menpan No 07 Tahun 2009, salah satunya adalah tidak boleh menggerakkan massa, menggunakan aset pemerintah untuk kampanye dan menggunakan simbol-simbol partai saat bertugas kedinasan. Bukan termasuk pelanggaran karena PNS dapat menghindari kegiatan menggerakkan massa dalam rangka berkampanye, melainkan hanya memberi informasi kepada bakal calon untuk ikut sebagai partisipan dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti yang terurai di atas, tampak jelas dan disimpulkan bahwa para pelaku birokrasi di Kota Semarang tampaknya sangat memahami tentang isi

peraturan yang mengatur tentang netralitas PNS beserta sanksi jika ada pelanggaran. Sehingga mereka mengemas keterlibatan mereka dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, sanksi yang diberikan menurut peraturan perundangan sangatlah ringan sehingga tidak dan kurang menimbulkan efek jera.

Faktor Internal yang Mempengaruhi Netralitas PNS

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 80 yang mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Demikian dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden netralitas PNS juga dijaga dan diatur.

Netralitas PNS dalam pemilihan umum (DPR, DPRD, DPD, presiden/wapres, kepala daerah/wakil kepala daerah) sesuai dengan Surat Edaran MenPAN No 07 Tahun 2009 mengatur bahwa PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, PNS yang mencalonkan scr perseorangan menjadi anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai PNS, PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan

diri dari jabatan negeri. Selain itu, PNS yang menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya serta mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan kampanye.

Faktor internal yang mempengaruhi netralitas PNS adalah apa yang terjadi pada birokrasi itu sendiri. Struktur birokrasi yang bercabang, ada pimpinan ada bawahan secara struktural, menyebabkan banyak hal dapat terjadi dalam birokrasi yang yang tidak dapat diakses oleh pihak lainnya. Kebiasaan atau kebijakan masa lalu yang cukup lama mempengaruhi pemikiran bahkan sikap dari PNS, yaitu adanya istilah monoloyalitas pada kelompok tertentu, bahkan kepada orang tertentu. Termasuk dalam hal berpolitik, seringkali kepentingan pimpinan dapat dengan mudah berubah menjadi kepentingan sistem. Dalam tata kerja PNS, atasan memberikan penilaian kinerja pada bawahan dalam periode tertentu. Disinilah terkadang terjadi penyelewengan wewenang pimpinan. Seperti yang terjadi pada pemilihan legislatif, kepentingan PNS yang memegang kekuasaan sangat terlihat sebagai kepentingan sistem.

Selain hal yang diuraikan di atas, netralitas PNS dalam pemilihan umum juga ditentukan oleh PNS sendiri, yakni; *Pertama*, kebiasaan individu seseorang untuk ingin terlibat dalam kegiatan kegiatan politik praktis, terkadang mereka lupa tentang posisinya sebagai pegawai negeri sipil yang harus membatasi diri dalam kanc

politik. *Kedua*, kurang percaya diri, kemungkinan karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi pengetahuan ataupun ketrampilan yang dimilikinya, artinya tidak profesional. Sehingga seringkali apa yang dipilih oleh atasannya atau kolega dekat yang dianggap memiliki kemampuan lebih darinya itulah yang baik menurut dirinya. *Ketiga*, setiap individu birokrasi dengan ambisi yang besar untuk memperoleh jabatan tertentu dalam birokrasi, sehingga diharapkan dengan pemihakan pada calon tertentu atau partai tertentu, akan diperoleh imbalan berupa jabatan yang akan diduduki. *Keempat*, hubungan kekeluargaan dengan calon-calon yang diusungnya. *Kelima*, terdapat provokasi bahkan ancaman kepada PNS oleh pimpinan ataupun orang-orang yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak PNS agar memihak.

Dalam praktik, beberapa penelitian sebelumnya mencatat ada tiga bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu. *Pertama*, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi partai politik tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol/caleg tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol/caleg dari anggaran negara. *Kedua*, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya. *Ketiga*, pemberian dukungan lain, seperti bantuan

sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut partai politik/calon legislatif, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada parpol/caleg. Namun dalam pelaksanaan pemilu tanggal 9 April 2014 hanya bentuk yang ketiga yang ditemukan oleh peneliti di Kota Semarang walaupun masih terselubung. Dua bentuk lainnya tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Dukungan diberikan dan disalurkan oleh PNS terhadap calon legislatif dengan bentuk memberi informasi, kesempatan bersosialisasi, berkampanye pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang difasilitasi oleh pejabat PNS. Penelitian juga dilakukan pada pemilihan presiden, PNS tidak terkotak-kotak dan tidak dipertanyakan netralitasnya. Hal ini disebabkan oleh peranan partai politik dan media sudah sangat efektif dalam kampanye serta tidak adanya *incumbent* yang mencalonkan diri dalam pemilihan kali ini.

PNS dalam bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu PNS dalam menjalankan tugasnya harus netral dari pengaruh semua golongan. PNS yang tidak netral dalam pemilu dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai hukuman disiplin tingkat berat atau hukuman pidana. Ini karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu komponen yang

memerlukan penerapan sistem penilaian kinerja (prestatikerja) melalui *merit system*. Mengingat, keberadaan PNS sangat dibutuhkan dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. PNS sebagai aparatur negara masih memiliki kinerja yang rendah. Hal ini didasarkan pada kompetensi dan produktivitas PNS yang masih rendah dan perilaku yang *rule driven*, paternalistik dan kurang profesional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa netralitas birokrasi Kota Semarang pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 masih belum terlaksana. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh birokrat pegawai negeri sipil di Kota Semarang. Secara kuantitas, jumlah pelanggaran sudah dapat diminimalisir karena adanya kontrol masyarakat yang ketat termasuk ormas serta media massa, kinerja panitia pengawas pemilu dan Bawaslu serta pemahaman yang lebih baik bagi sebagian besar aparat birokrasi. Namun, masih ditemukan pelanggaran terhadap aturan *politis* bagi birokrat yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrow, Martin. 2006. *Birokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Anderson and Kahin. 1972. *Interpreting Indonesian Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Blau Peter dan Marshal W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*.

- Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia*. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Volume 6 Nomor 3, Maret 2003 (285-308) (ISSN 1410-4946)
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giovanni Sartori, 1984. *Parties and Party Systems A Framework for Analisis* (New York: Cambridge University Press, 1984
- Hariandja, Denny. 1999. *Birokrasi Nan Pongah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kusumah, Mulyana W. 2000. *Menata Politik Pasca Reformasi*. Jakarta: KIPP Indonesia.
- Thoha, Miftah, 2012, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: PT Media Mandala.
- , 2014, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Prenadamedia.

Referensi lain

- Acmad, Batinggi. 1999. *Desertasi: Birokrasi Indonesia*.
- Lestari, Puji. 2001 (Tesis: Partai politik dan birokrasi: perbandingan peran dan posisi birokrasi antara hasil pemilu 1955 dan pemilu 1999)
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2009. *Aparatur Negara pada Era Reformasi dalam CSIS No. 2 tahun 2009*.

UU No. UU 43 Th. 1999

UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu

UU 32 Th 2004 Tentang Pemerintah Daerah

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Indri Astuti, S.Pd.

Guru PPKn SMK Texmaco Pernalang

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Juni 2014
Disetujui Desember 2014
Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

Law, Politics, Corruption

Abstrak

Politik hukum sangat menarik untuk dikaji karena politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Adapun yang dikaji dalam artikel ini meliputi (1) Bagaimana sejarah perkembangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?, dan (2) Bagaimana kajian politik hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Sejarah perkembangan undang-undang tindak pidana korupsi diawali dengan latar belakang lahirnya peraturan pengawasa militer pada 9 April 1957. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undang-undang masa orde baru muncul Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kajian politik Hukum undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari segi filosofis, pragmatik dan sosiologis. Untuk memberikan analisa politik hukum ini penulis mencoba memberi masukan tentang undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan tentang masalah kualifikasi delik, tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat, Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan, formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) serta tentang Recidive.

Abstract

*Political law is very interesting to be learnt because of the political law describes how the changes to be made in the applicable law in order to meet the needs of the community, to discuss the process of formation of *iusconstituendum* in the face of changes in people's lives, as well as legal changes resulting product which sets the frame work and direction of development law. As reviewed in this article include: (1) How does the history of the development of legislation to era dicate corruption in Indonesia, and (2) How is the political assessment of the law against the law to eradicate corruption in the development of legislation Indonesia. The*

history of corruption begins with the background to the rules of military ruler on April 9, 1957. The Eradication corruption. In reformation era the substitute of legislation of the new order merging Act No. 31 of 1999 which then under goes refinement by Act No. 20 of 2001. political Studies Law Law corruption eradication in terms of philosophical, pragmatic and sosiologis. To provide legal political analysis, the writer tries to give input on the final legislation that Act No. 20 of 2001 to see a few things to note is about the rules on the subject of qualify in offense, not minimal criminal implementation guide lines specifically, the absence of specific provisions regarding the implementation of the criminal fines are not paid by the corporation, the absence of specific provisions that define the notion of the term of agreement evil, the transition rule in Article 43 A of Law No. 20 of 2001 which was consider redexcessive, Dead Criminal formulation which is only valid for one article, namely Article 2 paragraph (1) as well as on Recidive.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
matapanda1984@gmail.com

PENDAHULUAN

Politik hukum sangat menarik untuk dikaji dalam perkembangan hukum ada beberapa pendapat seperti Sapiro Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum adalah studi hukum yang diarahkan pada *iusconstituendo* (hukum yang harus berlaku) dan merupakan bagian substansial ilmu perundang-undangan (Maryanto). Politik hukum membahas mengenai bagaimana perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, membahas proses pembentukan *iusconstituendum* dari *iusconstitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat, serta produk perubahan hukum yang dihasilkan yang menetapkan kerangka dan arah perkembangan hukum. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Utrecht dinyatakan bahwa Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan

apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Boleh dikatakan, politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat suatu *iusconstituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *iusconstituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *iusconstitutum*.

Dengan urgensi dari politik hukum tentunya ini sangat diharapkan dalam perkembangan produk-produk perundang-undangan agar lebih sensitif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Produk hukum dijadikan pedoman pengaturan semua aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya, keamanan maupun dalam bidang ekonomi. Tentunya dengan acuan yang baik dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengatasi masalah ataupun dikotomi yang dialami oleh masyarakat. Sehingga politik hukum ini harus melihat fenomena adanya

perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Himes dan Moore perubahan sosial mempunyai tiga dimensi yaitu : dimensi struktural, dimensi kultural dan dimensi interaksional (Martono, 6). Dimensi struktural meliputi adanya perubahan aspek perilaku dan kekuasaan, peningkatan maupun penurunan sejumlah peranan atau pengkategorian peranan, maupun perubahan tipe dan daya guna fungsi sosial. Dalam dimensi kultural yang disoroti adalah adanya perubahan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dimensi interaksional lebih dititik beratkan pada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial memang menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kegiatan kekuasaan yaitu berkaitan dengan proses legislasi. Jangan sampai kekuasaan ini hanya digunakan untuk kepentingan para elit politik atau untuk melegitimasi kekuasaan dari penguasa, sementara itu upaya demokrasi yang terus digaungkan di negara kita akan menjadi suatu keniscayaan.

Dalam mengkaji tentang politik hukum kita perlu mengulas tentang masalah yang aktual. Dalam artikel ini akan mencoba menguraikan tentang kajian politik hukum dari berlakunya undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah berlaku dan saat ini berlaku di negara kita. Sebagaimana telah diuraikan pentingnya keilmuan dari politik hukum, masalah pemberantasan korupsi menjadi materi yang menarik untuk dibahas. Apalagi masalah ini memang menjadi masalah yang menjangkit negara kita.

Pemberantasan korupsi menjadi masalah yang perlu dilakukan secara berkesinambungan karena gejalanya memang seperti fenomena gunung es jadi pemberantasan yang telah dilakukan saat ini baru gambaran kecil dari kasus yang terjadi. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Anggaran yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat hanya dinikmati oleh segelintir orang saja inilah yang dapat menyebabkan rapuhnya negara Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dikaji dengan pandangan penegakan hukum yang akan dilaksanakan dengan menilai produk perundang-undangan yang telah dibuat untuk menilai sensitifitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga jangan sampai undang-undang yang dibuat tidak dapat menguraikan tindakan ataupun modus baru yang semasa masa dapat muncul. Hal ini menyebabkan para pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat karena tidak diatur dalam pasal di undang-undang tindak pidana korupsi. Menurut Sudarto menyatakan ada tiga pandangan hukum yaitu legalistis, fungsional dan kritis (Effendy, 2010:2). Untuk dapat mewujudkan cita cita hukum diperlukan sinergi diantara ketiga aspek tersebut. Untuk itu menganalisa undang-undang pemberantasan tindak korupsi melalui pandangan politik hukum juga akan memantapkan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Adapun yang dikaji dalam artikel ini meliputi (1) Bagaimana sejarah perkembangan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? dan (2) Bagaimana kajian politik

hukum terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

SEJARAH PERKEMBANGAN UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Sejak bergulirnya era reformasi gemanya tentang tindak pidana korupsi semakin keras berkumandang. Bahkan sempat dikatakan bahwasanya tindakan korupsi ini mungkin menjadi warisan dari orde baru. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang melekat dari bangsa ini. Korupsi sesungguhnya sudah merupakan penyakit bawaan sebab bukan hanya dari pemerintahan orde baru saja namun benih-benih ini muncul tidak hanya pada masa penjajahan kolonial namun diawali dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan dinusantara. Azra (2006 : viii) menuliskan bahwa pada masa kerajaan islam nusantara, Undang-Undang Melaka yang digunakan sebagai rujukan hukum beberapa kerajaan islam di wilayah Sumatera, secara eksplisit memuat hukum larangan suap menyuap. Bahkan segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim termasuk pemberian makanan dan uang yang bersumber dari *baitul mal* dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya (Handoyo, 2009:1). Korupsi sudah menjadi masalah yang bukan hanya bersifat lokal namun sudah internasional. Komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi didukung oleh lembaga-lembaga pembiayaan dunia seperti World Bank, ADB, IMF, dan organisasi seperti OECD dan APEC. PBB dalam sidang

umum pada tanggal 16 Desember 1996 mendeklarasikan upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut dalam pertemuan 93 negara di lima per tanggal 11 September 1997 dinyatakan adanya konferensi untuk memerangi korupsi dengan cara bekerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, selain itu penyelenggaraan negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, integritas, dan depolitisasi sistem peradilan sebagai bagian penting dari penegakan hukum.

Korupsi yang telah banyak menjangkit banyak negara tentunya menjadi permasalahan yang krusial untuk diatasi. Indonesia bukannya tidak berusaha untuk melakukan upaya pemberantasan ini. Sejak dari pemerintahan orde lama, orde baru maupun pada masa orde reformasi. Adapaun pembahasan dari setiap masa dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada masa orde lama

Dalam pemerintahan Indonesia sebagai awal perintis kemerdekaan masa ini menjadi masa yang berat bagi para pendiri bangsa karena harus menyiapkan secara awal tonggak-tonggak berdirinya negara. Banyak hal yang harus disiapkan mulai dari perangkat kelembagaan pemerintahan, sistem hukum yang harus berlaku, persiapan dari segi politik, ekonomi, keamanan maupun masalah sosial menjadi titik fokus perhatian pemerintahan pada masa ini. Bukan hal yang mudah untuk mengawali perjalanan sebagai negara yang mandiri. Kesiapan dari para lembaga negara untuk diawal kemerdekaan menjadi masalah yang krusial seperti

pada saat gagalnya badan konstituante dimana mereka diberi tugas mengenai masalah legislasi dalam menemukan hukum konstitusi yang dipakai pasca pemerintahan. Untuk itulah dapat disimpulkan bahwa membuat aturan dasar ataupun undang-undang juga menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Namun hal ini janganlah menjadi alasan bagi para legislator untuk tidak mampu membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan menyerap aspirasi atau bahkan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Mengawali perjalanan sebagai suatu negara yang merdeka pemerintah orde lama melakukan potensi dalam hal tindak pidana korupsi. Untuk itulah generasi pertama diawali dengan adanya peraturan penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1957, kemudian diubah lagi menjadi peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya Dibuat undang-undang No 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengambil alih rumusan delik peraturan penguasa perang tersebut, tetapi sistem preventifnya tidak diambil alih seperti pendaftaran harta benda dan gugatan perdata (Amos: 135). Dengan berkembangnya sistem pemerintahan parlementer dengan beberapa kabinet yang pernah ada digambarkan pada tanggal 20 Agustus 1955, sembilan hari setelah kabinet terbentuk, Perdana

Menteri Burhanuddin Harahap menyatakan bahwabanyak orang yang kaya mendadak harus buktikan dia tidak korupsi. Selain mempersiapkan pemilu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu program Kabinet Burhanuddin demi memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah. Namun pada upaya ini belum dapat terwujud karena rancangan undang-undang ini tidak disepakati atau tidak dibahas oleh parlemen masa itu. Upaya pemberantasan ini digulirkan kembali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, namun menurut Daniel S Lev dalam *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, tentangan keras justru datang dari kalangan jaksa dan polisi. Asosiasi Kejaksaan menganggap RUU tersebut akan mensubordinasi jaksa agung di bawah menteri kehakiman dan mengizinkan campur tangan politik terhadap proses peradilan. Begitu pula Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) menentangnya karena RUU itu memberikan kontrol penuntutan dari kerja-kerja represif dan preventif kepolisian kepada menteri kehakiman. Pada November 1956, P3RI yang meminta kabinet mempertimbangkan kembali persetujuan RUU itu, mengancam mogok jika pemerintah tak mau berkonsultasi dengan P3RI. (Amos: 135). Setelah jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Sukarno menetapkan keadaan darurat (SOB), yang memberikan kewenangan bagi militer untuk masuk dalam persoalan sipil.

KSAD Nasution pun punya dasar hukum untuk menjalankan program pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya ditujukan untuk internal angkatan darat dan berjalan tersendat-sendat. Pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer NoPrt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang. SOB berakhir setahun kemudian, berakhir pula peraturan penguasa militer. Sebagai gantinya, muncul Peperpu Angkatan Darat NoPrt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Menurut dua Peperpu itu, ada dua macam perbuatan korupsi. Pertama, perbuatan korupsi pidana, yang bisa dikenai hukuman badan dan/atau denda selain perampasan harta-benda

hasil korupsinya. Kedua, perbuatan korupsi lainnya di mana terdapat unsur “perbuatan melawan hukum”. Hukumannya: tak diancam dengan hukum pidana melainkan pengadilan tinggi bisa merampas harta benda hasil perbuatan korupsi. Pada 9 Juni 1960, pemerintah mencabut dua Peperpu tahun 1958 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Perpu ini mewajibkan setiap tersangka memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa. Pasal ini juga mengatur bahwa bank hanya memberi keterangan tentang keadaan keuangan tersangka yang diminta oleh jaksa sesuai peraturan tentang rahasia bank. Karena parlemen belum mensahkan hingga 31 Desember 1960, melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1961, presiden memutuskan bahwa sejak 1 Januari 1961 Perpu ini menjadi Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960. Setelah proses panjang serta penuh perdebatan dan kepentingan politik, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang pemberantasan korupsi. Ia menjadi penyejuk di tengah iklim korupsi yang merajalela dan menghancurkan. Sayangnya, DPR akan merevisi undang-undang itu. Walaupun undang-undang materiil dan formil sangat ketat namun banyak

menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana seperti kemungkinan kumulasi dua pidana pokok yaitu penjara dan denda serta sanksi yang lebih berat, namun korupsi tetap meningkat.

2. Pada masa orde baru

Generasi kedua sebagai sebutan lain dari orde baru juga tidak kalah memberikan gambaran tentang tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi pada masa ini disinyalir banyak dilakukan yaitu melalui kekuatan legitimasi kekuasaan presiden dengan pejabat negara untuk mengambil aset negara ataupun mengalihkannya menjadi aset pribadi. Namun kita tidak memungkiri pada masa permulaan orde baru kita perlu melihat usaha pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No 3 tahun 1971 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya. Dalam masa pemerintahan orde baru implementasi hak prerogatif presiden telah menimbulkan praktek-praktek ketata-negaraan yang semakin tidak ter-kontrol, terjadi pemusatan kekuasaan yang masih bersifat paternalistis, dan memanfaatkan tiga bidang yang amat strategis yaitu ABRI, birokrasi dan konglomerat untuk melanggengkan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu dari tindakan korupsi pada masa ini. Meskipun telah diambil tindakan seperti membentuk tim anti korupsi sampai pada mengubah undang-Undang korupsi bahkan dilakukan pengecualian asas dalam undang-

undang itu agar dengan mudah dibuktikan perbuatan korupsi seseorang di depan hukum. Namun masalah korupsi ini masalah korupsi belum dapat teratasi dengan baik. Bahkan disinyalir penyebab lengsernya pemimpin orde baru presiden Soeharto dikarenakan tindakan korupsi. Dalam masa pemerintahan orde baru ini diakhiri juga dengan adanya gejolak dari para mahasiswa yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan negara karena salah satu faktornya adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden. Dengan adanya Undang-Undang yang tidak dapat menegakkan hukum terkait dengan pemberantasan anti korupsi akhirnya memunculkan gerakan dari masyarakat yang secara langsung mendesak mundurnya pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

3. Pada masa Reformasi

Masa generasi ketiga perkembangan ketatanegaraan Indonesia ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Nafas perjuangan ini dengan melakukan perubahan undang-undang atau dengan kata lain merevisi undang-undang kita sejumlah 4 kali amandemen. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut proses regulasi kepemimpinan dilakukan dengan lebih demokratis karena semakin lama seseorang memimpin semakin menuju pada kekuasaan absolut. Dengan dekatnya kekuasaan absolutisme tentunya tindakan KKN akan semakin meningkat. Setelah

turunnya presiden Soeharto, BJ Habibie sebagai presiden pengganti mendapatkan perintah melalui TAP MPR yaitu berupa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu dasar perimbangannya dikeluarkan Tap MPR ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan dengan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dan para penguasa. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR tersebut pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangan adanya undang-undang ini adalah bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak hanya dilakukan para penyelenggara negara namun dilakukan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam undang-undang ini diatur dengan jelas tentang kewajiban penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, seperti melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta menjalankan

kewajiban penuh tanggung jawab.

Dalam masa era reformasi ini juga muncul Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembangkan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya belum teratasi dengan baik. undang-undang ini kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2011. Seiring dengan kekhawatiran tindak pidana korupsi dikembangkan juga adanya beberapa peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dengan beberapa aturan tentang undang-undang tersebut menunjukkan adanya keseriusan kita dalam mencegah ataupun mengatasi tindak pidana korupsi.

KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* atau *corruptus*, sedangkan dalam bahasa china *tanwu* artinya keserakahan bernoda. Dalam bahasa Indonesia korupsi berarti buruk, rusak, busuk, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah diuraikan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebanyak 13 buah pasal dan Undang-Undang

No 20 Tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi (Handoyo, 2009: 20). Ketiga puluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara : pasal 2 dan 3.
2. Suap dan menyuap : pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf d dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan : pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c
4. Perbuatan curang : pasal 7 ayat huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf h
5. Benturan-benturan dalam pengadaan : pasal 12 huruf i
6. Gratifikasi : pasal 12 B jo Pasal 12 C (KPK 2006:4-5)

Selain definisi tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan diatas, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni diatur dalam pasal 21, 22 jo 28, 22 jo 29, 22 jo 35, 22 jo 36 dan 24 jo 31.

Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Sebab melalui politik hukum, korupsi diharapkan bisa diberantas. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum

dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang dan penegakan hukum itu. Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut "*legislative-drafting*", sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative-drafting*, *legal executing*, dan *legal review* (Hamzah, 1991: 24). Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dipengaruhi oleh kondisi politik saat masing-masing undang-undang itu lahir. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan yang konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik "*judicial review*" sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. Ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh

tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum tersebut. Dalam realitasnya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi-nya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, hukum adalah perwujudan dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh isu-isu politik, dan kondisi perubahan politik itu sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Terkait dengan hubungan antara konfigurasi politik dengan pemberantasan korupsi, maka dapat dicari mengenai karakter pemerintahan yang terjadi pada periode tersebut. Banyaknya pejabat yang ditangkap dengan tuduhan praktek korupsi, sekalipun juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang terlibat dengan praktek yang menempatkan Indonesia dalam jajaran salah satu Negara terkorup di dunia ini. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan politik penguasa. Dukungan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan, yang kesemua itu bermuara pada ruang, keadaan, dan situasi yang mendukung program pemberantasan korupsi

untuk bekerja lebih efektif. Disisi lain adanya dukungan politik penguasa dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Oleh karenanya menempatkan posisi politik dalam program pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi sebagai musuh bersama karena dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan negara. Sistem politik yang dijalankan sangat mempengaruhi dilakukannya penanggulangan korupsi, sebab korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik, karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum.

Dari kajian politik hukum undang-undang tentang pemberantasan korupsi telah sekilas dibahas dalam uraian sejarah perkembangan perundangan-undangan yang pernah berlaku di negara kita (segi historis) namun ada beberapa pandangan yang perlu juga diuraikan yaitu :

1. Segi filosofis

Politik pemberantasan korupsi dimaksud adalah pertama, memelihara dan mempertahankan cita keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa di dalam negara RI sebagai negara hukum sebagai landasan filosofis; memelihara dan melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sebagai landasan penegakan hukum; mempertahankan fungsi hukum pidana khususnya

undang-undang pemberantasan Korupsi tahun 1999 dan 2001 sebagai landasan operasional, yang lebih mengutamakan keseimbangan fungsi pemelihara ketertiban dan keamanan di satu sisi, dan fungsi penjeratan/ penghukuman di sisi lain di atas landasan asas-asas hukum pidana: *lexspecialisderogatlegegeneralis*; asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas, dan *lastbut not least*, memerankan hukum pidana (undang-undang Pemberantasan korupsi) sebagai *ultimumremedium* terutama dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana lain yang bukan merupakan tindak pidana korupsi murni (*lexspecialis-systematic*). Tindak pidana yang murni merupakan tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 undang-undang pemberantasan Korupsi 1999 dan Pasal 12 B Pemberantasan Korupsi 2001. Sasaran undang-undang ini sejak awal kelahirannya termasuk di semua negara, ditujukan terhadap para pemangku jabatan publik; bukan terhadap setiap orang. Sesuai dengan namanya, "korupsi", sesungguhnya yang berarti perilaku koruptif, hanya dikenal dalam ranah pejabat publik (pemegang jabatan publik) bukan pada setiap orang sebagai adresat pemberantasan korupsi pada awal mulanya.

2. Pragmatik

Pendekatan pragmatik memberikan kajian tentang perundang-undangan tersebut apakah memberi manfaat atau tidak; dapat diterapkan

atau tidak. undang-undang pemberantasan Korupsi tentunya memberikan manfaat yang luar biasa untuk menangani bagaimana tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. undang-undang ini membantu menyelamatkan aset-aset negara dan memberikan payung hukum untuk menindak korupsi yang banyak terjadi di negara kita bahkan sampai pada perkembangan dari tindak pidana korupsi seperti tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan dari berbagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung dibelanjakan karena akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber dana yang diperolehnya. Untuk itu banyak pelaku tindak korupsi yang mengalihkan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financialsystem*) terutama ke dalam sistem perbankan sehingga dengan cara ini pemberantasan korupsi harus sensitif terhadap gejala ini untuk itulah dibentuk suatu lembaga PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana korupsi korupsi sehingga mengurangi keefektifan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sosiologis

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir

dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Namun sebatas ini tindak pidana korupsi ini tetap menjadi permasalahan yang belum berakhir. Permasalahan ini menyerang segala sektor kehidupan masyarakat terutama perekonomian negara. Untuk itulah landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah bahwa, kemiskinan yang melanda kurang lebih 35-50 juta penduduk Indonesia masa kini adalah disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi (30% dana APBN terkuras karena korupsi), dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan sektor swasta. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgentneeds*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkannya, dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di negara ini.

Upaya yang tegas ditempuh dengan membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam suatu produk hukum yang dilahirkan tentunya memerlukan suatu kajian dan masukan dari masyarakat agar dapat mengena ataupun tepat sasaran. Kami mencoba menguraikan beberapa Kelemahan dari Undang-undang yang terakhir dibentuk yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa hal yang

perlu menjadi masukan adalah:

1. Masalah kualifikasi delik.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dicantumkan kualifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran. Akibatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan *concurus*, daluarsa penuntutan pidana dan daluarsa pelaksanaan pidana (contoh: Daluarsa penuntutan pidana untuk kejahatan dan pelanggaran) Pasal 78 KUHP

- a. Kewenangan menurut pidana hapus karena daluarsa;
- b. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
- e. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

2. Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus.

Bagaimana bila ada faktor yang memperingan pidana? Apakah pidana minimalnya atau maksimalnya yang diperingan atau diperberat?

Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulasi.

Contoh: Pasal 2 Undang-Undang 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 (menyalah-gunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternatif, padahal secara teoritis bobot deliknya sama. Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20).

Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan.

4. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan untuk korporasi
5. Tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat
6. Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang dinilai berlebihan yang karena secara sistemik sudah ada Pasal 1 ayat (2) KUHP
7. Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan : yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak

pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan ini mempersulit pelaku tindak pidana untuk dijatuhi hukuman mati.

8. Recidive

Dalam Pasal 486 KUHP sebenarnya bisa menjaring pengulangan untuk TPK delik jabatan Undang-Undang 31/1999 yakni Pasal 8 (eks Pasal 415 KUHP), Pasal 10 (Pasal 417 KUHP), dan Pasal 12 sub f, g, h (Pasal 425 KUHP). Setelah keluarnya Undang-Undang 20/2001 ketiga Pasal KUHP itu termasuk pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 43 B, sehingga tidak bisa dijaring dengan ketentuan recidive dalam KUHP.

Meskipun undang-undang yang berlaku saat ini memang memerlukan perhatian di beberapa hal tersebut mudah-mudahan dikemudian hari menjadi dasar pertimbangan untuk terbentuknya undang-undang yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga tindak pidana korupsi ini memang dapat diberantas dan bukan hanya menjadi suatu keniscayaan.

SIMPULAN

Sejarah perkembangan undang-undang tindak pidana korupsi diawali dengan latar belakang lahirnya peraturan pengauasa

militer pada 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat AH Nasution selaku penguasa militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi untuk menerobos kemacetan dalam melancarkan usaha memberantas korupsi. Penguasa militer kemudian juga mengeluarkan Peraturan No PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang memberikan wewenang kepada penguasa militer untuk menyelidiki harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Untuk melengkapinya, dibuatlah peraturan PRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang. SOB berakhir setahun kemudian, berakhir pula peraturan penguasa militer. Sebagai gantinya, muncul Peperpu Angkatan Darat NoPrt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Penilikan Harta Benda serta Peperpu Kepala Staf Angkatan Laut NoPrt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958, kemudian Undang-Undang No 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dalam masa berikutnya yaitu masa orde baru muncul Undang-Undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di masa reformasi sebagai pengganti dari undang-undang masa orde baru muncul Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Kajian politik hukum undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari segi filosofis, pragmatik dan sosiologis. Untuk

memberikan analisa politik hukum ini penulis mencoba memberi masukan tentang undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2001 dengan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai aturan tentang masalah kualifikasi delik, tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi, tidak adanya ketentuan khusus yang merumuskan pengertian dari istilah pemufakatan jahat, Aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang dinilai berlebihan, formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) serta tentang Recidive.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana korupsi). Adapun tujuan dengan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR RUJUKAN

Amos Abraham, 2005. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari orla, orba sampai reformasi telaah sosiologis yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri HTN Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Handoyo, Eko, 2009. *Pendidikan anti korupsi*, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Rahardjo, Satjipto, 2010. *Sosiologi Hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif pemikiran Satjipto Rahardjo dalam perspektif teori masalah*. Semarang : PT Pustakan Rizki Putra.

Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 Universitas Negeri Semarang, bertempat di Gedung Auditorium UNNES, Kampus Sekaran, Gunung Pati-Semarang pada tanggal 26 Maret 2014. Oleh Basief Arief

Makalah yang disampaikan dalam seminar pemberantasan korupsi di UNNES dengan judul peran polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Oleh : Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. Tanggal 26 Maret 2014

Makalah dari Tinjauan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam perspektif HAM Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum. Tanggal 26 Maret 2014.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712016/bab2.pdf> diakses tanggal 1 September 2014 pukul 15.00 WIB.

KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL BAGI GURU SOSIOLOGI DI KOTA SEMARANG

Totok Rochana

Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS – Unnes

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

professional competence learning in sociology based on multicultural

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kompetensi guru dalam menganalisis Silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural; (2) kompetensi guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis multikultural; dan (3) kompetensi guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan deskripsi dan analisis temuan. Jenis Data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan, angket tertutup, pedoman wawancara, dan analisis dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis rerata dan teknik analisis kualitatif dengan teknik interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) para guru masih kesulitan menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural; (2) para guru mengalami kesulitan membuat RPP berbasis multikultural; dan (3) guru masih kesulitan melaksanakan pembelajaran berbasis multikultural. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kompetensi profesional dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural masih rendah, maka disarankan : (1) pelatihan menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural; (2) pelatihan membuat RPP berbasis multikultural, dalam hal perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran, pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar; dan (3) pelatihan pembelajaran Sosiologi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pembelajaran berbasis multikultural.

Abstract

The aim of this study : (1) to determine the teacher competence in analyzing Silabus that contain the point of multicultural; (2) to determine the teacher competence in order to make a Lesson Plan in multicultural basic; and (3) to determine the teacher competence in learning of sociology in multicultural basic. The result of this study showed: (1) The teacher is still analyzing the basic competence and learning the point of multicultural, (2) The teacher is still difficult to make a Lesson Plan in multicultural basic; and (3) The multicultural basic made it difficult for teacher to learning and doing by themself. From this study finding that professional competence learning in sociology based on multicultural is still relatively low, so we can derive the suggestions as follows: (1) analyze basic competence and learning education training which containing the point of multicultural; (2) training how to make the Lesson Plan in multicultural basic, especially in

how to find the purpose of the learning, how to choose and organize the point of the learning, how to choose the effective source for the learning, approximation methode for the learning and the final evaluation from the learning methode; and (3) training methode sociology in how to planing, doing, and evaluation in based on multicultural learning.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
toksant@yahoo.com

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Sosiologi merupakan salah satu kelompok mata pelajaran Ilmu-ilmu Sosial yang diberikatan di tingkat SMA. Berbeda dengan Ilmu-ilmu Sosial lainnya, materi mata pelajaran Sosiologi yang dikembangkan lebih banyak bertemakan kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, tujuan pembelajaran Sosiologi yaitu menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Berdasarkan tujuan pembelajarannya, diharapkan mata pelajaran Sosiologi dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi terjadinya diskriminasi yang muncul sebagai dampak masyarakat yang majemuk. Merupakan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas masyarakat majemuk. Menurut Suparlan (2005: 25) kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh keberagaman suku bangsa, ras, dan agama. Di satu sisi, adanya kemajemukan merupakan kebanggaan, karena merupakan kekayaan yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Di sisi

lain, kelemahan-kelemahan masyarakat majemuk yaitu memungkinkan terjadinya diskriminasi dari berbagai hal seperti *etnosentrisme*, *prejudis* dan *stereotif*, *ekonomi*, dan *politik*.

Sesuai tujuan pembelajaran Sosiologi, perlu dikembangkan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Pembelajaran multikultural adalah transfer pengetahuan tentang nilai dan pandangan hidup saling menghormati, dan toleran terhadap keberagaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang plural (Sunarto, 2004: 1). Sebagaimana dikatakan Banks (dalam Hanum, 2009: 4), tujuan pembelajaran multikultural yaitu untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik di sekolah.

Melalui pendidikan multikultural diharapkan dapat membuat kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial dan budaya akan berusaha mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap keragaman budaya, memperkecil etnosentrisme, memperkecil prasangka buruk

kepada etnik lain dan meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan sosial, ekonomi, etnik dan psikologi serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar etnik (Drajat dan Sudarmo, 2011: 2). Telah banyak dilakukan penelitian-penelitian dengan menfokuskan pada pembelajaran multikultural. Penelitian Snyder (2014) dengan judul *“A Woman's Place: Women of Colour Navigating Doctoral Education in South Africa”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengalaman dari wanita kulit berwarna di Afrika Selatan yang sedang belajar pada program doktoral. Kesimpulan hasil penelitian yaitu bagaimana kondisi institusi tempat mereka belajar dapat mendukung wanita berkulit warna untuk meraih gelar doktoral. Penelitian lainnya dilakukan Ming-Hsuan Wu (2014) dengan judul *“Innovative Education for Diverse Students in a Changing Era: One U.S. Urban School's Alternative Teaching and Learning”*. Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana sekolah di kota K-8 di Amerika Serikat, dengan jumlah siswa yang banyak dan bermacam macam komunitas dengan pendapatan yang rendah, yang menawarkan pendidikan yang menghargai status minoritas siswa, dan memberi pengertian kalau mereka sama seperti komunitas yang lain. Kesimpulan hasil penelitian yaitu adanya kemajuan pendidikan dari sekolah ini terhadap komunitas minoritas dengan hasil yang telah mereka raih dan capai.

Meskipun pembelajaran Sosiologi semestinya berbasis multikultural, namun dalam kenyataannya mata pelajaran Sosiologi masih diperlakukan seperti mata pelajaran lain, masih bersifat kognitif dan

hafalan. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Semarang, guru lebih banyak memberikan informasi sementara para peserta didik mendengarkan dan mencatat. Kegiatan pembelajaran didominasi metode ceramah dan kadang-kadang diselingi tanya jawab. Strategi pembelajaran semacam ini jelas tidak seiring dengan tujuan pembelajaran Sosiologi.

Kenyataan lain dalam pembelajaran Sosiologi, bahwa mata pelajaran Sosiologi di SMA masih banyak diampu oleh guru-guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Hasil penelitian Mustofa, dkk (2009) ditemukan bahwa mata pelajaran Sosiologi SMA Negeri di Kota Semarang diampu oleh guru-guru yang berlatar belakang pendidikan Geografi, Sejarah, Teknik, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kenyataan tersebut menjadi salah satu penyebab para guru Sosiologi kurang menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga sulit menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Kontribusi guru terhadap proses pendidikan telah diteliti Chetty, Friedman, dan Rockoff (2011). Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal, jika para peserta didik diajar oleh guru yang mampu menyampaikan bahan ajar dengan baik, para peserta didik setelah tamat sekolah memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa: (1) sukses masuk ke perguruan tinggi; (2) memasuki perguruan tinggi kelas papan atas; (3) mendapatkan gaji yang lebih tinggi setelah bekerja; (4) hidup di lingkungan sosial ekonomi yang lebih tinggi; dan (5) menabung lebih banyak untuk masa

pensiun.

Berdasarkan hasil penelitian Chetty, Friedman, dan Rockoff (2011) tersebut dapat dikatakan bahwa agar pembelajaran Sosiologi berhasil dengan baik diperlukan guru yang profesional. Guru yang profesional akan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Guru yang profesional juga diharapkan mampu membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengaktualisasikan diri. Berdasarkan hasil penelitian Tri Sulasmiyati (2009), menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru berpengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru Sosiologi. Upaya-upaya itu antara lain melalui penataran, seminar, pelatihan, workshop, studi banding ke sekolah lain, termasuk juga dibentuk forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Berbagai upaya tersebut harapannya agar menjadi guru yang profesional. Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan. Kompetensi profesional dalam konteks penelitian ini yaitu kompetensi guru dalam menganalisis Silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural; (b) kompetensi guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis multikultural; dan (c) kompetensi guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural.

Disadari betapa pentingnya kompetensi profesional guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural, maka perlu diadakan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah yaitu

“bagaimana kompetensi profesional dalam pembelajaran berbasis multikultural bagi guru Sosiologi di Kota Semarang? Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu: (a) bagaimana kompetensi guru dalam menganalisis Silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural; (b) bagaimana kompetensi guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis multikultural? dan (c) bagaimana kompetensi guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan deskripsi dan analisis temuan. Subyek penelitian yaitu guru Sosiologi SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Semarang. Dari sebanyak 78 guru Sosiologi di Kota Semarang, dipilih sebagai informan penelitian dan responden penelitian. Sebagai informan penelitian yaitu Kepala Sekolah dan guru Sosiologi di SMA Negeri 5, SMA Negeri 7, dan SMA YSKI Semarang. Informasi yang akan diperoleh yaitu pembelajaran Sosiologi yang biasa dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta saran dan harapan untuk perbaikan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Responden penelitian digunakan untuk mengisi angket pembelajaran Sosiologi berbasis multi-kultural yang pernah dilakukan guru. Untuk mengisi angket ditentukan responden sebanyak 50% dari sebanyak 78 guru Sosiologi SMA yang ada di Kota Semarang. Teknik sampling yang dipakai menggunakan *proportional random*

sampling. Dengan teknik ini, masing-masing sekolah dikelompokkan atas dasar kualitas sekolah (baik, sedang, kurang), kemudian masing-masing kelompok diambil sebanyak 50% secara random.

Metode pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan, angket tertutup, pedoman wawancara, dan analisis dokumentasi. Pedoman pengamatan menggunakan “IPKG Melaksanakan Pembelajaran”. Pedoman pengamatan digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Angket tertutup disusun dengan menggunakan Skala Likert. Angket tertutup digunakan untuk mengumpulkan data tentang pembelajaran sosiologi berbasis multikultural yang pernah dilakukan. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran Sosiologi yang biasa dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta saran dan harapan untuk perbaikan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Analisa dokumentasi digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru.

Analisis data menggunakan teknik analisis rerata dan teknik analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui angket tertutup dan hasil penilaian RPP akan dianalisis menggunakan teknik analisis rerata. Rumus yang digunakan yaitu :

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

dimana :

\bar{X} : nilai rata-rata

$\sum X$: jumlah skor jawaban responden

N : jumlah responden

Data yang diperoleh melalui angket terbuka dan pedoman wawancara akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan teknik interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 247), ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis kualitatif dengan teknik interaktif, yaitu: (1) melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) reduksi data, (3) penyusunan ke dalam satuan-satuan, (4) kategorisasi, (5) pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisis dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, jumlah guru Sosiologi yang mengajar di SMA Negeri sebanyak 33 guru dan SMA Swasta sebanyak 45 guru. Berdasarkan data yang ditemukan menunjukkan bahwa guru-guru pengampu mata pelajaran Sosiologi tidak semua berlatar belakang keilmuan Sosiologi. Jumlah guru pengampu mata pelajaran Sosiologi yang benar-benar berlatar belakang keilmuannya Sosiologi hanya 9,9% dari keseluruhan jumlah 78 guru pengampu mata pelajaran Sosiologi. Selebihnya berasal dari jurusan Geografi, Sejarah, PKn, PKK, dan Hukum.

Kualifikasi Pendidikan Guru Mata Pelajaran Sosiologi di SMA Kota Semarang tersaji pada tabel berikut di bawah ini. Kualifikasi pendidikan dan disiplin keilmuan guru pengampu mata pelajaran Sosiologi dan Antropologi menentukan bagaimana pembelajaran Sosiologi dan Antropologi berlangsung dengan baik.

Kompetensi profesional guru dalam pembelajaran sosiologi berbasis multikultural yang diteliti yaitu: (1) kompetensi guru dalam menganalisis silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural; (2) kompetensi guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis multikultural; dan (3) kompetensi guru dalam pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural.

Kompetensi Guru dalam Analisis Silabus

Kemampuan guru untuk menganalisis Silabus, khususnya Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural, merupakan prasyarat bagi pelaksanaan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural secara baik. Oleh karena itu langkah pertama untuk mengetahui kondisi awal kompetensi profesional perlu diketahui kemampuan guru menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pokok yang mengandung nilai-nilai multikultural. Untuk keperluan itu telah diwawancari tiga guru, yaitu Bapak Parsudi, S.Pd dari SMA Negeri 7 Semarang, Bapak S. Puspo Handono, S.Pd dari SMA Negeri 6 Semarang, dan Bapak Yosari Bagus P, S.Pd dari SMA YSKI Semarang. Cara yang dilakukan yaitu melakukan wawancara dan diskusi untuk mengkaji Silabus mata pelajaran Sosiologi kelas X, kelas XI, dan

kelas XII.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para guru masih kesulitan menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural.

Nilai-nilai multikultural hanya ada pada 'materi pokok multikultural' yang diberikan pada Kelas XI, sedangkan materi pokok lainnya tidak mengandung nilai-nilai multikultural. Sebagaimana diketahui materi-materi pokok dari Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII tidak secara eksplisit menampakan nilai-nilai multikultural, namun sesungguhnya secara implisit mengandung nilai-nilai multikultural. Adapun ketidakmampuan guru menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pokok yang mengandung nilai-nilai multikultural disebabkan ketidaktahuannya tentang konsep nilai-nilai multikultural itu sendiri.

Analisis Kompetensi Dasar yang mengandung nilai-nilai Multikultural yang dipandang penting dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan model pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural, yang meliputi : (a) tuntutan kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa pengetahuan (*knowledge*), sikap (*affective*), dan keterampilan (*skills*); (b) tuntutan belajar dan pembelajaran, terutama terfokus membuat orang untuk belajar dan menjadikan kegiatan belajar adalah proses kehidupan; (c) guru menggunakan metode mengajar yang efektif, dengan memperhatikan referensi latar budaya siswanya; (d) karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa multikultural (Sumardi, 2009).

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, analisis

terhadap silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural secara tersurat berbunyi “menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”; dan “menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Nilai-nilai multikultural yaitu saling menghormati, nilai kesetaraan, toleransi, kerjasama, dan kerukunan harus dikuasai peserta didik dan diharapkan menjadi bekal bagi hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Kompetensi Guru dalam membuat RPP

Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang berupa persiapan mengajar, berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Prosedur pembuatan RPP harus memuat: pemilihan materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran Sosiologi yang dilakukan oleh guru, telah dilakukan kajian terhadap RPP yang telah dibuat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh RPP yang telah dibuat, baik dalam penggunaan format, prosedur, dan substansinya untuk keperluan pembelajaran multikultural.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikaji yaitu RPP yang Standar Kompetensi (KD) dan materi pokoknya

mengandung nilai-nilai multikultural. Untuk keperluan ini telah dipilih RPP yang dibuat oleh guru SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 7 Semarang. Format penilaian menggunakan Instrumen Penilaian Kompetensi Profesional (IPKG) untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). IPKG yang digunakan sudah dimodifikasi untuk keperluan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Aspek-aspek yang dinilai yaitu perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran, pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Teknik penilaiannya yaitu dengan caramemberi skor masing-masing aspek tersebut, dan selanjutnya dinilai pencapaian total skor secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap RPP 1 diperoleh skor 6, dan jika diubah menjadi nilai desimal menjadi 30, atau termasuk kategori tidak baik. Demikian pula penilai terhadap RPP 2 diperoleh skor 6, dan jika diubah menjadi nilai desimal menjadi 30, atau termasuk kategori tidak baik.

Ada dua alasan guru mengalami kesulitan membuat RPP berbasis multikultural. Pertama, selama ini pembelajaran Sosiologi berjalan sebagaimana pembelajaran lainnya, masih bersifat penanaman pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan berorientasi pada guru (*teacher oriented*). Oleh karena itu pembuatan RPP juga sama seperti mata pelajaran lainnya. Adapun langkah-langkah atau prosedur pembuatan RPP berbasis multikultural sama sekali belum diketahui. Prosedur atau langkah-langkah penyusunan rancangan pembelajaran Sosiologi yang bernuansa

Tabel 1. Hasil Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Aspek	Skor	
	RPP 1	RPP 2
Perumusan tujuan pembelajaran	2	2
Pemilihan dan pengorganisasian materi Pembelajaran	1	1
Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran	1	1
Pendekatan pembelajaran	1	1
Penilaian hasil pembelajaran	1	1
Jumlah Skor	6	6

Sumber : Hasil penelitian, 2014

multikultural, dapat dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu : (1) Tahap studi eksplorasi diri dan lingkungan sosial-budaya (lokal) siswa yang potensial dengan substansi multikultural; (2) tahap presentasi hasil eksplorasi siswa; (3) tahap *peer group* analisis, teman lain atau siswa yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok, dimohon untuk mengalisis dan memberi komentar terhadap presentasi hasil eksplorasi; (4) tahap *expert opinion*, guru memberikan komentar mengenai hasil eksplorasi yang dipresentasikan; dan (e) tahap refleksi, rekomendasi dan membangun komitmen antara guru bersama siswa terhadap keunggulan nilai-nilai budaya lokal (Sumardi, 2009).

Kedua, selama ini para guru belum pernah mendapatkan pelatihan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural, sehingga merasa asing dan tidak kenal dengan pembelajaran berbasis multikultural.

Bahkan untuk pembelajaran Sosiologi masih banyak guru yang kesulitan membuat perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sekolah, selama ini guru tidak terbiasa membuat RPP sendiri, lebih sering pinjam teman guru dari mata pelajaran sejenis, dan mengambil internet tanpa disesuaikan kebutuhan. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara Ketua MGMP Sosiologi Kota Semarang, para guru jarang datang di forum MGMP, kalau datang tidak aktif membuat RPP, dan meminjam RPP dari teman yang datang di forum MGMP.

Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Sosiologi Berbasis Multikultural

Meskipun tidak mengetahui konsep nilai-nilai multikultural, namun dalam pembelajaran Sosiologi selalu ditanamkan nilai-nilai multikultural. Ini disebabkan obyek kajian Sosiologi adalah masyarakat, baik dalam proses maupun dinamika

sosialnya, sehingga perlu ditanamkan akan kesadaran, sikap, dan kepedulian sosial kepada peserta didik. Nilai-nilai sosial yang ditanamkan melalui pembelajaran Sosiologi inilah pada hakekatnya merupakan bagian dari nilai-nilai multikultural. Oleh karena itu para guru diberi angket tentang pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural yang pernah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh para guru telah melakukan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural. Aspek-aspek yang ditanyakan yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Perencanaan Pembelajaran

Aspek-aspek yang ditanyakan pada bagian perencanaan pembelajaran yaitu: (1) melakukan analisis silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural (toleransi terhadap perbedaan, kesederajatan, HAM, kerjasama, dan musyawarah); (2) melakukan analisis kompetensi dasar (KD) mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa pengetahuan (*knowledge*), sikap (*affective*), dan keterampilan (*skills*); (3) melakukan analisis materi yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural; dan (4) melakukan analisis latar kultural (konsep wilayah dan konsep manusia beserta aktivitasnya). Setelah diadakan analisis data diperoleh skor 2,4, atau termasuk kategori kurang baik.

Pelaksanaan Pembelajaran

Aspek-aspek yang ditanyakan pada bagian pelaksanaan pembelajaran yaitu: (1) melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah: studi eksplorasi diri dan lingkungan sosial-budaya, tahap presentasi

hasil eksplorasi, tahap *peer group analysis*, tahap expert opinion, dan tahap refleksi, rekomendasi dan membangun komitmen; dan (2) penentuan (penyusunan) rencana tindakan selanjutnya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Setelah diadakan analisis data diperoleh skor 2,1, atau termasuk kategori kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. Kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru (*teacher oriented*). Metode pembelajaran didominasi ceramah dan diselingi tanya jawab, sedangkan muridnya mendengarkan dan mencatat. Alasan guru menggunakan metode ceramah karena: (1) metode ini sangat praktis, mudah dilaksanakan, dan para siswa sudah biasa mendengarkan penjelasan guru; (2) metode ceramah sangat efektif untuk mencapai target menyelesaikan materi pembelajaran.

Pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural menuntut guru yang bersangkutan selalu terlibat dalam setiap fase kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi dan refleksi hasil temuan awal, penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan dalam pelaksanaan pembelajaran, diskusi dan refleksi hasil pelaksanaan, dan penentuan (penyusunan) rencana pembelajaran selanjutnya dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Evaluasi Pembelajaran

Aspek-aspek yang ditanyakan pada bagian pelaksanaan pembelajaran yaitu: (1) membuat format penilaian laporan kerja (makalah); (2) membuat format penilaian unjuk kerja dan partisipasi; melakukan tes

akhir untuk mengetahui perkembangan prestasi peserta didik. Setelah diadakan analisis data diperoleh skor 2,2, atau termasuk kategori kurang baik. Berdasarkan wawancara dengan guru dapat diketahui bahwa selama ini evaluasi pembelajaran masih menggunakan tes tulis. Hal ini dilakukan karena pembelajarannya masih bersifat penanaman pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan bukan penanaman sikap. Oleh karena itu cara paling mudah untuk mengukurnya menggunakan tes tulis, sementara itu penilaian ranah sikap dan keterampilan pelaksanaannya terlalu rumit dan membutuhkan waktu lama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Para guru masih kesulitan menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pembelajaran yang mengandung nilai-nilai multikultural. Adapun ketidakmampuan guru menganalisis Kompetensi Dasar dan Materi Pokok yang mengandung nilai-nilai multi-kultural disebabkan ketidak-tahuannya tentang konsep nilai-nilai multikultural itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dalam menganalisis silabus yang mengandung nilai-nilai multikultural termasuk kategori rendah.
2. Para guru mengalami kesulitan membuat RPP berbasis multikultural. Pertama, selama ini pembelajaran Sosiologi berjalan sebagaimana pembelajaran lainnya, masih bersifat penanaman pengetahuan (*transfer of*

knowledge) dan berorientasi pada guru (*teacher oriented*). Kedua, selama ini para guru belum pernah mendapatkan pelatihan pembelajaran Sosiologi berbasis multikultural, sehingga merasa asing dan tidak kenal dengan pembelajaran berbasis multikultural.

3. Guru masih kesulitan melaksanakan pembelajaran berbasis multikultural. Dalam hal merencanakan pembelajaran, guru kesulitan melakukan analisis silabus, analisis kompetensi dasar (KD), analisis materi yang relevan dengan pembelajaran berbasis multicultural; dan analisis latar kultural (konsep wilayah dan konsep manusia beserta aktivitasnya). Dalam hal pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah: studi eksplorasi diri dan lingkungan sosial-budaya, tahap presentasi hasil eksplorasi, tahap peer group analysis, tahap expert opinion, dan tahap refleksi, rekomendasi dan membangun komitmen; dan (2) penentuan (penyusunan) rencana tindakan selanjutnya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, guru kesulitan membuat format penilaian laporan kerja (makalah); (2) membuat format penilaian unjuk kerja dan partisipasi; melakukan tes akhir untuk mengetahui perkembangan prestasi peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dradjat, H Untoro dan Sudarmo M (Eds). 2011. "Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa", dalam Multi-kulturalisme dan Integrasi Bangsa: Memperkuat Karakter Masyarakat Multikultural. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Hlm: 1-13.
- Hanum, F. 2011. Konsep, Materi dan Pembelajaran Sosiologi. Makalah disampaikan pada Seminar Regional: Pembelajaran dan Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Sosiologi, yang diselenggarakan Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Surakarta, 27 September 2011.
- Hanum, F. 2009. Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Pembentuk Karakter Bangsa (Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan). Makalah disampaikan pada Seminar Regional DIY-Jateng dan sekitarnya yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2009 di Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Milles, M.B. dan Huberman, A.M. 1998. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Mustofa, Moch S. 2008. Penyerapan Lapangan Kerja Lulusan Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES Angkatan 2001 – 2003. Jurnal Forum Ilmu Sosial. Vol. 35(2): 124-130.
- Parekh, B. 2008. *Rethinking Multiculturalism* (Keberagaman Budaya dan Teori Politik). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Raj Chetty, John N. Friedman, and Jonah E. Rockoff. Measuring the Impacts of Teachers I: Evaluating Bias in Teacher Value-Added Estimates. Tersedia di <http://obs.rc.fas.harvard.edu/chetty/w19423.pdf>, diunduh 25 April 2015.
- Snyder. 2014 "A Woman's Place: Women of Colour Navigating Doctoral Education in South Africa". Dalam International Journal of Multicultural Education. Vol. 16, No. 2. Hlm. 15-35. Tersedia di <http://ijme-journal.org/index.php/ijme/article/view/904/pdf>, diunduh 10 Februari 2015.
- Sumardi, K. 2009. Pembelajaran Berbasis Multikultural. Tersedia di <http://kabepiilampung.com.wordpress.com/2009/10/18/pengembangan-pembelajaran-berbasis-multikultural/>, diunduh 17 Januari 2013.
- Sunarto, K, dkk. 2004. "Introduction", dalam *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar*. Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia. Hlm. 1-7.
- Suparlan, P. 2005. Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa. Jakarta: YPKIK.

DIVERSIFIKASI PRODUKSI: STUDI EKONOMI POLITIK PEDESAAN DI JAWA

Aji Prasetya Wahyu Utama

Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

*Diversification of production,
social differentiation, the mode
of production*

Abstrak

Tulisan ini berisi tentang diversifikasi produksi dan pengaruhnya terhadap diferensiasi dalam masyarakat pedesaan. Setiap masyarakat memiliki strategi bertahan hidup yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk dalam masyarakat desa-hutan. Selain mengambil hasil hutan secara langsung, mereka juga mengusahakan pertanian padi, ekonomi gula aren, perkebunan kopi, dan peternakan. Menariknya, setiap sumber ekonomi ini memiliki peran berbeda dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Ini juga berpengaruh terhadap terbentuknya kelas ekonomi dalam masyarakat pedesaan. Peneliti mempergunakan analisis mode produksi untuk mempermudah dalam memahami status kepemilikan individu yang faktanya mengatakan bahwa total kepemilikan aset produksi menentukan tingkatan kelas ekonomi pedesaan.

Abstract

This paper contains the diversification of production that influences the social differentiation processes in rural community. Every society have different life strategies that is different from another, including village forestry society. Besides directly use the forest product, they also work in agriculture, palm sugar economic, coffee plantation, and animal husbandry. Interestingly, each of these economic resources have different role in the household economic. It's also affects to make economic class formation in rural society. I use the mode of production analysis to make it ease to understand the individual ownership that determine the level of rural economic class.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
ajiprasetya.wu@gmail.com

PENDAHULUAN

Untuk melangsungkan hidupnya, masyarakat desa hutan mengembangkan sistem diversifikasi produksi atau penganekaragaman produksi rumah tangga. Proses adaptasi ini dilakukan karena keanekaragaman potensi sumber daya hutan. Hutan menyediakan aneka tumbuhan, sayur dan buah-buahan yang laku di pasaran, misalnya produk aren (*arenga pinnata*), pocung atau kepayang (*pangium edule reinw*), jengkol (*pithecelobium jiringa*), durian (*durio zibethinus*), dan getah pinus (*pinus merkusii*). Selain bertumpu pada sumber produksi hutan, masyarakat juga mengembangkan sistem perkebunan kopi rakyat yang berada di wilayah hutan lindung dan hutan produksi getah pinus milik Perhutani. Mereka juga mengembangkan sistem peternakan sapi yang dikelola oleh setiap rumah tangga. Produk-produk ini menjadi komoditas penting dalam masyarakat untuk bertahan hidup sekaligus berinteraksi dengan pasar.

Sektor ekonomi komersil menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal sebagai basis pendapatan rumah tangga. Sektor ini berperan primer terhadap kesejahteraan, karena melalui produk-produk ini mereka mampu bertransaksi mendatangkan barang-barang kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan secara mandiri. Lebih dari itu, sektor ini juga memacu adanya perluasan kapital dan akumulasi kapital dalam masyarakat desa hutan. Pertanyaan penelitian; seberapa besar pengaruh diversifikasi produksi terhadap pembentukan kapital dalam masyarakat?

Dilihat dari mode produksinya, pola akumulasi kapital yang ada pada masyarakat

desa-hutan berbeda pada masyarakat di daerah dataran rendah yang umumnya mereka yang memiliki tanah yang banyak maka mereka yang dianggap sebagai kelas atas (Husken. 1998). Pada masyarakat desa hutan, mereka dihadapkan pada keterbatasan tanah pribadi yang mengharuskan mereka mencari nafkah di hutan. Tanah pribadi mayoritas dipergunakan untuk pertanian sawah dan kebun buah yang luasannya terus menurun akibat pewarisan lahan kepada turunanannya sehingga mereka harus mencari nafkah di hutan. Peneliti pikir ini yang membedakan antara pola akumulasi kapital dataran rendah dan dataran tinggi terutama daerah desa-hutan.

Tulisan ini menggunakan pandangan politik ekonomi untuk melihat strategi individu dalam menentukan posisinya dalam masyarakat. Asumsi peneliti adalah bahwa perbedaan mode produksi akan berdampak pada perbedaan status ekonomi dalam masyarakat. Artinya bahwa orang yang memiliki mode produksi yang lebih banyak dan beragam memiliki kesempatan akses yang lebih besar daripada mereka yang memiliki keterbatasan mode produksi. Mode produksi ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu *factor of production* atau alat produksi dan *relation of production* atau hubungan kepemilikan dengan alat produksi (Friedman,1974). Dalam analisis ekonomi politik yang dikembangkan oleh marx, analisis dengan menggunakan pemisahan mode produksi ini merupakan awal dari ditemukan konsep-konsep yang lain seperti; akumulasi kapital dan surplus value (Marx,2004) dalam masyarakat industrialis. Ini pula yang penulis coba lihat dalam masyarakat petani di Jawa. Menarik untuk

melihat bagaimana masyarakat yang bukan industri, memperluas asetnya dan melakukan akumulasi kapital yang membuat masyarakat terdiferensiasi sedemikian rupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi partisipasi, wawancara dan metode survei kuesioner rutin setiap minggu selama 6 bulan. Penggabungan metode ini diharapkan mampu mendapatkan data penelitian secara lebih optimal, baik dalam hal kedalaman data maupun variasi data yang didukung oleh jumlah responden. Untuk penelitian ini dilakukan dengan tinggal bersama penduduk Desa Tlogo Pakis, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan pada Januari-Juni 2010.

HASIL PEMBAHASAN

Petung merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan wilayah Pekalongan yang terkenal sebagai daerah dataran rendah atau pesisir pantai utara (pantura), Petung merupakan daerah pegunungan yang menyambung dengan kawasan pegunungan Dieng. Berdasarkan data statistik dalam Katalog BPS Petungkriyono 2007, Kecamatan Petungkriyono terletak di ketinggian rata-rata 1300 mdpl dengan luas wilayah 7.358,523 ha dan jumlah total 9 desa dengan suhu udara berkisar 18-30°C. Maka tidak salah jika kawasan ini termasuk kawasan penghasil sayuran, teh, dan produk pertanian dataran tinggi lainnya bagi daerah dataran

rendah di Pekalongan. Selain itu, Petung juga terkenal dengan penghasil kopi dan gula aren, salah satunya di Dusun Nyawang.

Dusun yang penduduknya terdiri dari 197 jiwa (data kependudukan Desa Tlogopakis. 2010) terbagi dalam 40an Kepala Keluarga. Mereka tinggal dalam pemukiman terpusat pada sebuah bukit dengan ketinggian 712 meter di atas permukaan laut. Yang menarik disini adalah selain berada di kawasan perbukitan, dusun ini juga dikelilingi oleh hutan produksi maupun hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani. Di hutan ini kita masih bisa menemui berbagai spesies hewan seperti Lutung hitam (*Trachypitecus auratus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), burung Elang Hitam (*Ichthiaetus malayensis*), Julang mas (*Aceros undulatus*), babi hutan (*Sus scrofa*) sedangkan dari jenis tumbuhan ditemukan berbagai jenis anggrek, tumbuhan paku-pakuan, dan Kantung semar (*Nepentes adriani*).

Satu sisi, hutan menyediakan berbagai sumber daya melimpah yang bisa dijadikan sebagai komoditas yang bernilai ekonomis, seperti getah pinus, rotan, paku pakis yang dipergunakan untuk bahan sayuran, dan kayu alam untuk memasak. Ini memperlihatkan ketergantungan masyarakat terhadap hutan disamping adanya persoalan keterbatasan lahan pribadi sehingga masyarakat lebih banyak memanfaatkan lahan hutan untuk menunjang hidupnya, seperti kebun kopi hutan yang ditanam di sela pohon dan penanaman rumput gajah untuk makanan ternak. Pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak hanya terkonsentrasi ada ekstraksi hasil hutan tetapi juga pengembangan agrikultur yang dikelola secara mandiri.

Diversifikasi Produksi

Diversifikasi atau keragaman merupakan cara adaptasi ekologi (Steward, 1977) yang dilakukan masyarakat desa nyawang yang tinggal di daerah sekitar hutan. Keterbatasan lahan kepemilikan pribadi membuat masyarakat untuk memanfaatkan hutan demi memenuhi perekonomian rumah tangga. Ini menjadi cara yang rasional untuk tetap bisa bertahan hidup di pedalaman, yang jauh dari pasar dan infrastruktur jalan yang terbatas, berupa tanah merah dan tatanan batu kali. Akses ke pasar ini pun seringkali terputus karena daerah tergolong rawan longsor terutama saat musim hujan. Untuk bertahan dalam kondisi yang demikian, mereka masih mempertahankan sistem dualisme ekonomi (Dove, 2011), ekonomi subsistensi dan ekonomi komersial. Ini memungkinkan mereka tetap bertahan meskipun memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

1. Pertanian Padi

Sektor pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat Nyawang adalah pertanian padi dan jagung. Bagi masyarakat local

komoditas ini dipergunakan untuk kebutuhan subsisten atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Beras dan jagung menjadi makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Tanaman pangan ini diusahakan oleh sawah-sawah petani yang ada di sekitar desa. Total luas sawah di Nyawang 52.611 m² yang setiap tahun ditanami pada dan jagung secara bergantian yang terletak di sebelah barat, Blok Balong dan Sahduren dan sebelah utara, yaitu Blok Sahlor. Saat musim kemarau, mereka menanam jagung dan ketika musim penghujan tiba mereka menanam padi (Di Blok Balong ditanami padi sepanjang tahun karena selalu mendapat suplai air dari mata air yang mengalir di sungai sekitar desa. Sementara itu, Blok Sah Duren dan Blok Sah Lor ditanami padi saat musim penghujan karena tidak adanya sumber air untuk irigasi. Saat musim kemarau, biasanya petani memilih untuk menanam jagung). Pola penanaman ini sedikit terganggu karena pada tahun 2010 ini terjadi hujan sepanjang tahun. Sepanjang tahun ini petani memprioritaskan pada penanaman padi daripada jagung karena sumber air yang mencukupi yang berasal dari air sungai maupun air hujan.



Gambar 1. Sawah di Desa Nyawang

Pertanian yang dikembangkan masih mengandalkan sistem tradisional dengan penggunaan benih padi yang memiliki jangka waktu panen lama, seperti padi rojolele yang membutuhkan waktu 6 bulan untuk panen. Memang waktu panen yang dibutuhkan relative lama jika dibandingkan dengan jenis padi unggul yang mampu panen 3 kali dalam setahun. Namun, jenis padi yang dikembangkan masyarakat Nyawang ini bisa dibidang menggunakan sistem organic yang bisa tumbuh subur dengan menggunakan pupuk alami dari kotoran ternak. Kebiasaan ini tentu saja turut menekan ongkos produksi pertanian masyarakat.

Pada kondisi terakhir, pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan lahan dan intensifikasi pertanian mulai menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Perluasan lahan tidak mungkin dilakukan karena lahan pertanian sudah langsung berbatasan dengan hutan milik perhutani sedangkan intensifikasi berjalan lambat karena akses dan infrastruktur yang

terbatas terhadap sarana dan prasarana pertanian. Sawah mulai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah tangga akibatnya masyarakat harus mengusahakan sektor komersial untuk menutup pembelian bahan makanan pokok ini.

2. Gula Aren

Salah satu sumber ekonomi masyarakat desa Nyawang adalah komoditas gula aren. Gula aren merupakan produk olahan nira aren yang berasal dari tumbuhan aren (*Arenga pinnata*). Tumbuhan ini mampu tumbuh dengan baik di ketinggian 500-800 mdpl dengan iklim sedang dan agak basah. Produksi gula aren pada dasarnya melalui tiga tahap produksi. Pertama tahap penyiapan sarana dan prasarana untuk memudahkan mengambil nira. Kedua, proses pengambilan nira aren yang dilakukan dua kali dalam sehari. Ketiga, pengolahan nira menjadi gula aren atau proses penguapan dengan dimasak menggunakan kayu bakar.



Gambar 2. Berangkat mengambil nira dan gula aren cetak

Selain dikonsumsi sendiri atau sebagai pengganti gula pasir, gula aren yang sudah dicetak ini sudah bisa dijual baik melalui pedagang keliling maupun langsung dijual ke pasar. Nilai jual gula aren di pasaran sekitar Rp. 7.000,- untuk setiap kilogram. Harga ini cenderung fluktuatif dan mencapai harga tertinggi ketika musim puasa atau bulan ramadhan. Pada bulan ini terjadi lonjakan harga gula aren hingga dua kali lipat. Hasil penjualan gula aren ini lebih banyak dipakai untuk membeli berbagai barang kebutuhan harian seperti lauk-pauk, bahan makanan pokok. Tidak jarang produk gula aren ini juga menjadi alat barter dengan barang kebutuhan sehari-hari ini.

Pohon aren memiliki mitos yang sangat kuat, dimana bagi siapa saja yang menanam pohon aren maka nasib buruk akan menimpa saat memetik hasilnya, misalnya terjatuh dari pohon. Mitos ini yang dipercaya membatasi peningkatan produksi gula aren karena sampai sekarang produksi gula aren masih mengandalkan aren alam dan bukan tanaman penduduk. Akibatnya, proses klaim pohon aren berjalan cukup alot dan dalam beberapa kasus cenderung menimbulkan konflik perebutan pohon aren.

3. Perkebunan Kopi

Masyarakat juga mengembangkan sistem perkebunan kopi yang dikelola dalam skala rumah tangga. Kopi yang ditanam merupakan jenis kopi robusta yang mampu tumbuh dengan baik pada ketinggian 400-800 mdpl. Ekspansi kebun kopi dilakukan di hutan-hutan di sekitar kawasan pemukiman yang sudah dinamai menurut blok masing-masing. Kopi ditanam di sela-sela tumbuhan hutan baik di hutan produksi atau hutan pinus maupun hutan lindung. Sejak tahun 1990an pihak institusi kehutanan terkait sudah memberikan izin kepada penduduk sekitar untuk memanfaatkan kawasan hutan sepanjang tidak merusak hutan. Bibit kopi diperoleh secara mandiri yang dikenal “cabutan alam” atau menanam kembali bibit kopi yang tumbuh liar di kebun-kebun. Diperlukan waktu sekitar 3 tahun sampai kopi bisa dipanen. Pada selang waktu itu, tidak ada perawatan khusus yang dilakukan, setelah ditanam bibit kopi ini dibiarkan begitu saja dan ditengok kembali saat akan dipanen.



Gambar 3. Bibit kopi yang mau ditanam dan kopi yang dikeringkan

Bagi masyarakat Nyawang, kopi adalah primadona karena tanaman ini tidak membutuhkan perawatan khusus tapi mampu memberikan hasil yang cukup besar setiap tahunnya. Setiap rumah tangga petani memiliki lahan kopi yang tersebar di hutan. Akan tetapi, lahan perkebunan kopi rakyat semakin meningkat setiap tahunnya. Setiap orang berlomba-lomba untuk memperluas kebun kopi dengan membuka lahan baru hingga jauh ke dalam hutan. Bagi masyarakat Nyawang, ekspansi kebun kopi merupakan peluang yang masih terbuka untuk investasi masa depan meski lokasi-lokasi terbaru berada di wilayah-wilayah yang tidak strategis, yang jauh dari pemukiman, lereng yang curam, dan hingga ke dalam hutan.

Pada tiga tahun terakhir harga kopi mengalami penurunan yang signifikan, yaitu pada tahun 2008 masih pada kisaran Rp 15.000/kg, pada tahun 2009 turun menjadi Rp 13.000/kg, dan sekarang turun lagi hingga Rp 8.000 - Rp 10.000/kg. Pada beberapa tahun sebelumnya diperkirakan harga kopi cenderung tetap di level harga Rp 15.000/kg. Penurunan harga kopi membuat warga gelisah karena penurunan harga kopi tidak diikuti dengan penurunan upah tenaga kerja. Artinya mereka harus membayar tenaga kerja dengan harga yang sama meski harga kopi turun. Tenaga kerja yang diperlukan baik untuk menyangi kebun kopi dan memanen kopi setiap setahun sekali.

4. Peternakan Sapi

Di sela-sela rutinitas pertanian dan perkebunannya, Masyarakat Nyawang menyempatkan diri untuk beternak sapi. Peternakan sapi dilakukan secara intensif dengan pola penggemukan atau lebih

tepatnya pembesaran sapi di kandang. Peneliti memilih membesarkan karena pada intinya perlakuan terhadap ternak dilakukan dengan seadanya dan hanya menunggu ternak dewasa sehingga harga jual naik, misalny tidak ada asupan makanan maupun vitamin khusus kecuali pemberian rumput gajah untuk makanan sehari-hari. Tetapi, masyarakat desa Nyawan sudah memiliki sistem manajemen kandang yang baik dengan mengatur penempatan kandang sapi di luar pemukiman penduduk. Kandang yang berada di pinggir sekitar desa untuk menghindari bau menyengat yang ditimbulkan oleh kotoran sapi.

Petani Nyawang sangat jarang mengembangbiakkan ternaknya secara mandiri. Mereka lebih sering membeli sapi kecil dari juragan sapi untuk dijadikan bakal sapi piaraan. Melalui juragan sapi ini pula, mereka menjual ternak yang sudah dewasa atau ditukarkan kembali dengan sapi kecil. Proses ini berputar layaknya siklus yang menghidupkan jaringan perdagangan ternak, terutama sapi di wilayah Petung. Sapi yang dibeli merupakan jenis sapi lokal yang lebih mudah dalam pemeliharaannya. Dalam tiga tahun masa pemeliharaan, mereka bisa mendapatkan untung hingga dua kali lipat. Dari semula harga sapi kecil 2,5 juta rupiah, mereka bisa menjual sapi dewasa berkisar 5 juta rupiah.

Sapi layaknya tabungan deposito bagi masyarakat Nyawang. Dalam jangka waktu tiga tahun mereka bisa menikmati hasilnya. Jerih payah setiap hari, mengambil rumput, memberi makan-minum, dan membersihkan kandang terbayar dengan hasil jual sapi yang diterima. Namun, kecenderungan mereka menukar seekor sapi dewasa dengan dua sapi

kecil untuk kembali dipelihara. Ini merupakan salah satu cara akumulasi kapital. Dalam perkembangannya, beberapa orang mulai memiliki sapi yang relatif banyak sehingga muncul sistem nggadhuh atau eotde menitipkan sapi kepada orang lain dengan sistem bagi hasil

Differensiasi Sosial

Melalui beragam kegiatan produksi masyarakat ini, terbentuk pola diferensiasi social. Peneliti mencoba membagi masyarakat Nyawang yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, berdasarkan

aset ekonomi yang mereka miliki. Masyarakat Nyawang memiliki persepsi sendiri mengenai hal ini, misalnya bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki kebun kopi yang luas, pohon aren, dan sapi yang banyak. Klasifikasi semacam ini yang menurut peneliti kurang jelas tanpa adanya pembuktian melalui data yang akurat. Pembagian kelas ini berdasarkan pertimbangan luas tanah pertanian dimana kelas atas yang memiliki tanah lebih dari 4000 m², kelas menengah 1500 m² sampai 4000 m², dan kelas bawah kurang dari 1500 m².

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Dalam Kelas Ekonomi

No	Tingkatan kelas	Jumlah rumah tangga	Prosentase
1	Kelas bawah	6	15%
2	Kelas menengah	29	72,5 %
3	Kelas atas	5	12,5 %
Jumlah		40	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 72,5 % masyarakat Nyawang berada pada kelas menengah. Kelas menengah ini merupakan kelas yang memiliki keterbatasan akses produksi lahan sawah tetapi memiliki surplus produksi di sektor usaha komersil. Sektor usaha komersil seperti produksi gula aren, kopi atau sapi memegang peranan dominan dalam produksi rumah tangga. Kondisi kehidupan kelas ini bisa dibilang berkecukupan karena mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung dengan hutang. Perbedaan kelas menengah dan kelas atas sangat tipis bila dilihat dari kondisi rumah tangga. Namun, kepemilikan aset produksi menjadi pertimbangan utama yang membedakan dua

kelompok ini. Sementara itu, kelas bawah adalah mereka yang memiliki aset produksi terbatas dan lebih banyak mempergunakan tenaga kerjanya di sektor jasa tenaga kerja atau kuli. Kondisi rumahpun terbilang seadanya dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk termakan usia.

Untuk memahami produksi komoditas secara lebih jauh di Nyawang, maka peneliti memilih empat rumah tangga sebagai studi kasus, yaitu rumah tangga Pak Daliri, Pak Bonang, Pak Taim, dan Pak Sardi. Pemilihan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa, Pak Daliri termasuk dalam jajaran rumah tangga kelas atas yang memiliki hasil kopi dan gula aren yang paling banyak dan memiliki sawah yang luas. Pak Bonang

dalam kelompok kelas menengah sekaligus penghasil gula aren yang banyak dan berkecukupan. Begitu pula dengan Pak Taim mewakili kelompok kelas menengah yang lebih mengandalkan sektor-sektor yang lain.

Sementara itu, Pak Sardi mewakili rumah tangga kelas bawah yang sangat tergantung dengan gula aren dan memiliki keterbatasan aset yang lain.

Tabel 2. Perkiraan Pendapatan Pak Daliri Dalam Setahun.

No	Produksi Rumah tangga	Dalam Rupiah	Prosentase
1	Gula aren	9.639.000	54 %
2	Kopi 400 kg kopi	5.200.000	29 %
3	Sapi	-	-
4	Hasil lain (jengkol, pinus, duren, kolang-kaling, <i>pocung</i>)	3.021.000	17 %
Total pendapatan		17.860.000	100%

Pak Daliri mampu menghasilkan sekitar 4 kwintal kopi pada panen terakhir. Hasil sebanyak ini mampu menempatkannya sebagai penghasil kopi terbanyak pada masyarakat Nyawang. Ia memiliki lahan kopi di Blok Dukuh Wetan, Blimbing, Rowo, Depok, Nggamping, Bawang Jarot, Garung. Selain itu, ia juga memiliki sawah seluas 4450 m² yang mampu menghasilkan sekitar 15 *panggul gabah* atau sekitar 4,5 kwintal padi yang hasilnya surplus beras sepanjang tahun. Keluarga ini juga mampu meng-

hasilkan gula aren yang relatif banyak hingga 10 kg gula dalam sehari. Rumahnya sudah berkeramik dan tampak megah dengan tiang beton yang terpasang di teras rumahnya. Di dalamnya sudah ada televisi berwarna dan *vcd player* yang menjadi tontonan setiap hari. Bahkan pada tahun ini Pak Daliri mampu membelikan anaknya sebuah motor Suzuki Shogun seharga 4 juta rupiah menyelenggarakan acara *selamatan* untuk keluarganya dari hasil penjualan gula aren.

Tabel 3. Perkiraan Pendapatan Pak Bonang dalam Setahun

No	Produksi Rumah tangga	Dalam Rupiah	Prosentase
1	Gula aren	8.815.200	74 %
2	Kopi 150 kg kopi	1.950.000	16 %
3	Sapi	-	-
4	Hasil lain (jengkol, <i>pocung</i> , kuli)	1.230.000	10 %
Total pendapatan		11.995.200	100 %

Keluarga Pak Bonang, salah satu anak bahu atau kepala dusun, memiliki cukup banyak 22 pohon aren yang produktif di Blok Temu, Pengkolan, Talune Wastro, yang masih produktif yang berdampak pada

kontribusi pendapatan rumah tangga hingga 74%. Meskipun hasil gula aren-nya besar, ia masih memproduksi kopi dan hasil lain. Penyebabnya adalah hasil panen padinya tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok

selama setahun sehingga mereka harus mengalokasikan dana untuk membeli barang kebutuhan pokok ini. Tercatat, Ia memiliki sisa sawah seluas 1500 m² yang mampu

menghasilkan 6 *panggul gabah* atau sekitar 180 kg beras. Hasil panen tersebut tidak mencukupi untuk memberi makan tujuh orang keluarganya.

Tabel 4. Perkiraan Pendapatan Pak Taim Dalam Setahun.

No	Produksi Rumah tangga	Dalam Rupiah	Prosentase
1	Gula aren	-	-
2	Kopi 120 kg kopi	1.560.000	19%
3	Sapi	4.300.000	52%
4	Hasil lain (jengkol, pinus, duren, <i>pocung</i> , kuli)	2.359.000	29%
Total pendapatan		8.219.000	100%

Rumah tangga Pak Taim adalah rumah tangga yang terbilang muda tetapi mampu menarik perhatian karena keuletannya dalam bekerja. Meskipun tidak mampu memproduksi gula aren, ia mampu mengoptimalkan sumber daya lain seperti kopi, duren, pinus, sapi, dan sektor jasa atau kuli. Pada tahun ini ia berhasil mengumpulkan uang Rp 900.000 dari hasil kuli petik duren saja. Upah kuli petik duren adalah yang termahal Rp 50.000/hari karena tidak semua

orang bisa melakukannya. Ia juga aktif menyadap getah pinus dan memiliki investasi sapi yang dititipkan kepada tetangganya. Pada tahun 2010, Ia menjual seekor sapi miliknya untuk pembiayaan pernikahan saudaranya. Selain itu, Pak Taim memiliki sawah seluas 1750 m² yang menghasilkan 5 *panggul gabah* atau sekitar 150 kg beras. Hasil ini tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya sehingga ia harus membeli beras.

Tabel 5. Perkiraan Pendapatan Pak Sardi Dalam Setahun.

No	Produksi Rumah tangga	Dalam Rupiah	Prosentase
1	Gula aren	903.000	49%
2	Kopi 36 kg	468.000	25%
3	Sapi	-	-
4	Hasil lain (jengkol, <i>pocung</i> , kuli)	0.400 48	26%
Total pendapatan		1.851.400	100%

Dilihat dari tabel di atas, total penghasilan Pak Sardi lebih rendah dibandingkan dengan ketiga table diatas. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah mulai *kropos* dengan luas 12 m². Rumah kecil itu dihuni oleh enam orang anggota keluarga

yang tinggal bersama. Seringkali Suman, anak pertamanya memilih tidur di rumah tetangga. Pak Sardi memiliki aset sawah seluas 1.250 m² di Blok Balong yang menghasilkan 5 *panggul gabah* atau sekitar 150 kg. Hasil beras ini relatif sama dengan

Pak Taim, namun Pak Taim memiliki aset produksi komoditas di luar sektor pertanian yang lebih besar. Ia juga memiliki lahan kopi terletak di Blok Joho dan Temu yang hanya mampu menghasilkan kopi sekitar 36 kg setiap tahun. Begitu pula, 17 pohon aren yang dimilikinya tidak banyak menghasilkan nira aren. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, rumah tangga ini memanfaatkan waktu luangnya untuk menjadi kuli untuk kerja kopi, kerja sawah, kuli batu, maupun kuli angkut barang.

SIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas, terlihat bahwa diversifikasi produksi dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai sarana akumulasi kapital. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kekayaan dengan menambah aset produksi. Pada orang Nyawang penambahan aset produksi ini dilakukan pada sektor perkebunan kopi, dan ternak sapi. Karena lahan kopi yang strategis mulai berkurang, jual-beli kebun kopi mulai terjadi di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak seringkali menjadi alasan untuk menjual aset yang dimiliki alhasil mereka kehilangan sumber produksi yang mereka miliki. Orang-orang yang memiliki modal yang memadai juga mulai mengembangkan sistem *nggaduh* sapi yang mampu memberikan jaminan investasi sekaligus semakin menguatkan posisi ekonomi orang kaya di desa.

Dampak lain dari proses akumulasi adalah lahirnya orang yang memiliki aset terbatas atau yang sering dikategorikan sebagai kaum proletar atau proses proletarisasi (Cooper. 1984). Pada kasus desa

Nyawang mereka ini adalah orang-orang yang bekerja dengan menjual jasa atau bekerja sebagai kuli, mulai dari kuli *macul*, kuli angkut duren, kuli panen kopi, kuli mencari pasir, kuli batu, kuli bangunan. Pekerjaan sebagai kuli ini bersifat musiman dan menjadi pilihan logis bagi mereka yang memiliki aset produksi terbatas.

Dari tulisan ini, bisa melihat bahwa dalam masyarakat pedesaan yang masih berpegang pada sector agraris atau masyarakat pra-kapitalis sekalipun, sudah terbagi-bagi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi. Akumulasi kapital sudah dilakukan oleh beberapa orang untuk meningkatkan akses produksi sedangkan yang lain kehilangan aset yang mereka miliki. Sistem kepemilikan aset pribadi dianggap sebagai awal terjadinya proses akumulasi. Tetapi apakah benar masyarakat yang belum mengenal sistem kepemilikan pribadi masyarakat yang hidup dari berburu dan meramu terbebas dari proses akumulasi dan diferensiasi dalam masyarakatnya? Pertanyaan yang cukup mengganggu pikiran peneliti, karena hewan buruan maupun tanaman-tanaman tertentu merupakan sumber makanan penting bagi setiap individu. Persoalan “penting bagi individu” inilah yang terkadang mengharuskan orang untuk mengorbankan orang lain dan mendahulukan kepentingannya.

DAFTAR RUJUKAN

Cooper. Eugene. 1984. Mode of Production and Anthropology of Work, Source: *Journal of Anthropological Research*, Vol. 40, No. 2 (Summer, 1984), pp. 257-270. Published by: University of

- New Mexico. <http://www.jstor.org/stable/3629575>.
- Dove, Michael R. 2011. *The Banana Tree at The Gate: A History of Marginal People and Global Markets in Borneo*. Yale: Yale University Press.
- Friedman, Jonathan. 1974. Marxism, Structuralism and Vulgar Materialism, Source: *Man, New Series*, Vol. 9, No. 3 (Sep., 1974), pp. 444-469. Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. <http://www.jstor.org/stable/2800695>.
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta. Grasindo.
- Marx, Karl. 2004. *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Murtijo. 2001. *Kerusakan Hutan Dan Pengrusakannya di Petungkriyono*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Antropologi UGM.
- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Semedi, Pujo. 2006 “Petungkriyono: Mitos Wilayah Terisolir” dalam Ahimsa- Putra, Heddy Shri (ed), *Esei-Esei Antropologi: Teori, Metodologi, dan Etnografi*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Steward, Julian H. 1977. *Evolution And Ecology: Essays on Social Transformation*. USA: University of Illinois Press.
- Utama, Aji Prasetya Wahyu. 2011. *Rasionalitas Petani Tepi Hutan: Studi Produksi Gula Aren Dalam Keragaman Perekonomian Rumah Tangga*. Yogyakarta: Skripsi UGM tidak diterbitkan.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG PASCA PEMEKARAN

Moh. Fakhri dan Mohamad Tohari

Dosen Prodi PKN FKIP UNRARIS

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

District extension, implementation of Law Number 25 year of 2009, public service

Abstrak

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan kecamatan yang diarahkan pada peningkatan kreativitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat, pemekaran kecamatan Klepu Kabupaten Semarang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 1996 tentang pembentukan kecamatan Pringapus di wilayah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan antara lain: untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi UU No. 25 tahun 2009, faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang timbul dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Camat/aparat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam memaksimalkan proses implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Untuk mencapai tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Pelayanan publik di kantor kecamatan Bergas sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012. Adapun faktor-faktor atau hambatan antara lain kebijakan aturan pelaksanaan dan aturan teknis dengan tempo \pm 3 tahun tenggang waktu (segi kebijakan sendiri). Keterbatasan SDM yang mumpuni sesuai dengan jenis kegiatan pelayanan publik; sarana prasarana pendukung dan publikasi/sosialisasi program implementasi pelayanan publik. Upaya aparat kecamatan dengan segala keterbatasannya tetap melaksanakan/ implementasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dengan hasil penilaian kinerja pelayanan dalam kategori sama antara pelaksana dan penerima pelayanan. Peneliti menyarankan standar pelayanan dan maklumat pelayanan harus dipublikasikan kepada publik penerima pelayanan, menempatkan pegawai pelaksana pelayanan harus berperilaku dan penataan ruang loket pelayanan di tingkat kelurahan dan desa seragam serta koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan pelaksanaannya, sehingga pelayanan publik dapat dinikmati oleh penerima pelayanan.

Abstract

For the agenda of generalization of local development and district expansion which is aimed to improvement of human resource creativity and levying of supporting facilities for requirement of public, the extension of Klepu district Semarang Regency is donewith Government Regulation of Republik Indonesia number 48 year of 1996 about forming of Pringapus

district in Semarang Regency Central Java Province area.

The purposes of this research are: to know and describe the implementation process of Law Number 25 year of 2009, the factors or the resistances arising in implementation process of Law Number 25 year of 2009, and the efforts which are done by Head or officer of Bergas District Semarang Regency in maximizing the implementation process of Law Number 25 year of 2009. To reach the purposes, this research used qualitative descriptive research method.

That the public service in Bergas District office have been as according to Law number 25 year of 2009 and Government Regulation number 96 year of 2012. The factors or resistances for example policy of implementation regulation and technical regulation with tempo \pm 3 years period (in policy side). The limitation of good human resource as according to activity type of public service; supporting facilities, infrastructure and publication/socialization of implementation program of public service. The effort of District government officer with all the limitations is keep implement the Law number 25 year of 2009 with result of assessment of service performance in same category between service implementer and receiver. Researcher suggests service standard and service communiqué must be publicized to public as service receiver, place the service implementer officer must have behavior and settlement of service counter space in level of sub-district must be equalized and also coordination and communication need to be improved the implementation, so that public service can be enjoyed by service receiver.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
moh.fakih@yahoo.com

PENDAHULUAN

Era reformasi negara Indonesia membawa begitu banyak perubahan pada sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah. Kebijakan itu antara lain berkaitan dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Implementasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 sampai saat ini belum dilakukan dengan

maksimal pada kantor kecamatan Bergas pasca pemekaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1996 tentang pembentukan kecamatan Pringapus tanggal 12 Juli 1996 dan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 1998 tentang pembentukan Kecamatan Pringapus tanggal 3 Januari 1998, sehingga wilayah kecamatan Klepu pasca pemekaran meliputi 4 kelurahan dan 9 desa atau 13 wilayah kelurahan dan desa, dengan berganti nama wilayah kecamatan Bergas. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum efektif dan efisien serta belum berjalan secara maksimal.

Pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan kecamatan diarahkan pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya pemekaran wilayah kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah serta pelayanan publik atau masyarakat.

Birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratif dan dialogis serta dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis (Thoha, 2001: 19). Dengan revitalisasi birokrasi publik (terutama aparatur pemerintah daerah) ini, pelayanan publik yang lebih baik dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Secara teoritis, birokrasi pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan dilaksanakan oleh unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan

fungsi pokoknya adalah *development function* dan *adaptive function*. Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi) termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*).

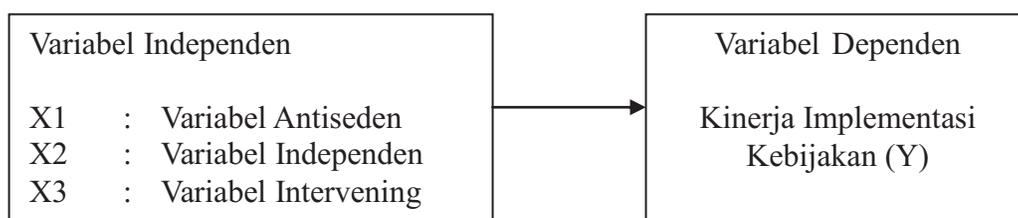
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain, serta pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan (fungsi regulasi) yang harus dipatuhi oleh masyarakat seperti perijinan, KTP, KK, Surat Miskin, Surat Tanah, IMB, ASKES, dan sejenisnya. Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam namun realitas dalam implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu, tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan harapan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Menurut Egonmwan (1991) dalam Makinde (2005:

63) kompleksitas dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan dalam proses implementasi itu sebagai berikut: “*It refers to the process of converting financial, material, technical and human inputs into output-goods and services*”. Setelah melalui proses yang kompleks tersebut maka akan dihasilkan apa yang disebut sebagai *policy outcomes*.

Kajian atas implementasi kebijakan publik tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi secara cermat apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi suatu kebijakan dimaksud. Dalam upaya mempermudah identifikasi berbagai variabel, para ahli membedakan dalam dua macam yaitu variabel tergantung (*dependent variable*) yang hendak dijelaskan

yaitu kinerja implementasi kebijakan, dan variabel bebas (*independent variable*) yaitu berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut. Kinerja implementasi kebijakan merupakan variabel pokok yang akan dijelaskan oleh variabel lain. Kinerja implementasi kebijakan secara sederhana menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Hasil kebijakan (*policy outcomes*) yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi secara nyata mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (*policy goals*). Secara sederhana hubungan antara dua kelompok variabel dalam implementasi kebijakan digambarkan sebagai berikut:

Variabel dalam Model Implementasi



Hubungan yang kompleks variabel antiseden, independen, intervening dengan variabel dependen (kinerja implementasi kebijakan) tergambar secara nyata dalam berbagai model implementasi yang dihasilkan oleh para ahli implementasi generasi II antara lain George Edward III (1980), Daniel Mazmanian (1983), Merike Grendle (1980) Van Metter, dan Van Horn (1975).

Merujuk pada pendapat Ripley (1985: 134), implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan

“*Implementation studies have two major foci: “compliance and what's happening?”*”.

Perspektif I (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, Peraturan pemerintah, atau program). Studi implementasi yang menggunakan perspektif ini juga ingin mengetahui kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh para atasan sebagai upaya

untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Perspektif kepatuhan sangat dipengaruhi oleh pandangan yang melihat keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh persoalan pengelolaan urusan administrasi dan manajemen. Selanjutnya keberhasilan implementasi secara mudah dapat dilihat melalui serangkaian “*check list*” tentang apa yang harus dilakukan oleh para implementer dalam melakukan *delivery* berbagai *policy output* kepada kelompok sasaran. Keberhasilan mereka kemudian diukur dari ketetapan atau kemampuan mereka dalam mengikuti berbagai peraturan yang dibuat dalam bentuk “*check list*” tersebut.

Perspektif II, perspektif ini tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan para implementer kebijakan mengikut *Standard Operation Procedure* (SOP) semata-mata, namun berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas. Pertanyaan untuk mengukur keberhasilan implementasi adalah “*what is it achieving? And why or what's happening? And why?*” (Ripley 1985: 134). Mengikuti pendapat Ripley tersebut, maka ukuran keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para implementer dalam mengikut SOP, namun juga diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan. Artinya bahwa kepatuhan para implementer dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan implementasi. Kepatuhan tersebut semestinya perlu dipandang sebagai kondisi yang harus dipenuhi (*necessary condition*) agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, dan bukan tujuan akhir dari implementasi itu sendiri.

Pencapaian tujuan kebijakan tidak cukup hanya dengan mengikuti SOP saja, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti ketepatan instrumen kebijakan, kecukupan keluaran kebijakan, kualitas keluaran kebijakan, dan lain-lain.

Berbagai pertanyaan untuk mendapat informasi tentang fenomena implementasi tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Hill dan Hupe (2002: 25) yang mengatakan bahwa obyek studi implementasi adalah (1) proses atau perilaku para implementer, (2) keluaran kebijakan (3) hasil kebijakan dan (4) hubungan sebab akibat antara hasil kebijakan tersebut dengan proses bagaimana implementasi tersebut dilakukan.

Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Kecamatan atau sebutan lain merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2008). Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi dan sekretariat membawakan paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Dalam pasal 23 ayat 2 PP RI No. 19 tahun 2008 lebih lanjut seksi paling sedikit meliputi seksi pemerintahan; seksi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan seksi ketenteraman dan ketertiban umum. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan

dalam peraturan menteri dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Dalam Permendagri No. 04/2010 pasal 22 mengatur tugas camat guna melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan dan perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik antara lain meliputi: a) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; b) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayahnya; c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya; dan e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Wilayah kecamatan Bergas mencakup 4 kelurahan antara lain: Kelurahan Karangjati, Ngempon, Begas Lor, Wujil, dan 9 desa antara lain: Desa Bergas Kidul, Diwak, Randu Gunting, Jatijajar, Ringin Putih, Gondoriyo, Munding, Pagersari, dan Gebugan.

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait

dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. Penyusunan Standar Pelayanan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pasal 8 ayat 1, persyaratan administrasi meliputi standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan standar pelayanan meliputi: jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses / prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan.

Standar pelayanan dan rincian tugas personil kecamatan diatur dengan peraturan Bupati No. 92/2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Perincian Tugas Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Semarang. Komponen standar pelayanan sebagaimana dalam UU No. 25 tahun 2009 pasal 21 dan maklumat pelayanan pasal 22 komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya / tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan / atau fasilitas, komponen pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Hak dan kewajiban bagi

penyelenggara sebagaimana dalam UU no. 25 tahun 2009 pasal 14 dan 15.

Dalam organisasi penyelenggara sebagaimana pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2009 berkewajiban menyelenggarakan, pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan dan sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan penyelenggaraan dan kegagalan pelaksanaan pelayanan publik. Kewajiban dan larangan bagi pelaksana sebagaimana dalam UU no. 25 tahun 2009 pasal 16 dan pasal 17.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 2003 dijelaskan tentang sendi-sendi pelayanan prima meliputi: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu. Hak dan kewajiban bagi masyarakat sebagaimana dalam UU no. 25 tahun 2009 pasal 18 dan 19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005: 4). Lokasi penelitian adalah kantor kecamatan Bergas pasca pemekaran yang semula menjadi bagian kecamatan Klepu Kabupaten Semarang berdasar pada peraturan pemerintah Republik Indonesia

nomor 48 tahun 1996 meliputi 4 kelurahan dan 9 desa. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta latar belakang penelitian yakni kepala kecamatan Bergas, sekretaris kelurahan/desa dan perangkat serta warga yang mendapat pelayanan / desa dan perangkat serta warga yang mendapat pelayanan pada kantor kecamatan Bergas (4 kelurahan dan 9 desa) sebagai responden.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, atau meneliti seluruh populasi dengan alasan (a) jumlah populasi relatif kecil; (b) penelitian ini ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Lokasi / obyek penelitian adalah wilayah kecamatan Bergas yang meliputi kelurahan Wujil, Karangjati, Ngembon, dan Bergas Lor ditambah desa Bergas Kidul, Munding, Pagersari, Gebugan, Randugunting, Jatijajar, Diwak, Wringin Putih, dan Gondoriyo, yaitu sesuai dengan populasi.

Fokus dalam kajian penelitian ini adalah (a) implementasi Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kantor Kecamatan Bergas pasca pemekaran, (b) faktor penghambat implementasi Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kantor Kecamatan Bergas pasca pemekaran, (c) upaya-upaya yang dilakukan pihak kecamatan Bergas dalam memaksimalkan proses implementasi Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di kantor Kecamatan Bergas pasca pemekaran.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (a) observasi yaitu

digunakan untuk melakukan pengamatan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunjungi langsung ke obyek kantor Kecamatan Bergas dan 13 kantor pelayanan publik/masyarakat. (b) dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari instansi terkait tentang hal-hal pelayanan publik, (c) wawancara digunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat, aparat kecamatan, pemerintah kelurahan atau pemerintah desa dan instansi terkait dilaksanakan wawancara terstruktur dan warga atau masyarakat yang mendapat pelayanan pada kantor kecamatan bergas sebagai responden sebanyak 52 orang dari 13 kelurahan/desa ditambah 13 sekretaris kelurahan/desa (yang dilayani) sedangkan pengambilan sampel yang mewakili pegawai kantor Kecamatan Bergas adalah 1 (satu) orang camat dan 5 (lima) orang pegawai yang bertugas di unit pelaksana pelayanan publik.

Adapun wawancara mendalam dilakukan melalui wawancara langsung dengan warga masyarakat yang dilayani, yakni pelayanan masyarakat yang erat dengan tugas-tugas umum pemerintah (pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan tidak mampu, Surat Tanah, dan ASKES) secara accidental sampling, yaitu responden diambil dengan memilih warga yang sedang dilayani terdekat yang dijumpai pertama kali pada saat penelitian dilakukan dan untuk mempermudah proses analisis data, wawancara menggunakan format jawaban Likert berdasarkan kontinum kepuasan dan peneliti melakukan interpretasi hasil wawancara dengan pengembangan sesuai informasi yang diperlukan.

Analisis data, menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Taylor (1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan thma dan merumuskan hipotesis (ide) seperti disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan fakta dan thema pada hipotesis. Berdasarkan definisi yang dijelaskan para ahli, proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- c. Menyusun data satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategorikategori itu dibuat sambil melakukan coding.
- d. Pemeriksaan keabsahan data. Tahap ini adalah tahap akhir dari analisis data. Setelah tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang sesuai dengan metode penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Kecamatan Bergas pasca pemekaran dari kecamatan Klepu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus, tanggal 12 Juli 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 1998 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus tanggal 3 Januari 1998 Kecamatan Bergas terdiri dari 4 kelurahan, yaitu kelurahan Nagempon, Kelurahan Karangjati, Kelurahan Wujil, Kelurahan Bergas Lor, dan 9 desa, yaitu Desa Munding, Desa Pagersari, Desa Gebugan, Desa Bergas Kidul, Desa Randugunting, Desa Jatijajar, Desa Diwak, Desa Wringin Putih, dan Desa Gondoriyo.

Kecamatan Bergas mempunyai luas wilayah menurut data dari BPS Kabupaten Semarang seluas 4.733,10 Ha atau 4,98% dari luas wilayah Kabupaten Semarang, sedangkan secara administrasi. Berdasarkan status kepemilikan rumah, penduduk yang memiliki rumah sendiri sebanyak 14.143 unit sedangkan rumah sewa sebanyak 4.521 unit. Wilayah Kecamatan Bergas terdiri dari lahan pertanian dan bukan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 1.029,46 Ha dan lahan bukan sawah 1.732,55 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian 1.971,09 Ha.

Sebagai pendukung pelaksanaan, Bupati Semarang menetapkan Peraturan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas kecamatan dan kelurahan Kabupaten Semarang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2012, Kecamatan Bergas sudah menerapkan Peraturan dimaksud dengan menyesuaikan kondisi dan memaksimalkan sumber daya manusia yang

terbatas sebagaimana yang tersedia dan menunggu formasi pengangkatan sebagai pengganti pensiun.

Kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh pegawai sebanyak 278 orang, yang mana jumlah pejabat struktural 6 orang. Jumlah PNS yang pensiun 3 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada profil Kecamatan Bergas tahun 2012 halaman 2.

Kantor Kecamatan Bergas dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah menetapkan standar pelayanan dengan keputusan Camat Bergas Nomor 061/21/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 20 UU No. 25 Tahun 2009. Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan pada kantor Kecamatan Bergas mengatur beberapa jenis pelayanan antara lain: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Pindah, Ijin Gangguan, Ijin Pendirian Bangunan, Legalisasi (Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Legalisasi surat keterangan Akta Kelahiran, Legalisasi administrasi NTCR (Nikah, Tolak, Rujuk, Cerai), Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Legalisasi Pengantar Ijin Keramaian, dan Legalisasi Surat Pengantar Ijin Tebang Kayu (SPITK). Adapun komponen dalam setiap jenis pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian

biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan keselamatan

pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

Sebagai contoh jenis pelayanan dalam standar pelayanan adalah pelayanan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan rincian sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jenis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kab. Semarang No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Perda Kab. Semarang No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Kab. Semarang No. 20 Tahun 2008 tentang OTK Kecamatan dan Kelurahan di Kab. Semarang 3. Perbup No. 117 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat di Kab. Semarang 4. Perbup No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan KTP (FS 03) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Surat Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun 4. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah 5. Surat Pengantar RT/RW 6. Surat Kehilangan dari Kepolisian (bagi KTP yang hilang) 7. Surat Keterangan Rusak dari Kepala Desa/Lurah (bagi KTP Rusak) 8. Surat Pindah dari daerah asal bagi Pendatang Baru 9. Membawa KTP asli yang akan habis masa berlakunya (untuk perpanjangan KTP) 10. Permohonan perpanjangan KTP diajukan maksimal 14 hari sebelum masa berlaku KTP berakhir
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan permohonan KTP dan mendaftarkan di loket 2. Pemberian tanda bukti No. urut panggilan 3. Pemeriksaan berkas dan paraf oleh yang berwenang 4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

No	Komponen	Uraian
		5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses hingga Pencetakan KTP 6. Pengambilan foto diri, sidik jari, dan iris mata pemohon, dan tanda tangan 7. Pencetakan KTP 8. Penyerahan KTP kepada pemohon dan laminating 9. Pengarsipan Dokumen KTP
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam (jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung/jaringan baik)
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	KTP

Sumber: Standar Pelayanan Kecamatan Bergas tahun 2012

Berkenaan dengan penyelenggaraan menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan (pasal 22 UU No 25 tahun 2009), kantor Kecamatan Bergas telah menetapkan

dan mempublikasikan mak-lumat pelayanan secara jelas dan luas di loket pelayanan antara lain.

Tabel 2. Maklumat Pelayanan Kantor Kecamatan Bergas

Visi Pelayanan	Jam Pelayanan	Biaya Pelayanan	Jenis Pelayanan
Terwujudnya pelayanan publik yang prima Misi Pelayanan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan 3. Membangun citra pelayanan dengan memperlakukan pengguna layanan sebagai fokus pelayanan 4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kantor Kecamatan Bergas	Senin-Kamis Jam 08.00-15.00 WIB Pemotretan KTP s.d. Jam 14.00 WIB Jumat Jam 08.00-11.00 WIB Mekanisme Pengaduan untuk layanan pengaduan Kantor Kecamatan Bergas Alamat Jl. Sukarno-Hatta 68 Bergas, Telp./Fax 0298-523024 Waktu setiap jam kerja Senin-Kamis jam 08.00-14.00 WIB Jumat jam 08.00-11.00 WIB	Biaya pelayanan sesuai Perda yang berlaku Fasilitas pelayanan 1. Penataan ruang pelayanan dengan memperhatikan kerapian, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi pengguna layanan 2. Ruang tunggu yang representatif bersih, rapi, dan nyaman 3. Adanya informasi pelayanan	1. Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Surat Pindah 4. Ijin Gangguan (IG/HO) 5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Legalisasi surat-surat (SKCK, NTCR, SKTM, Jamkesmas, Jamkesda, dll)

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Bergas 2013

Hasil penelitian data yang diperoleh dari angket yang disampaikan kepada responden, data produk pelayanan (penyelenggara dan pelaksana) pelayanan publik kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagaimana dalam tabel 3 berdasarkan hasil angket dari pegawai kecamatan dan pegawai kelurahan/desa yang memberikan pelayanan publik menunjukkan skor:

Normatif = $\frac{12903}{30} = 4,31$ kategori setuju (pernyataan dari responden / pegawai yang memberikan pelayanan publik terhadap implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sedangkan berdasarkan hasil angket dari masyarakat yang menerima pelayanan publik kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang (Warga 4 Kelurahan dan 9 Desa) sebagaimana dalam tabel 4 dan menunjukkan skor komulatif $529/13 = 4,07$ kategori setuju (pernyataan dari responden / masyarakat penerima pelayanan publik terhadap implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pelaksanaan pelayanan publik/ implementasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012, dalam penelitian ini penyelenggara dan pelaksana adalah kantor kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan ruang lingkup atau fokus pada pelaksanaan pelayanan administrasi. Camat Bergas telah menetapkan standar pelayanan dengan keputusan camat Bergas nomor 061/21/2012 tentang penetapan standar pelayanan pada Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tanggal 20 Desember 2012 dan wajib dilaksanakan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan pe-

nyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam pelayanan, penyelenggara wajib menetapkan maklumat pelayanan (Ps 30 PPRI no. 96/2012) dan terpublikasikan sudah terpasang di ruang tunggu.

Guna memahami keberhasilan implementasi yang dilandasi dua perspektif pendapat (Ripley, 1985: 134), Pertama: dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau program)

Kedua, tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan para implementer kebijakan dalam mengikuti standar operating procedure (SOP) semata-mata, perspektif kedua ini berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas.

Mengikuti pendapat Ripley, ukuran keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para implementer dalam mengikuti SOP, namun demikian juga diukur keberhasilan dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan dengan menyadari apa kendala/ hambatan dari kondisi yang riil dan apa pula upaya-upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana.

Kinerja implementasi suatu kebijakan paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor fundamental, yaitu (1) kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan kualitas dan topologi kebijakan yang diimplementasikan, (2) kapasitas organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, (3) kualitas SDM aparatur yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, dan (4) kondisi lingkungan sosial ekonomi, dan politik

dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (O'toole, 1986).

Asumsi yang digunakan oleh para ilmuwan administrasi publik selama ini adalah ketika suatu kebijakan telah dirumuskan dan tugas-tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut telah didistribusikan kepada semua aparat dalam berbagai level pemerintahan maka tujuan kebijakan diasumsikan akan dipahami secara baik oleh seluruh aparat yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Konsekuensinya, aparat birokrasi diharapkan akan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan kinerja implementasi kebijakan menduduki posisi sentral dan sebagai suatu konsep yang menggambarkan kegagalan atau keberhasilan implementasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai proses atau serangkaian kegiatan dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan masyarakat, penyelenggara wajib merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi komponen standar (ps. 21 UU No. 25 tahun 2009) dan maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 UU No. 25 tahun 2009, pengawasan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan serta penilaian kinerja (ps. 35, ps. 36, dan ps. 37; ps. 38) UU nomor 25 tahun 2009.

Dalam data hasil penskoran angket pelaksana pelayanan publik dari 30 pertanyaan memperoleh skor secara kumulatif 4,31 dengan kategori setuju yang merupakan penilaian kinerja penyelenggara/ pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada publik / warga masyarakat kecamatan Bergas selanjutnya data hasil penskoran angket penerima pelayanan publik/ masyarakat dari 15 pertanyaan memperoleh skor secara kumulatif 4,07 dengan kategori setuju yang merupakan penilaian kinerja dari warga masyarakat / publik (9 masyarakat desa dan 4 masyarakat kelurahan) di wilayah Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3 dan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pengikutsertaan masyarakat yang mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: (a) penyusunan kebijakan pelayanan publik; (b) penyusunan standar pelayanan; (c) pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan (d) pemberian penghargaan, masyarakat dapat secara swadaya memberikan penghargaan kepada penyelenggara atau pelaksana yang memiliki kinerja pelayanan yang baik sesuai kemampuan atau kompetensinya.

Dalam ketentuan penutup pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 50 ayat 1 antara lain pada saat peraturan pemerintah ini

mulai berlaku, semua penyelenggara yang:

- a. Belum memiliki standar pelayanan, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, dan
- b. Telah memiliki standar pelayanan wajib menyesuaikan dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan memberlakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang secara bertahap Camat Bergas pada tanggal 20 Desember 2012 menetapkan Surat Keputusan Nomor 061/21/2012 tentang penetapan standar pelayanan pada Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan menetapkan maklumat pelayanan yang isinya pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan publik. Maklumat pelayanan dipublikasikan secara jelas dan luas.

Penilaian kinerja pelayanan oleh

penyelenggara / pelaksana sendiri dari hasil angket yang dianalisis sebagaimana tabel 3 menunjukkan hasil kinerja pada angka penskoran 4,31 dengan kategori setuju sedangkan penilaian kinerja pelayanan oleh masyarakat penerima pelayanan administratif dari angket yang dianalisis sebagaimana tabel 4 menunjukkan hasil kinerja pada angka penskoran 4,07 dengan kategori setuju. Berdasarkan uraian di atas, dalam proses implementasi dan penilaian kinerja penyelenggara/pelaksana sendiri dengan hasil kinerja dan penerima/masyarakat yang dilayani maka tindakan kegiatan pelayanan administratif (KTP, KK, Surat Miskin, Surat Tanah, Askes, dan surat-surat sejenis) pelayanan publik telah dilaksanakan/diimplementasikan (UU Nomor 25/2009) di kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pelayanan publik antara lain:
 - a. Pada kebijakan pelayanan publik sudah secara tegas dan rinci tentang persyaratan baik dari organisasi, kualitas, dan penilaian kinerja lengkap dengan komponennya juga peran aktif dan keterlibatan masyarakat penerima pelayanan.
 - b. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit pelaksana bidang tugas dalam pelayanan administratif.
 - c. Kemampuan penyelenggara/

- pelaksana dalam mengimplementasikan pelayanan publik Kondisi lingkungan masyarakat yang ada di 13 wilayah desa dan kelurahan yang beragama dari berbagai karakter dan kepribadian masing-masing sebagai dampak diundangkan peraturan pemerintah dalam jarak waktu \pm 3 tahun.
3. Upaya aparat Kecamatan Bergas dalam mengimplementasikan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PPRI no. 96 tahun 2012, guna mensikapi batas waktu 6 bulan sesuai dalam peraturan pemerintah dimaksud pasal 50 ayat 2 Camat Bergas segera dalam waktu \pm 2 bulan telah melaksanakan / mengimplementasikan sesuai dengan isi undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia dimaksud dan hasil penilaian kinerja pelayanan menunjukkan nilai penskoran dengan kategori setuju antara pelaksana pelayanan dan penerima pelayanan dalam pelayanan administratif.

Aparat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam tahun 2013 telah berupaya dan memaksimalkan pelayanan administratif yang telah diamanatkan sebagai implementasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik. Adapun saran-saran peneliti sampaikan antara lain:

1. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan dipublikasikan dan

disosialisasikan terutama bagi penyelenggara/pelaksana (kecamatan, kelurahan, desa, dan RT/RW) dan prosedur alur penyelesaiannya, dan umumnya kepada masyarakat.

2. Menempatkan pelaksana atau pegawai yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dari segi kualitas maupun kuantitas harus berperilaku pelaksana dalam pelayanan.
3. Penataan ruang loket pelayanan dan fasilitas pendukung pada unit pelayanan kelurahan dan desa diseragamkan, sehingga pelayanan kepada publik berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan terutama dalam evaluasi hasil kinerja pelaksana pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta hubungan penyelenggara dengan unit lain pihak penerima pelayanan publik (masyarakat warga Kecamatan Bergas dan warga masyarakat umumnya).

DAFTAR RUJUKAN

- Barata, Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
- Dwijowiyoto, Rian Nugroho. 2011. *Menata Ulang Manajemen Pemerintah untuk Membangun Indonesia dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT. Alex Komputindo.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial; Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Goggin Makolm L dan Laurence J. O'Toole Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice toward a Third Generation*. Glenview: Scot Foresman/Lette, Brown USA.
- Juliantara, Dadang. 2005. *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kumorotono, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Armico.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, EA. 2004. *Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan*. Bandung: Armico.
- Ripley, Randall. B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumantoro.2007. *Reformasi Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.



IMPLEMENTASI CTL DALAM MATA KULIAH PRAKTIKUM METEOROLOGI-KLIMATOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI BEKERJA ILMIAH PADA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI UNNES

Sriyanto dan Sutardji

Jurusan Geografi – FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

CTL, scientific work, competency, geography

Abstrak

Hasil evaluasi diri Jurusan Geografi Unnes menunjukkan bahwa rata-rata lama studi mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Geografi lebih dari 4 tahun. Faktor penyebab utamanya terletak pada waktu penyusunan skripsi yang rata-rata lebih dari 12 bulan (Jurusan Geografi, 2003). Kesulitan mahasiswa dalam menyusun skripsi diduga dikarenakan mereka tidak terbiasa bekerja ilmiah. Penyelenggaraan praktikum verifikatif, yaitu praktikum untuk membuktikan konsep atau hukum yang sudah dijelaskan dalam pembelajaran di kelas, tampaknya kurang dapat mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Geografi dengan subjek penelitian mahasiswa jurusan Geografi. Jenis penelitiannya berupa tindakan kelas (PTK) dengan beberapa prosedur atau tahap yang akan dilaksanakan. Tahapan tersebut adalah perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi dan diakhiri dengan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan dibandingkan dengan nilai hasil laporan praktikum menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode CTL terdapat peningkatan cara kerja ilmiah pada mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya mahasiswa yang mampu mengerjakan dan membuat peta curah hujan pada setiap siklus. Pada siklus pertama 56,7% mahasiswa masih kebingungan membuat peta curah hujan dengan jaring-jaring Thiesen, hanya 43,3% mahasiswa memahami dan bisa membuat peta curah hujan tersebut. Pada siklus kedua, mahasiswa yang mampu membuat dan menggambar peta curah hujan dengan model jaring-jaring Thiesen meningkat menjadi 83,3%. Hasil ini sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang peneliti tetapkan yaitu sebesar 75% dari total sampel/mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan model serta pendekatan CTL mahasiswa mampu dan bisa bekerja secara ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan khususnya dalam perkuliahan.

Abstract

The results of self-evaluation Geography Unnes shows that the average duration of the study undergraduate Education Studies Geography is more than 4 years. The main causative factor lies in the preparation of the thesis that the time average of more than 12 months. Difficulty in writing his thesis student allegedly because they are not used to working scientific. The concept or practice of law that have been described in the classroom, it seems less able to develop the ability to work ilmiah. Penelitian is done in the

Department of Geography at the subject of research students department of Geography. Types of research in the form of class action with some procedures or steps to be carried out. These stages are planning, action, observation / evaluation and ends with reflections. The results show the value than lab report results indicate that by using CTL there is an increase in student how scientific work. This is demonstrated by the increasing number of students who are able to work and make a map of rainfall at each cycle a cycle first, 56.7 still confusion make maps of rainfall with nets Thiesen, only 43.3% were understand and be able to create a map of rainfall is in the second cycle, students are able to create and draw a map of rainfall with jarinng-nets models Thiesen increased to 83.3%. This result has met the completeness criteria that researchers set that is equal to 75% of the total sample / students. This shows that the models and approaches, students CTL capable and able to work scientifically in solving a particular problem in the lecture.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
riyanfath@gmail.com

PENDAHULUAN

Hasil evaluasi diri Jurusan Geografi Unnes menunjukkan bahwa rata-rata lama studi mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Geografi lebih dari 4 tahun. Faktor penyebab utamanya terletak pada waktu penyusunan skripsi yang rata-rata lebih dari 12 bulan (Jurusan Geografi, 2003). Kesulitan mahasiswa dalam menyusun skripsi diduga dikarenakan mereka tidak terbiasa bekerja ilmiah. Bekerja ilmiah adalah proses mengungkap masalah, merumuskan hipotesis, mendesain eksperimen, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya (Lawson, 1995; Trowbridge et al., 1986). Proses tersebut mestinya dapat dikembangkan melalui kegiatan laboratorium atau praktikum, namun selama ini penyelenggaraan praktikum cenderung bersifat verifikasi dengan menggunakan petunjuk jenis resep masak (*cookbook*). Penyelenggaraan

praktikum verifikatif, yaitu praktikum untuk membuktikan konsep atau hukum yang sudah dijelaskan dalam pembelajaran di kelas, tampaknya kurang dapat mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah. Dugaan tersebut diperkuat oleh hasil survey terhadap 40 mahasiswa semester lima yang sudah menempuh 90% dari seluruh mata kuliah praktikum yang wajib ditempuhnya. Ketika kepada mereka dihadapkan pada “peta curah hujan” yang merupakan informasi baru (temuan) sebagai produk/ hasil meteorologi-klimatologi dengan tehnik *overlay* melalui skoring, dan kemudian kepada mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah saudara dapat membuat peta seperti ini?, ternyata sebagian besar mereka (78 %) menjawab belum dapat membuatnya.

Berdasarkan hasil survey tersebut dapat diperkirakan bahwa penguasaan keterampilan proses yang mahasiswa miliki belum cukup memadai untuk digunakan dalam memecahkan masalah melalui bekerja ilmiah. Kemampuan bekerja ilmiah, selain

akan mendukung proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, juga sangat berguna bagi mahasiswa calon guru kelak ketika bekerja. Apalagi sesuai kurikulum baru, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi, bekerja ilmiah merupakan kompetensi yang harus dikembangkan pada berbagai mata pelajaran, termasuk dalam mata pelajaran geografi. Alangkah ironisnya bila kelak mereka dituntut untuk membelajarkan kompetensi dalam bekerja ilmiah di sekolah, namun di LPTK mereka kurang memperoleh pengalaman itu.

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan dalam bekerja ilmiah. Sebenarnya CTL atau *Contextual Teaching and Learning* bukan sesuatu yang baru bagi para guru di Indonesia. Komponen CTL sering muncul dalam PBM (proses belajar mengajar), namun kemunculan komponen tersebut intensitasnya masih kurang. Penerapan CTL secara formal berdasarkan anjuran pemerintah (Depdiknas) baru dilakukan beberapa tahun ini. Peningkatan intensitas pemunculan komponen CTL akan sangat membantu siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri sekaligus membantu kompetensi yang dipersyaratkan. CTL akan memberikan arti tersendiri dalam proses belajar mengajar di kelas, karena pendekatan ini akan menggunakan keterampilan proses yang menitik beratkan pada *insight* atau tilikan, bukan hanya kemampuan mengingat jangka pendek yang sementara ini sedang gencar dilaksanakan (Heriyanto, 2005).

Dalam pendekatan CTL, peran guru/dosen yang banyak dikurangi, tetapi aktivitas siswa yang lebih diperbanyak, sehingga *time on task* akan meningkat secara

signifikan. Guru dalam pembelajaran CTL akan lebih banyak sebagai fasilitator bukan sebagai sumber ilmu satu-satunya dalam PBM. Siswa akan belajar dengan aktif melalui diskusi, penyelidikan, eksperimen, wawancara, dan lain sebagainya.

Brandt (1998:17), mengemukakan tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran CTL agar pengajaran menjadi sukses; (1) siswa akan belajar dengan baik apabila yang dipelajari bermakna, (2) siswa akan lebih termotivasi untuk belajar apabila dia mempunyai tantangan yang bisa dicapai, (3) Belajar selalu bertahap, (4) setiap siswa belajar dengan caranya sendiri, (5) belajar terjadi karena adanya interaksi social, (6) siswa membutuhkan umpan balik, (7) belajar yang berhasil menggunakan bermacam-macam strategi, (8) emosi positif memperkuat belajar, (9) belajar dipengaruhi oleh lingkungan secara keseluruhan. Brandt (1998: 19) juga menegaskan bahwa dalam pendekatan CTL ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu: (1) konstruktivisme, (2) bertanya, (3) menemukan, (4) kelompok belajar, (5) Pemodelan, (6) refleksi, dan (7) penilaian sebenarnya.

Implementasi CTL dalam dilakukan dalam pembelajaran atau perkuliahan praktikum yang berlangsung di laboratorium. Penerapan kegiatan laboratorium atau praktikum sebagai tindakan untuk mengembangkan kompetensi dalam bekerja ilmiah memenuhi syarat pertama yang diajukan Lippmann. Selain berguna bagi mahasiswa dalam penyusunan skripsi, kompetensi bekerja ilmiah juga dapat membekali mahasiswa dalam membelajarkan kompetensi tersebut kelak ketika

menjadi guru, serta dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan yang berguna dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya.

Sedangkan pengembangan kompetensi bekerja ilmiah melalui kegiatan praktikum berbasis CTL juga memenuhi syarat kedua yaitu membelajarkan keterampilan yang biasa digunakan oleh ilmuwan. Seperti akan diuraikan pada bagian setelah ini pendekatan pembelajaran inkuiri diadopsi oleh Richard Suchman dari prosedur yang biasa digunakan oleh ilmuwan.

Telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kompetensi bekerja ilmiah yang belum memadai. Bukti tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kompetensi bekerja ilmiah melalui penerapan praktikum memenuhi syarat ketiga yang diajukan oleh Lippmann yang terakhir, syarat keempat, juga terpenuhi karena kompetensi bekerja ilmiah memang dapat dikembangkan melalui kegiatan laboratorium.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah aplikasi praktikum berbasis CTL dalam mata kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bekerja ilmiah? (2) Bagaimanakah model yang baik untuk praktikum meteorologi-klimatologi berbasis CTL yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bekerja ilmiah?. Tujuan penelitian ini adalah: a). Ingin membuat model sederhana tentang aplikasi praktikum berbasis CTL yang dapat

meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bekerja ilmiah. b). Untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran dalam mata kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi.

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian tindakan ini adalah mahasiswa SI Program Studi Pendidikan Geografi FIS Unnes Semarang yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi. Lokasi penelitian ini berada di kampus FIS Unnes (di laboratorium Meteorologi-Klimatologi) dan di luar laboratorium (di lapangan). Prosedur atau langkah-langkah kerja dalam penelitian tindakan ini merupakan siklus kegiatan perencanaan-tindakan-observasi/evaluasi-refleksi.

1. Perencanaan

Sebelum dilakukan perencanaan tindakan, terlebih dahulu akan dilakukan diagnosis masalah secara mendalam sehingga diperoleh kelengkapan data untuk mengungkap akar permasalahan dan penyebab utamanya. Diagnosis tersebut akan dilakukan dengan tes dan wawancara terhadap mahasiswa yang menjadi subyek penelitian Berdasarkan hasil diagnosis selanjutnya direncanakan tindakan, yaitu dengan menentukan rancangan operasional kegiatan praktikum berbasis CTL dalam bentuk: (1) rencana acara perkuliahan sebagai panduan untuk dosen (PUD), (2) lembar kerja mahasiswa (petunjuk praktikum), dan (3) rancangan evaluasi/ asesmen otentik untuk mengungkap keberhasilan mahasiswa.

Dalam perencanaan ini, akan dilaku-

kan oleh satu orang dosen sebagai fasilitator dibantu oleh dua orang mahasiswa sebagai asisten dan 2 orang dosen sebagai observer. Dalam perencanaan ini, juga akan ditetapkan jenis jenis indikator kompetensi dalam bekerja ilmiah yang dapat dijadikan sebagai acuan refleksi dan penyusunan perencanaan ulang

2. Tindakan

Perencanaan tindakan yang telah disusun kemudian diaplikasikan dalam kegiatan praktikum di luar laboratorium (mencari data) dan di dalam laboratorium meteorologi-klimatologi. Mahasiswa mengerjakan praktikum yang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu (1) merancang jenis praktikum berbasis CTL baik di lapangan maupun di laboratorium, (2) melaksanakan hasil rancangan praktikum, dan (3) mengkomunikasikan hasilnya. Pelaksanaan dari ketiga kegiatan. itu mengacu pada petunjuk praktikum yang disusun untuk mengembangkan kompetensi dalam bekerja ilmiah.

3. Observasi/evaluasi

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam merancang jenis praktikum berbasis CTL akan dilakukan dengan memeriksa produk rancangan yang mereka buat. Untuk mengukur kompetensi dalam melaksanakan hasil rancangannya, akan dilakukan *performance assessment* melalui observasi menggunakan lembar observasi perilaku (*behavioral observation sheet*). Sedangkan pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil praktikum akan dilakukan dengan memeriksa laporan praktikumnya.

4. Refleksi

Semua data observasi/evaluasi yang terkumpul dianalisis. Data kualitatif dinarasikan sedangkan data kuantitatif dihitung (persentase) dan ditampilkan dalam grafik atau diagram. Hasil analisis data tersebut dimanfaatkan untuk refleksi dengan cara memeriksa kesesuaian antara hasil tindakan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Berdasarkan refleksi ini diharapkan dapat diidentifikasi hal-hal yang sudah baik serta kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki melalui perencanaan ulang yang dilanjutkan dengan tindakan, observasi, dan refleksi ulang. Begitu seterusnya dilakukan secara bersiklus hingga indikator keberhasilan/kompetensi tercapai.

HASIL PEMBAHASAN

Siklus I

Pada langkah awal penelitian, dilakukan diagnosis masalah yang berkaitan dengan praktikum Meteorologi-Klimatologi sehingga diperoleh kelengkapan data untuk mengungkap permasalahan dan penyebab utamanya. Diagnosis tersebut dilakukan dengan tes lesan dan wawancara terhadap mahasiswa yang menjadi subyek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 30 mahasiswa, secara umum ditemukan permasalahan bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum meteorologi-klimatologi relatif pasif dalam kegiatan praktikum karena kurang adanya latihan/tugas yang menuntut latihan/kerja secara aktif dan mandiri.

Pada siklus I, dosen yang bertugas sebagai instruktur dalam penelitian ini

menyampaikan pokok bahasan Peta Curah Hujan. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung di Laboratorium jurusan geografi Fakultas Ilmu Sosial Unnes selama 2 jam. 1 jam pertama digunakan untuk menjelaskan tentang pemanfaatan data curah hujan, teknik pembuatan peta curah hujan, data-data yang digunakan, dan cara melakukan analisis. Selanjutnya 1 jam berikutnya digunakan untuk memberi contoh aplikasi teknik pembuatan peta curah hujan dengan model jaring-jaring Thiessen sebagai model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi belajar mahasiswa, sekaligus supaya nanti mahasiswa dapat melakukan tugas dengan benar dengan menggunakan data peta yang berbeda. Selanjutnya dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang hal yang mungkin belum jelas tentang apa yang disajikan dosen. Di sisi lain 1 orang dosen tim mengamati tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan maksud untuk dapat memberikan masukan kepada mahasiswa maupun dosen instruktur.

Pada pertemuan pembelajaran praktikum berikutnya selama 3 x pertemuan giliran siswa yang lebih aktif dan mandiri. Pada pertemuan pertama dosen menyampaikan tugas pada mahasiswa. Adapun tugas yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Silahkan anda membuat rencana kerja untuk Praktikum Meteorologi-Klimatologi secara mandiri. Carilah data curah hujan setiap kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan berkunjung ke BMKG atau BPS.
- b. Agar lebih efektif proses pembelajaran ini, silahkan anda membuat kelompok

kecil. Masing-masing kelompok maksimal 5 orang. Silahkan diskusikan dengan teman dalam kelompok anda, cara yang mana yang akan saudara tempuh dalam mencari data.

Pada pertemuan pembelajaran berikutnya (pertemuan kedua), mahasiswa diminta bekerja di Laboratorium Meteorologi-Klimatologi. Pada pertemuan ini mahasiswa mulai bekerja dengan mengklasifikasikan data curah hujan yang didapat menjadi 3 kelas, yaitu di atas normal, normal, dan di bawah normal dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

1. Di atas normal (AN)

$$x > x + \frac{1}{2} SD$$

2. Normal (N)

$$x - \frac{1}{2} SD \leq x \leq x + \frac{1}{2} SD$$

3. Bawah Normal (BN)

$$x \leq x - \frac{1}{2} SD$$

Catatan:

- X = curah hujan bulan x
 X = curah hujan rata-rata bulanan
 SD = Standar Deviasi

$$SD = \sqrt{\frac{(x - x)^2}{N}}$$

Pada pertemuan pembelajaran berikutnya (pertemuan ketiga), mahasiswa diminta bekerja di Laboratorium Meteorologi-Klimatologi. Adapun tugas pembelajaran yang diberikan dosen adalah sebagai berikut:

- a. Tuliskan masing-masing data curah hujan di tiap kota /kabupaten.

- b. Hubungkan tiap titik dengan model jaring-jaring Thiesen.
- c. Generalisasi garis-garis/jaring-jaring tersebut ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu di atas normal, normal, dan di bawah normal.
- d. Arsir dengan tiga tipe yang berbeda peta curah hujan tersebut sesuai dengan klasifikasinya.
- e. Analisislah peta tersebut mengapa di wilayah-wilayah tersebut memiliki curah hujan normal, di atas normal atau di bawah normal.

Berdasarkan hasil pengamatan memperlihatkan bahwa proses belajar mengajar berlangsung seperti apa yang ada dalam SAP. Pada prinsipnya terlihat dosen memberikan informasi yang bersifat konsep dasar dan contoh sederhana dalam praktikum Meteorologi-Klimatologi, sehingga relatif mudah diterima. Selanjutnya Dosen memberikan tugas yang menuntut siswa untuk aktif dan harus mau bekerja mandiri atau dalam kelompok kecil. Tugas yang diberikan dosen sifatnya terbuka dalam arti memberi kebebasan pada siswa untuk menentukan sendiri apa yang dia inginkan. Seperti pada tugas mencari data, mahasiswa diberi kebebasan mencari data.

Hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran siklus I adalah sebagian mahasiswa masih ada yang belum dapat mengimplementasikan pembuatan jaring-jaring Thiesen dalam peta, sehingga mereka merasa kesulitan. Walaupun dosen instruktur sudah mendemonstrasikan atau memberi contoh sampai dengan peta jadi. Kesulitan tersebut sangat terlihat sekali ketika mahasiswa harus memilih titik-titik yang

akan dihubungkan dengan garis/jaring dan membagi dua garis tersebut sehingga menjadi sebuah jaringan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis terhadap aktivitas mahasiswa dalam melaksanakan tugas ini adalah sebagai berikut: dari 30 mahasiswa yang diteliti (peserta kuliah praktikum meteorologi-klimatologi) menunjukkan bahwa: (a) 17 mahasiswa (56,7%) masih kebingungan cara penggambaran jaring-jaring Thiesen ke dalam peta. Hanya terdapat 13 mahasiswa (43,3%) yang paham dan mampu mengimplementasikan pembuatan peta dengan jaring-jaring Thiesen.

Mengatasi hambatan yang terjadi pada siklus I ini, maka diadakan refleksi yang berupa kegiatan diskusi bersama antara tim dosen peneliti dengan tim dalam penelitian ini. Hasil diskusi disepakati adanya beberapa alternatif yang perlu dilakukan guna memecahkan masalah yang dihadapi, antara lain: 1). Peninjauan kembali satuan acara perkuliahan dosen, 2) perlu diberikan informasi tentang cara pemberian skor yang baik, dan informasi buku panduan untuk memberi kriteria dan pembuatan peta curah hujan yang baik dan benar. Alternatif pemecahan masalah ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kinerja mahasiswa yang diteliti sehingga mengalami peningkatan dalam kompetensi bekerja ilmiahnya melalui penerapan praktikum berbasis CTL.

Siklus II

Pada siklus ke dua merupakan proses pembelajaran perbaikan, tetap dilakukan di laboratorium Meteorologi-Klimatologi Jurusan Geografi FIS Unnes. Dosen yang

bertugas sebagai instruktur dalam penelitian ini menyampaikan pokok bahasan pembuatan peta curah hujan. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung selama 2 jam. 1 jam pertama digunakan untuk perbaikan, yaitu menjelaskan kembali tentang teknik pembuatan peta curah hujan menggunakan jaring-jaring Thiesen. Selanjutnya 1 jam berikutnya digunakan untuk menjelaskan langkah operasional dalam pembuatan peta dan mempraktikkan cara pembuatannya.

Berdasarkan pengamatan tim dosen yang jadi observer, pada siklus ke 2, ternyata banyak mahasiswa yang bertanya pada waktu dosen menjelaskan materi. Adapun inti pertanyaannya berkisar pada bagaimana dapat melakukan atau membuat jaring-jaring Thiesen dalam peta sampai menjadi peta utuh curah hujan. Semua pertanyaan dapat dijelaskan dengan baik oleh dosen instruktur, sehingga dosen instruktur ganti bertanya, adakah yang masih tidak jelas yang perlu ditanyakan lagi?. Ternyata tidak ada mahasiswa yang bertannya lagi.

Pada proses pembelajaran praktikum berikutnya, selama 2 x pertemuan giliran mahasiswa yang lebih aktif dan mandiri . Pada pertemuan pertama dosen menyampaikan tugas pada mahasiswa. Adapun tugas yang disampaikan sama seperti pada tugas yang disampaikan dosen pada siklus pertama. Dosen instruktur hanya menyarankan jika ada kesulitan dalam pembuatan peta silahkan bertanya kepada teman yang sudah paham dan bisa. Begitu juga, jika ada kesulitan dalam pembuatan klasifikasi curah hujan.

Hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran siklus I kelihatannya sudah tidak terjadi lagi. Sebagian mahasiswa yang

semula belum dapat mengimplementasikan, pada siklus 2 ini hampir sebagian besar sudah mampu menghitung klasifikasi curah hujan dan membuat peta curah hujan model jaring-jaring Thiesen. Namun sekali-sekali beberapa mahasiswa masih berdiri berjalan-jalan dari tempat duduknya menuju tempat duduk temannya untuk bertanya sesuatu.

Pada Siklus ke 2, analisis terhadap aktivitas mahasiswa dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut: dari 30 mahasiswa yang diteliti (peserta kuliah praktikum Meteorologi-Klimatologi) menunjukkan bahwa: 25 mahasiswa (83,3%) sudah mampu membuat peta curah hujan dengan teknik jaring-jaring Thiesen. Masih ada 5 mahasiswa (16,7%) yang kelihatan masih bingung dengan langkah-langkah kerja pembuatan peta curah hujan.

Dengan demikian maka, pada siklus II, proses pembelajaran hasilnya sudah berada di atas indikator keberhasilan penelitian yang ditetapkan, yaitu sekurang kurangnya 75 % dapat membuat peta curah hujan dengan model jaring-jaring Thiesen atau mahasiswa yang diteliti mengalami peningkatan dalam kompetensi bekerja ilmiahnya melalui penerapan praktikum berbasis CTL.

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, maka kegiatan pembelajaran untuk siklus berikutnya sudah tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain penelitian tentang Aplikasi Praktikum Berbasis CTL Dalam Mata Kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi Untuk Meningkatkan Kompetensi Bekerja Ilmiah Pada Mahasiswa yang berupa penelitian tindakan kelas dapat diakhiri pada siklus II.

Kelemahan atau kesulitan yang dihadapi pada siklus II adalah bagaimana

membuat jaring-jaring Thiesen. Untuk mengatasi masalah ini, dosen memberikan langkah-langkah penggambaran peta secara detail. Setelah beberapa kali uji coba dan demonstrasi akhirnya mahasiswa bisa menggambar peta curah hujan dengan menggunakan teknik jaring Thiesen. Pada siklus ini sebanyak 25 mahasiswa (83,3%) mampu dan bisa menggambar peta curah hujan dengan teknik Thiesen. Adapun 5 mahasiswa (16,7%) masih kesulitan mengalaminya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan terhadap 30 mahasiswa peserta praktikum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada siklus pertama, 17 mahasiswa (56,7%) masih kebingungan cara menghitung klasifikasi curah hujan dan membuat peta curah hujan dengan teknik jaring-jaring Thiesen. Sedangkan 13 mahasiswa (43,3%) sudah paham terhadap perhitungan dan cara pembuatan peta curah hujan dengan jaring-jaring Thiesen. Pada Siklus kedua, menunjukkan bahwa: terjadi peningkatan akan kompetensi yang diraih mahasiswa dalam kuliah Praktikum Meteorologi-Klimatologi dengan dibuktikan meningkatnya atau bertambahnya mahasiswa yang bisa menghitung klasifikasi curah hujan dan membuat peta curah hujan dengan jaring Thiesen. Sebanyak 25 mahasiswa (83,3%) sudah bisa dan 5 mahasiswa (16,7%) yang belum memahami langkah-langkah perhitungan dan pembuatan peta tersebut. Melalui praktikum yang berbasis pendekatan CTL akan menuntut siswa untuk lebih aktif, dan melalui Lembar Kerja Mahasiswa akan

dapat meningkatkan kompetensi bekerja ilmiah pada mahasiswa jurusan geografi.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan: Penerapan praktikum Meteorologi-Klimatologi berbasis CTL akan dapat meningkatkan kompetensi bekerja ilmiah pada mahasiswa, perlu didorong atau diimplepentasikan pada mata kuliah praktikum yang lain. Pelaksanaan praktikum Meteorologi-Klimatologi berbasis CTL akan dapat meningkatkan kompetensi bekerja ilmiah pada mahasiswa, apabila dosen atau asisten mengarahkan mahasiswa dan mengadakan tindakan seperlunya.

DAFTAR RUJUKAN

- Heriyanto, 2005., Contextual Teaching And Learning (Pembelajaran Kontekstual), *Makalah*, Disajikan Pada Semiloka Kurikulum Berbasis Kompetensi, Contextual Teaching And Learning dan Life Skill, Tanggal 14-15 Februari Di FIS UNNES.
- Lawson, A.E. 1995. *Science Teaching and the Development of Thinking*. California: Wadsw Publishing Company.
- Suharyono, 2000, Geografi Dalam Pendidikan dan Pengajaran; Realita, Tantangan dan Harapan, *Makalah*, Seminar dan Lokakarya Nasional Dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geografi Indonesia, 21-22 November 2000, Universitas Negeri Semarang.

PENGARUH PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMA NEGERI 3 REMBANG

Badrus Sholeh

Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

problem based instruction, critical thinking and achievement learning.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerapan pembelajaran berbasis masalah dibandingkan pembelajaran berbasis ceramah. Metode yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain faktorial 2x2. Populasi penelitian adalah 272 siswa remaja kelas SMA Negeri 3 Rembang di tahun akademik 2013/2014. Sampel penelitian yang diambil adalah 152 siswa, yang dirinci menjadi 76 siswa untuk kelas eksperimen. Sampel diambil dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan test. Teknik analisis data yang digunakan, adalah dua analisis cara varian (ANOVA) pada tingkat signifikansi = 0,05.

Analisis menunjukkan bahwa: (1) Ada perbedaan antara penggunaan instruksi berbasis masalah dan metode ceramah terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa remaja kelas SMA Negeri 3 Rembang di tahun akademik 2013/2014, hasilnya dapat ditampilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $41,707 > 3,84$ pada signifikan level 5% dengan $db = 1$. (2) Ada perbedaan antara siswa siswa yang memiliki pemikiran kritis yang tinggi dan berpikir kritis rendah pada prestasi siswa di subjek ekonomi dari siswa remaja kelas SMA Negeri 3 Rembang di tahun akademik 2013/2014 kebenaran diuji dapat ditampilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18,117 > 3,84$ pada signifikan level 5% dengan $db = 1$. (3). Ada pengaruh interaksi pada penggunaan instruksi berbasis masalah pada prestasi siswa di subjek ekonomi dari siswa remaja kelas SMA Negeri 3 Rembang di 2013/2014 tahun akademik, kebenaran diuji dapat ditampilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $9,500 > 3,84$ pada db tingkat signifikan = 1. Hasil uji Scheffe menunjukkan berbagai rerata antara siswa yang memiliki pemikiran kritis yang tinggi, mendapatkan prestasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang memiliki pemikiran kritis rendah.

Abstract

The aims of this research method used is quasi-experiment with a 2x2 factorial design. Research population is 272 of teen grade students of SMA Negeri 3 Rembang in 2013/2014 academic year; he research sample taken is 152 student, which is detailed into 76 students for experiment class. Samples were taken by random sampling technique. The data collection techniques used are documentation and test. The techniques of data analysis used, is two way varian analysis (ANOVA) at significance level $\alpha = 0.05$.

The analysis shows that : (1) There is differences between the use of problem based instruction and lecturing method on the student's

achievement at economy subject of the teen grade students of SMA Negeri 3 Rembang in 2013/2014 academic year, the result can be shown $F_{count} > F_{table}$ or $41.707 > 3.84$ at significant level 5% with $db=1$. (2) There is differences between students students who have high critical thinking and low critical thinking on the student's achievement at economy subject of the teen grade students of SMA Negeri 3 Rembang in 2013/2014 academic year the tested truth can be shown $F_{count} > F_{table}$ or $18.117 > 3.84$ at significant level 5% with $db=1$. (3) There is influence interaction on the use of problem based instruction on the student's achievement at economy subject of the teen grade students of SMA Negeri 3 Rembang in 2013/2014 academic year, the tested truth can be shown $F_{count} > F_{table}$ or $9.500 > 3.84$ at significant level $db=1$. The result of the scheffe test shows a various average among the students who have a high critical thinking get a higher learning achievement than students who have a low critical thinking.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
badrusteacherpreneur@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia karena dengan pendidikan manusia bisa menguasai kemampuan. Sesuai yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Bab 1, pasal 1 ayat 1).

Beberapa hal dari pasal diatas bahwa konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut; *Pertama*, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. *Kedua*, proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. *Ketiga*, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta

didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran; anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2011;1).

Lebih lanjut, menurut Puskur Balitbang Depdiknas (2003:539) bahwa tujuan mata pelajaran ekonomi SMA adalah memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa dan

masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dalam lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan Negara.

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi
3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan Negara.
4. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA, salahsatu tujuannya adalah membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan ilmu ekonomi. Untuk mencapai salahsatu tujuan tersebut melalui kemampuan berpikir kritis khususnya dalam mata pelajaran ilmu ekonomi. Berpikir kritis dapat diterapkan dalam mata pelajaran ekonomi, Liliyasi (2007:8) berpikir kritis dapat berguna secara kritis mengevaluasi apa yang dipelajari dikelas. Hal ini dapat menolong untuk berdiskusi dengan sesama siswa maupun guru. Bagi guru kemampuan berpikir kritis dapat menolong untuk berargumentasi dengan baik, ketika memberikan penjelasan kepada siswa.

Berdasarkan hasil survei pada siswa kelas X SMA 3 Rembang tahun ajaran

2013/2014 menemukan banyak permasalahan dikelas tersebut seperti: Proses pembelajaran didalam kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, dimana metode konvensional menjadikan pilihan utama proses pembelajaran, proses pembelajaran di kelas X SMU negeri 3 rembang kurang melibatkan aktifitas berpikir siswa, banyak siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran dikelas.

Untuk mengatasi masalah diatas, guru dituntut dapat mencari dan menumbuhkan suatu cara yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir peserta didik. Model pembelajaran yang sejalan untuk melatih kemampuan berpikir kritis adalah dengan model pembelajaran pemecahan masalah (*problem base instruction*) merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apakah ada perbedaan penerapan pembelajaran berbasis masalah dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/ 2014 ? 2) Apakah ada perbedaan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dengan kemampuan berpikir kritis rendah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/ 2014 ?, 3) Apakah ada interaksi antara penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014?

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerapan pembelajaran berbasis masalah dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014, 2) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan berpikir kritis rendah terhadap prestasi belajar mata pelajaran siswa kelas X SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. 3) untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Rembang. Pelaksanaan penelitian dilakukan bulan November-oktober-desember 2013. Penelitian ini menggunakan eksperimen semu karena peneliti tidak mungkin menempatkan subyek secara acak kedalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok Eksperimen siswa mendapat perlakuan dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran metode ceramah.

Tujuan rancangan penelitian adalah penggunaan metode yang tepat, dirancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang diteliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan

yang akan diteliti, penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan "*Randomized Group, pretest-posttest design*", (Sigit Santosa. 2011:40). Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2X2, dengan maksud untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Populasi untuk penelitian ini adalah siswa SMA 3 Negeri Rembang kelas X tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 272 yang terbagi kedalam delapan kelas. Peneliti mengambil 272 sampel siswa dengan tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 87:2009). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *simple random sampling*. Setelah pengundian dilakukan didapatkan bahwa terdapat siswa untuk dua kelas kontrol yakni masing-masing 76 siswa dan dua kelas eksperimen masing-masing 76 sehingga jumlah total sampel penelitian ini 152 siswa.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel penelitian, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan berpikir kritis. Variabel terikat dalam penelitian adalah prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan tes. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui keadaan sekolah berupa data siswa penelitian, RPP, silabus dan hasil belajar. Sedangkan tes objektif prestasi belajar berjumlah 40 soal dan tes kemampuan berpikir kritis siswa berjumlah 25 soal. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode statistik, yaitu Analisis varian Dua Jalur (ANAVA).

HASIL PEMBAHASAN

Penghitungan hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik Anava Dua Jalan.

Tabel. 1. Hasil Uji Anava Dua Jalan

Sumber variansi	Jk	Dk	RK	Fhit	Keputusan
Kolom (A)	183.411	1	183.411	41.707	Ditolak
Baris (B)	79.674	1	79.674	18.117	Ditolak
Interaksi (AB)	41.779	1	41.779	9.5	Ditolak
Galat	650.85	148	650.85	4.398	
Total	969.204	151	-	-	

sumber : Data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 1 diatas hasil uji anava dua jalan frekuensi sel tak sama didapatkan perbandingan Fhit dengan Ftab sebagai berikut:

1. $F_{hit} > F_{tab}(0.05)$ atau $41.707 > 3.84$
= signifikan
2. $F_{hit} > F_{tab}(0.05)$ atau $18.117 > 3.84$
= signifikan
3. $F_{hit} > F_{tab}(0.05)$ atau $9.500 > 3.84$
= signifikan.

Dari perbandingan Fhit dengan Ftable tersebut, maka hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama
HoA ditolak berarti pembelajaran berbasis masalah dapat menghasilkan prestasi belajar ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah di SMA negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014.

Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya model pembelajaran yang

digunakan guru dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kehidupan yang yang membutuhkan penyelesaian nyata, sehingga masalah dapat dinilai, dianalisis dan dicari pemecahannya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan metode ceramah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Gamze Sezgin Selcuk (2010), Ada pengaruh pembelajaran berbasis masalah pada prestasi siswa pada fisika. Sri Wahyuni (2009) prestasi belajar matematika siswa yang diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari prestasi belajar matematika siswa yang diberi pembelajaran

konvensional. Lebih lanjut menurut Darmawan (2010:108) penerapan pembelajaran berbasis masalah mengharuskan pelajar untuk menemukan jawabannya tanpa bantuan khusus, dengan memecahkan masalah sendiri pelajar menemukan aturan yang lebih tinggi tarafnya sekalipun ia tidak dapat merumuskan aturan secara verbal. memberikan hasil yang lebih unggul yang digunakan dalam situasi-situasi lain, karena itu bagi pendidikan sangatlah penting untuk mendorong anak menemukan penyelesaian soal dengan pemikiran sendiri. penyelesaian masalah banyak berhubungan dengan kecakapan intelektual siswa.

2. Hipotesis kedua

HoB ditolak berarti siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi menghasilkan prestasi belajar ekonomi yang lebih tinggi di SMA negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014.

Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis siswa berbeda-beda dalam memaknai materi yang sudah diajarkan guru kepadanya. Siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah, karena siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi akan lebih membawa dirinya dalam

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Begitu pula sebaliknya siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah cenderung mengalami kesulitan menerima materi. Hal inilah yang mempengaruhi prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah.

Hasil penelitian Atefeh Kamei dan Mokhtar Weiseni (2013) mendukung temuan diatas, yakni ada korelasi positif antara kemampuan berpikir kritis dengan prestasi akademik. Kemampuan berpikir kritis dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Adi W Gunawan (2012:171) ada tiga hal perlunya kemampuan berpikir kritis: 1) untuk mengerti informasi, 2) untuk proses berpikir yang berkualitas, 3) untuk hasil akhir yang berkualitas.

3. Hipotesis ketiga

HoAB ditolak berarti ada interaksi antara penerapan pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar ekonomi di SMA negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014.

Keberhasilan siswa dalam memperoleh prestasi belajar sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis tinggi akan mendapatkan prestasi belajar yang baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah. Penerapan

model pembelajaran berbasis masalah dengan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran dimaksudkan agar siswa terlibat langsung dan dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran.

Ahmad Abu Hamid (2008: 14) mengungkapkan pembelajaran berbasis masalah sangat efektif untuk mengajarkan proses berpikir tingkat tinggi, membantu murid memproses informasi yang telah dimiliki dan membangun sendiri pengetahuannya. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa aktif dalam proses pembelajaran, meskipun begitu digunakan model pembelajaran yang sama dengan kemampuan berpikir kritis yang berbeda akan diperoleh prestasi belajar yang berbeda pula. Sehingga dapat dikatakan antara model pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan berpikir kritis siswa ada interaksi walaupun kemampuan berpikir kritis siswa yang dimiliki siswa berbeda-beda. Hasil penelitian sesuai dengan

temuan Laili Mahmudah (2013) menunjukkan bahwa ada interaksi antara metode *pictorial riddle* dan *problem solving* dengan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar kognitif dan afektif, tetapi tidak ada interaksi terhadap prestasi belajar psikomotorik. Lebih lanjut Darmawan (2010) hasil penelitian deskripsi kemampuan guru dalam mengembangkan pola pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran IPS menunjukkan perubahan dalam proses belajar mengajar, hasil kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran berbasis masalah semakin baik, siswa mampu mengepresikan mengemukakan pendapat dan memahami.

Uji Lanjut Anava

Uji lanjut digunakan untuk mengetahui kebermaknaan dari antara kolom A (model pembelajaran berbasis masalah) dan antara baris (kemampuan berpikir kritis), maka dapat dilanjutkan dengan uji *scheffe*. Berdasarkan hasil uji lanjut anavat: dapat diketahui rangkuman sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Lanjut Anava

Komparasi	Fhit	Ftab	Keterangan
Fj-j(a1-a2)	18.106	3.84	Ditolak
Fi-i(b1-b2)	7.865	3.84	Ditolak
Fji-jk(a1b1-a1b2)	13.07	3.84	Ditolak
Fji-jk(a1b1-a2b1)	22.089	3.84	Ditolak
Fji-jk(a1b1-a2b2)	28.413	8.04	Ditolak
Fji-jk(a1b2-a2b1)	1.154	8.04	Diterima
Fji-jk(a1b2-a2b2)	2.765	8.04	Diterima
Fji-jk(a2b1-a2b2)	0.334	8.04	Diterima

Sumber : Data yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil uji *Scheffe* pada tabel diatas dapat diketahui:

- a. Komparasi antara kolom atau A yaitu model pembelajaran, HoA ditolak karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18.106 > 3.84$. Hal ini berarti terdapat beda rerata yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi bab permintaan, penawaran dan harga keseimbangan dengan pembelajaran berbasis masalah dibanding dengan siswa yang diberi metode ceramah.
- b. Komparasi antara baris atau B yaitu kemampuan berpikir kritis, HoB ditolak karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $7.865 > 3.84$. Hal ini berarti terdapat beda rerata yang signifikan antara prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dibanding dengan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah.
- c. Interaksi antara kolom dan baris atau AB yaitu model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis. Hasil uji perhitungan menunjukkan sebagian besar antara kemampuan berpikir kritis dan model pembelajaran yang berarti ada beda rerata yang signifikan interaksi antara kemampuan berpikir kritis dan model pembelajaran.

Pembahasan Uji Lanjut Anava

Uji *scheffe* model pembelajaran

Berdasarkan hasil uji *scheffe* menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18.106 > 3.84$, sehingga H_0 uji lanjut

ditolak. Dengan demikian, ada perbedaan rerata prestasi belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan metode ceramah. Siswa yang diberi model pembelajaran berbasis masalah menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang diberi metode ceramah. Hal ini dapat diketahui dari rerata prestasi belajar siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014 yang diberi pembelajaran berbasis masalah 31.82 lebih besar dari rerata prestasi belajar yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah yaitu 29.54.

Temuan ini semakin diperkuat dengan penelitian Sadia (2007) yang mengungkapkan bahwa proses pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah dan dilanjutkan dengan analisis masalah dalam kelompok-kelompok kecil sampai penemuan konsep, ataupun prinsip untuk memecahkan masalah merupakan wahana yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi belajar. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan teori Arends (2008:41) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah mendukung pemikiran tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah seperti pembelajaran proyek, pendidikan berdasarkan pembelajaran berakar pada kehidupan nyata. Peran guru dalam pembelajaran ini mengajukan masalah, pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Orhan Akinoglu dan Ruhan Ozkardes Tandogan (2006) menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah yang digunakan lebih berhasil daripada kelompok kontrol dengan metode pengajaran tradisional yang diterapkan.

Uji *scheffe* kemampuan berpikir kritis

Berdasarkan hasil perhitungan uji *scheffe* didapatkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $7.865 > 3.84$, sehingga H_0 uji lanjut ditolak. Dengan demikian ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan berpikir kritis rendah siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. Siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi akan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah.

Temuan ini diperkuat oleh Hadi Santosa (2008) terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar, dimana siswa yang memiliki berpikir kritis tinggi memberikan rata-rata prestasi belajar pada ranah kognitif yang lebih tinggi dibanding siswa yang memiliki berpikir kritis rendah. Lebih lanjut temuan tersebut diperkuat dengan penelitian Fahrurrazi (2011) siswa yang pembelajaran matematikanya dengan model pembelajaran berbasis masalah memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dari siswa dengan pembelajaran konvensional. siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan dapat bertindak secara normatif, menggunakan kemampuan nalarnya tentang sesuatu yang dilihat, didengar atau pikirkan serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Uji *secheffe* interaksi model pembelajaran dan berpikir kritis

Berdasarkan pada hasil perhitungan uji *scheffe* sebagian besar menunjukkan bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$, H_0 uji lanjut yang berbunyi “ada beda rerata prestasi belajar siswa kelas

X di tinjau dari interaksi model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis siswa” ditolak. Berarti ada perbedaan prestasi belajar siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. Sebagian yang lain hasil H_0 diterima, berarti tidak ada rerata prestasi belajar siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014.

Berdasarkan hasil perhitungan komparasi antar sel A1B1-A1B2 didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $13.070 > 3.84$, H_0 uji lanjut ditolak. Artinya prestasi belajar yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah.

Berdasarkan pada hasil perhitungan komparasi antara sel A1B1-A2B1 didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $22.089 > 8.04$, H_0 uji lanjut ditolak, artinya antara prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tinggi.

Berdasarkan pada hasil perhitungan interaksi antara sel A1B1-A2B2 didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $28.413 > 8.04$, H_0 uji lanjut ditolak, artinya antara prestasi belajar siswa yang diberi model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki perbedaan

yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah.

Berdasarkan pada hasil perhitungan komparasi antara sel A1B2-A2B1 didapat nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $1.154 < 8.04$, H_0 AB uji lanjut diterima, artinya antara hasil prestasi belajar siswa yang diberi model pembelajaran ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah.

Berdasarkan pada hasil perhitungan komparasi antara sel A1B2-A2B2 didapat nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $2.765 < 8.04$ H_0 AB uji lanjut diterima, artinya antara prestasi belajar siswa yang diberi model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah.

Berdasarkan pada hasil perhitungan komparasi antara sel A2B1-A2B2 didapat nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $0.334 < 8.04$., H_0 AB uji lanjut diterima, artinya antara prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran metode ceramah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis rendah.

Trianto (2009:92) bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pembelajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini

membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dibenaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia dan sosialnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar atau kompleks. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fred C Lunenberg (2011:8) bahwa kemampuan berpikir kritis dan konstruktivisme terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa disemua tujuan pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas X di SMA Negeri Rembang tahun ajaran 2013/2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang diberi penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran metode ceramah di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. Hipotesis 1 terbukti, hal ini ditunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $41.707 > 3.84$ pada taraf signifikansi 5%. Siswa yang diberi model pembelajaran berbasis masalah lebih aktif dan kreatif dalam menghadapi soal.
2. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa kelas X yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. Hipotesis 2 terbukti, hal ini dapat ditunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $18.117 > 3.84$ pada taraf signifikansi 5%.
3. Terdapat interaksi penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa kelas X di SMA Negeri 3 Rembang tahun ajaran 2013/2014. Hipotesis 3 terbukti, hal ini dapat ditunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $9.500 > 3.84$ pada taraf signifikansi 5%. Apabila pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran yang sesuai dan siswa didukung dengan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa maka akan menghasilkan prestasi belajar yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Riasat. 2010. Effect of Using Problem Solving Method in Teaching Mathematics on The Achievement Mathematics Students. *Asian Science Journal*, 6(2) 67-62. (online) <http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/5040> di akses 14 maret 2013.
- Anderson, Lorin W. 2001. *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Assesmen*. Translated by Prihantoro, Agung. 2010. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Akinoglu, O dan Tandogan, R.O. 2007. The Effects of Problem Based Active Learning in Science Education on Students Academic Achievement, Attitude and Concept Learning. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Techonology Education*, 2007, 3(1), 71-81. (online) <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495669.pdf> di akses tanggal 14 maret 2013.
- Atefeh Kamei dan Mokhtar Weiseni. 2013. *'The Realitionship Between Achievement Motivation, Critical Thinking and Creative Thinking with Academic Performance*. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences* Vol3 (4) 2013. (online) http://www.cibtech.org/J%20LIFE%20osciences/publications/2013/Vol_3_No_4/JL S - 1 8 - 1 5 - a t e f e h - t h e - p e r f o r m a n c e . p d f di akses tanggal 14 maret 2013.
- Depdiknas. 2003. *Standart Kompetensi Mata Pelajaran Ekonomi SMA dan Aliyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Darmawan. 2010. *Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Berpkir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPS di MI Darussaadah Pandeglang*. Jurnal penelitian pendidikan. 1 (11): 108-109.
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Gamze Sezgin Selcuk. 2010. The Effects of Problem Based Learning on Pre Service Teacher Achievement, Approaches and Attitudes Towards Learning Physics. (online) http://boltz.ccne.ufsm.br/pub/mpeac/other/selcu_i jps_vol5_2010.pdf di akses 14 maret 2013.

- Gunawan, Adi W. 2003. *Genius Learning Strategy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ennis,RH. 2011. *The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities*.University of Illinois.
- Ennis, RH. 1995. *Critical Thinking*.United States of America :Prentice hall.
- Hadi Santosa. 2008. Pengaruh Penggunaan Laboratorium Riil dan Lobaratorium Virtuuil pada Pembelajaran Fisika dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Tesis Pascasarjana UNS:Tesis tidak diterbitkan.
- Hassoubah, Zaleha Izhab. 2002. *Mengasah Pikiran Kreatif dan Kritis*. Bandung: Nuansa.
- Jauhar, Muhammad. 2011. *Implementasi PAIKEM dari Behavioristik sampai Konrutivistik*. Jakarta :Prestasi Pustaka.
- John R Mergondoller et al. 2006. *The Effectiveness of Problem Based Instruction : A Comparative Study of Instructional Methods and Student Characteristic*. *Interdisiplinary Journal Problem Based Instruction Vol 1 (2) 2006*.
- Laili Mahmudah. 2013. *Pembelajaran Fisika Menggunakan Metode Pictorial Riddle Dan Problem Solving Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemampuan Analisis (Pembelajaran Fisika Materi Pembelajaran Getaran Dan Gelombang Kelas VIII Semester Ii Di SMP Negeri 3 Natar Tahun 2012/2013*. Tesis, Tidak diterbitkan, Surakarta : Program Pascasarjana UNS.
- Lunenberg, Fred. C. 2011. Critical Thinking and Conructicvism Techniquies For Improving Student Achievment. *National Forum Education Journal Vol 21(3)*.
- Liliasari. 2007. *Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sains Kimia Menuju Profesionalitas Guru*. Bandung: Sekolah Pasca sarjana UPI.
- Lisa, Gueldenzhop Snyder. 2008. *Teaching Critical Thinking Skill and Problem Solving Skill*. *The Delta Pi Epsilon Journal*. L(2):1.
- Rosyada, Dede. 2007. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta : Kencana.
- Santrock, John W. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Terj: Tri Wibowo Jakarta:Salemba Humanika.
- Sadia, I.W. 2007. *Pengembangan Berpikir Formal Siswa SMA Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Cycle Learning dalam Pembelajaran Fisika*. Pendidikan dan pengajaran UNDIKSHA,1 (1):1-20.
- Sanjaya, wina. 2011. *Strategi Pembelajaran Beroirentasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Santosa, Sigit. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Surakarta: UNS Pers.
- Sudjana, Nana. 2006. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya Sugiyono, 2009.

Statistik. Untuk Penelitian. Bandung:
Alfa Beta Offset.

Trianto. 2009. *Model-model Pembelajaran Inovatif Beroorientasi Konstruktivistik.* Jakarta : Prestasi pustaka.

Wahyuni, Sri 2009. *Eksperimentasi Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah Pada Sub Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Ditinjau dari aktivitas Belajar Siswa Kelas X SMK Se-Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009.* Tesis, Tidak diterbitkan, Surakarta : Program Pasca Sarjana UNS.



METODE PEMBELAJARAN TGT DENGAN BERMAIN ULAR TANGGA (UTANG) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PPKNMATERI PELANGGARAN HAM PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Dargito

Guru PPKn SMA Negeri 1 Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

TGT, Snakes and ladder games media, Result of Study.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn materi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran TGT dengan bermain Utang (ular tangga) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 1 Semarang, sebanyak 470 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 siswa yang terdiri dari seluruh siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa skor rerata aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat meningkat dari 70,33 % menjadi 85,55 % mengalami kenaikan sebesar 15,22 %. Skor rerata aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran mengalami penurunan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama rerata skor aktivitas siswa yang tidak relevan sebesar 21,26 %, sedangkan pada siklus kedua sebesar 9,25 % mengalami penurunan sebesar 12,01 %. Skor rerata pemahaman siswa tentang masalah Hak Asasi Manusia, pada siklus pertama sebesar 7,01 % dan pada siklus kedua pada siklus kedua 7,80 %, tergolong baik demikian juga tentang penuntasan belajar pada siklus pertama 74,82 % dan pada siklus kedua menjadi 89,96 %.

Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran TGT dengan bermain Utang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran siswa kelas X SMA Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2013/2014.

Abstract

This study aims to determine the significant differences in Citizenship learning result among students who were taught with TGT learning model by snakes and ladders games versus the students taught conventionally in first grade students at SMA Negeri 1 Semarang in academic year 2013/2014. This study was action research class. The population in this study was the first grade students of SMA Negeri 1 Semarang, with 470 students. The sample in this study were 39 students, which consisted was X MIA 2 students of SMA Negeri 1 Semarang. Data collection was done by the

testing method. At the first cycle, the brave of students increase 15,22 %. The mean of activity those are not relevant decrease at the second cycle at 12.01%. The score of students in material Human Rights is good.

It proves that the application of TGT learning model by snakes and ladder games make the influence of Citizenship learning result of the first grade students of SMA Negeri 1 Semarang in academic year 2013/2014.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi

.....

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan terus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya seperti pelajaran diujikandalam UAN (Ujian Akhir Nasional). PPKn kurang diminati karena dikaca mata anak PPKn tidak begitu diperhitungkan dalam persyaratan kelulusan akhirnya anak menerima pelajaran

PPKn adanya. Akhirnya Siswa mempunyai kecenderungan tidak begitu tertarik dengan pelajaran PPKn karena selama ini pelajaran PPKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar PPKn siswa di sekolah.

Secara umum Mata Pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang kurang favorit bagi siswa terlihat dalam pembelajaran, guru dan siswa masih menggunakan model ceramah saja, sehingga siswa kurang berminat mendengarkan penjelasan guru, cenderung pasif bahkan sering ribut sendiri yang berakibat nilai yang memenuhi standar KKM (80) hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas X MIA 2 SMA Negeri 1 Semarang dengan jumlah 39 siswa yang kompeten orang yaitu mencapai ketuntasan belajar rata-rata ulangan harian sebesar 77,42. Ketentuan KKM yang harus dicapai adalah 78 atau B. Disin menunjukkan untuk nilai rata kelas belum mencapai seperti yang diharapkan dalam KKM. Menurut Suyatno (2009:60), “metode konvensional berupa ceramah, memusatkan perhatian siswa sepenuhnya kepada guru sehingga yang aktif di sini hanya guru. Adapun siswa hanya tunduk mendengarkan penjelasan yang

dipaparkan oleh guru.” Hal senada juga dikemukakan oleh Sanjaya (2011:179) yang menyatakan bahwa “strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.”

Dalam pembelajaran ini, guru berperan aktif untuk menyampaikan materi pembelajaran dan tidak memberikan akses bagi siswa untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Pembelajaran seperti ini tentu saja tidak dapat mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah memperoleh pengalaman belajar PPKn.

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan interaksi dan berpartisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Menurut Trianto (2010:58) “pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya.” Dengan model ini siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kreatif, dan kritis serta kemampuan untuk bekerjasama. Siswa diajarkan keterampilan-keterampilan khusus seperti: berdiskusi, mengemukakan pendapat disertai alasan, menanggapi pendapat orang lain, mengevaluasi pendapat orang lain serta mampu membuat keputusan yang tepat.

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah satunya adalah TGT. Menurut Komalasari (2010:67) “model pembelajaran TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, Di dalam TGT diharapkan adanya proses pembelajaran dengan baik seperti proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengomunikasikan dijalankan dengan sebaik baiknya. Serta melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta reinforcement.” Dalam model ini siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok belajar yang heterogen, setelah siswa belajar dalam kelompoknya, masing-masing perwakilan anggota kelompok yang setingkat kemampuannya akan dipertemukan untuk memainkan sebuah turnamen yang dikenal dengan “tournaments tabel” yang diadakan tiap akhir unit pokok bahasan atau akhir pekan. Skor yang didapat akan memberikan kontribusi rata-rata skor kelompok. Adanya turnamen akademik yang terdapat pada model pembelajaran kooperatif tipe ini adalah ciri yang dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik terutama bagi siswa SMA Negeri 1 Semarang. Langkah-langkah pembelajaran TGT secara runtut terdiri dari lima komponen. Menurut Slavin (dalam Taniredja, dkk, 2011) kelima komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu: (1) penyajian kelas (*class presentation*), guru menyampaikan materi yang biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin oleh guru, (2) kelompok (*teams*), kelompok disusun

dengan beranggotakan 4-5 orang yang bersifat heterogen. Fungsi utama mereka dikelompokkan adalah agar anggota-anggota kelompok saling meyakinkan bahwa mereka dapat bekerja sama dalam belajar dan mengerjakan games atau lembar kerja dan lebih khusus lagi untuk menyiapkan semua anggota dalam menghadapi kompetisi, (3) permainan (*games*), pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari materi yang relevan dengan materi yang telah disajikan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh mewakili masing-masing kelompok, (4) kompetisi/turnamen (*tournament*), biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja, (5) pengakuan kelompok (*teams recognition*), pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan berupa hadiah atau sertifikat atas usaha yang dilakukan kelompok selama belajar sehingga mencapai kriteria yang telah disepakati bersama.

Dalam implementasinya model pembelajaran TGT dapat diintegrasikan dengan media pembelajaran. Permainan yang digunakan dapat diadopsi dari permainan sehari-hari yang sudah dikenal oleh siswa. Ada berbagai jenis permainan edukatif yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya adalah permainan ular tangga atau dalam penelitian ini disingkat Utang. Permainan ular tangga merupakan permainan kelompok yang melibatkan beberapa orang dan tidak dapat digunakan secara individu. Menurut Rifa (2012) ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru sebelum memulai permainan

ini yaitu sebagai berikut: (1) membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok terdiri atas 4 – 5 orang, (2) membagikan satu set permainan ular tangga beserta kartu pertanyaan kepada masing-masing kelompok, (3) menyampaikan aturan permainan kepada siswa, (4) memberikan aba-aba permainan dimulai, (5) permainan selesai ketika salah satu pemain sudah sampai di garis akhir atau finish.

Permainan ular tangga digunakan pada saat siswa memainkan turnamen akademik. Aturan permainan ular tangga dimodifikasi disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang dipelajari. Adapun aturan permainan secara rinci adalah sebagai berikut: (1) masing-masing kelompok tournament mendapat nomor undian, (2) setiap kelompok mendapatkan satu kesempatan bermain dengan berdiri pada kotak yang sesuai dengan nomor undian yang didapat. (3) sebelum melangkah ke kotak selanjutnya, siswa harus bisa menjawab soal terlebih dahulu. Jika siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa boleh melangkah, namun jika menjawab salah maka siswa tidak boleh melangkah dan tidak mendapatkan nilai, (4) siswa diberikan kesempatan menjawab dalam waktu tertentu (misalnya: 1 menit). Kelompok harus bekerja sama dalam menjawab pertanyaan supaya nilai kelompok mereka tinggi. Bagi kelompok yang tidak bisa menjawab dalam kurun waktu yang ditentukan maka soal dilempar pada teman atau kelompok berikutnya, (5) penentu jawaban benar atau tidak adalah guru. (6) permainan selesai ketika waktu yang ditentukan sudah habis, (7) siswa akan mendapatkan 3 skor sebagai skor tambahan apabila menempati posisi

paling jauh diakhir permainan, (8) skor untuk masing-masing soal yang dijawab benar adalah 3, (9) pemenang adalah kelompok yang berhasil mendapat skor tertinggi diakhir permainan.

Dari uraian di atas, dapat dirangkum bahwa model pembelajaran TGT dengan bermain utang merupakan model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar bersifat heterogen, yang nantinya masing-masing perwakilan kelompok dengan kemampuan setara akan dipertemukan untuk memainkan sebuah turnamen yang dirancang dengan mengintegrasikan media permainan ular tangga dalam turnamen akademik tersebut. Dengan demikian, melalui penerapan model pembelajaran TGT dengan bermain utang, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi, kecepatan menyerap materi pelajaran, dan kematangan pemahaman terhadap sejumlah materi pelajaran sehingga berimbas pada hasil belajar yang optimal.

Hasil belajar siswa merupakan out-put yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran, baik bagi siswa, guru, maupun bagi orang tua siswa. Sudjana (2004:22) mengemukakan bahwa "hasil belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar." Hal senada juga dikemukakan oleh Purwanto (2011:54) hasil belajar merupakan "perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan." Dalam pelajaran PPKn yang dimaksud hasil belajar PPKn adalah kemampuan yang

dimiliki oleh siswa untuk menguasai bahan pelajaran PPKn setelah memperoleh pengalaman belajar PPKn dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil belajar PPKn merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran PPKn.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn materi pelanggaran HAM antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran TGT dengan bermain Utang alias ular tangga dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional atau hanya melalui ceramah di SMA Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2013/2014 adanya peningkatan hasil dan aktifitas siswa yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pengembangan metode dan strategi pembelajaran. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (Class Action Research) yaitu suatu penelitian yang dikembangkan bersama sama untuk peneliti dan decision maker tentang variable yang dimanipulasikan dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain : catatan guru, catatan siswa, model ular tangga, nomor undian, dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap, yakni perencanaan, melakukan tindakan, observasi, dan evaluasi. Refleksi dalam tahap siklus dan akan berulang kembali pada

siklus-siklus berikutnya. Aspek yang diamati dalam setiap siklusnya adalah kegiatan atau aktifitas siswa saat mata pelajaran PPKn dengan metode pembelajaran Team Game Tournament (TGT) dengan bermain Utang untuk mengetahui tingkat kemajuan belajarnya yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar dengan alat pengumpul data.

Siklus I

a. Perencanaan

- 1) Identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah.
- 2) Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar.
- 3) Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- 4) Memilih bahan pelajaran yang sesuai.
- 5) Menentukan skenario pembelajaran.
- 6) Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan.
- 7) Menyusun daftar pertanyaan.
- 8) Mengembangkan format evaluasi.
- 9) Mengembangkan format observasi pembelajaran.

b. Tindakan

- 1) Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario pembelajaran.
- 2) Siswa membaca materi yang terdapat pada buku sumber.
- 3) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang terdapat pada buku sumber.

- 4) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari.
- 5) Siswa melakukan permainan dengan menjawab pertanyaan dari guru secara berkelompok.

c. Pengamatan

- 1) Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah disiapkan yaitu dengan
- 2) alat
- 3) perekam dan catatan untuk mengumpulkan data.
- 4) Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar pengamatan.

d. Refleksi

- 1) Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasi mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan.
- 2) Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran dan lembar kerja siswa.
- 3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan pada siklus berikutnya.



Gambar. 1 dan 2 Guru memberikan Apersepsi dan contoh pelaksanaan permainan di luar kelas



Gambar3. Siswa mewakili kelompoknya melakukan permainan

Berlandaskan pada, pelaksanaan siklus I sudah menunjukkan hasil baik, tetapi kegiatan proses belajar mengajar siklus I masih perlu adanya perbaikan untuk mencapai skor ketuntasan yang telah ditentukan. Berpijak dari itu perlu adanya perbaikan untuk menuju peningkatan yang signifikan pada siklus ke II

Siklus II

a. Perencanaan

- 1) Identifikasi masalah yang muncul pada siklus I dan belum teratasi dan penetapan alternatif pemecahan masalah.
- 2) Menentukan indikator pencapaian hasil belajar.
- 3) Pengembangan program tindakan II.

b. Tindakan

Pelaksanaan program tindakan II yang mengacu pada identifikasi masalah yang muncul pada siklus I, sesuai dengan alternatif pemecahan masalah yang sudah ditentukan, antara lain melalui:

- 1) Guru melakukan apersepsi.
- 2) Siswa yang diperkenalkan dengan materi yang akan dibahas dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dan menganalisis materi dari berbagai sumber.
- 3) Siswa mengamati gambar-gambar / foto-foto yang sesuai dengan materi.
- 4) Siswa bertanya jawab tentang gambar / foto.

- 5) Siswa berdiskusi tentang unsur-unsur Hak Asasi Manusia yang ada pada gambar.
 - 6) Siswa bermain Utang di lapangan dengan menjawab pertanyaan dari guru.
- c. Pengamatan (Observasi)**
- 1) Melakukan observasi sesuai dengan format yang sudah disiapkan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
 - 2) Menilai hasil tindakan sesuai dengan format yang sudah dikembangkan.
- d. Refleksi**
- 1) Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II berdasarkan data yang terkumpul.
 - 2) Membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran pada siklus II.
 - 3) Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus III.
 - 4) Evaluasi tindakan II.
 - 5) Indikator keberhasilan yang dicapai pada siklus ini diharapkan mengalami kemajuan minimal 10% dari siklus I.
 - 6) Kriteria hasil penelitian tentang penguasaan materi pelanggaran HAM dan aktivitas siswa ditetapkan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria nilai penguasaan materi / kasus HAM

No.	Nilai	Kriteria
1	< 5,9	Kurang
2	6,0 - 7,50	Sedang
3	7,51 - 8,99	Baik
4	9,00 - 10	Baik Sekali

Tabel 2. Kriteria aktivitas siswa yang relevan

No.	Nilai	Kriteria
1	< 50	Kurang
2	60 - 69	Sedang
3	70 - 89	Baik
4	90 - 100	Baik Sekali

HASIL PEMBAHASAN

Pembelajaran PPKn dikelas X Mia 2 SMA Negeri 1 Semarang ini dilakukan dalam dua siklus. Pada setiap siklus, data yang

diambil adalah aktivitas dan nilai evaluasi pada akhir siklus. Hasil Observasi aktivitas siswa dari siklus ke siklus dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3. Data aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran.

No	Indikator	Ketercapaian	
		Siklus I	Siklus II
1	Keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat	52,75%	69,44%
2	Motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran (meyelesaikan tugas mandiri atau tugas kelompok)	63,82%	83,35%
3	Interaksi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok	72,25%	88,32%
4	Hubungan siswa dengan guru selama kegiatan pembelajaran	75,00%	91,66%
5	Hubungan siswa dengan siswa lain selama pembelajaran (Dalam kerja kelompok)	77,65%	86,11%
6	Partisipasi siswa dalam pembelajaran (memperhatikan), ikut melakukan kegiatan kelompok, selalu mengikuti petunjuk guru).	80,55%	94,45%
	Rata -Rata	70,33%	85,55%

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa aktivitas siswa yang relevan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 mengalami peningkatan dibandingkan

dengan siklus 1 yaitu sebesar 12,22%. Selanjutnya data aktivitas siswa yang

Tabel 4. Data Aktivitas Siswa yang kuang relevan dengan pembelajaran

No	Indikator	Ketercapaian	
		Siklus I	Siklus II
1	Tidak memperhatikan penjelasan guru	27,75%	13,88%
2	Mengobrol dengan teman	19,44%	8,33%
3	Mengerjakan tugas lain	16,60%	5,50%
	Rata-rata	21,26%	9,25%

siklus 1 yaitu sebesar 12,01%.Data pemahaman Siswa tentang pelanggaran HAM dan ketuntasan belajar dari siklus ke siklus dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Data Pemahaman Siswa tentang pelanggaran HAM dan ketuntasan belajar siswaBerdasarkan tabel 5 diatas, nilai rata-rata pemahaman siswa tentang masalah

Tabel 5. Daya Pemahaman Siswa tentang pelanggaran HAM dan ketuntasan belajar siswa

No	Indikator	Ketercapaian	
		Siklus I	Siklus II
1	Nilai rata-rata pemahaman HAM	7,01%	7,80%
2	Siswa yang telah tuntas	74,82%	89,96%
3	Siswa yang belum tuntas	16,52%	7,88%

HAM mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, begitu juga persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 sebesar 15,14%. Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat keberanian siswa bertanya dan mengemukakan pendapat, rerata perolehan skor pada siklus pertama 52,75 % menjadi 69,44 %, mengalami kenaikan 16,69 %. Begitupun dalam indikator motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran pada siklus pertama rata-rata 63,82 % dan pada siklus kedua 83,35 % mengalami kenaikan 19,53 %. Dalam indikator interaksi siswa selama mengikuti diskusi kelompok pada siklus pertama 72,25 % dan pada siklus kedua 88,32 % mengalami kenaikan sebesar 16,07 %. Dalam indikator hubungan siswa dengan guru selama kegiatan pembelajaran, pada siklus pertama 75 % dan pada siklus kedua 91,66 % mengalami kenaikan sebesar 16,66 %. Dalam indikator hubungan siswa dengan siswa, pada siklus pertama 77,65 % sedangkan pada siklus kedua 86,11 % mengalami kenaikan sebesar 8,46 %. Dalam indikator partisipasi siswa dalam pembelajaran terlihat pada siklus pertama 80,55 %, sedangkan pada siklus kedua 94,45 % mengalami kenaikan sebesar 13,9%.

Melalui metode *Team Game Tournament* (TGT) dengan bermain Utang ini terlihat hubungan siswa dengan guru sangat signifikan karena guru tidak dianggap

sosok yang menakutkan tetapi sebagai fasilitator dan mitra untuk berbagi pengalaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, setelah dievaluasi dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif metode *Team Game Tournament* (TGT) pada pembelajaran PKn secara optimal dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas X SMA Negeri 1 Semarang. Hal ini terlihat dari tingkat keberhasilan setiap aspek kualitas proses dan hasil pembelajaran yang mengalami peningkatan. Hal ini nampak pada setiap kegiatan seperti kriteria nilai penguasaan materi kasus HAM , kriteria aktifitas siswa, aktifitas siswa yang relevan dengan pembelajaran, pemahaman siswa tentang pelanggaran HAM dan ketuntasan belajar dari siklus pertama ke siklus ke dua semua mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan aktifitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran dari siklus pertama ke siklus ke dua mengalami penurunan. Dengan menggunakan pembelajaran TGT dengan bermain Utang dapat semakin meningkatkan daya tarik siswa terhadap pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negeraan atau PPKn. Sehingga bagi siswa pelajaran PPKn menjadi daya

tarik tersendiri.

Untuk mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dan menambah daya tarik siswa terhadap pelajaran PPKn sehingga anggapan siswa yang kurang menarik Guru diharapkan dapat menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Team Game Turnamen atau TGT agar minat dalam pembelajaran PPKn dapat dirasa menyenangkan, dengan suasana yang menyenangkan akan dapat menambah semangat belajar sehingga prestasi bisa meningkat. Dan pula dalam pembelajaran TGT ini unsur proses pembelajaran seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mangasosiasikan dan mengomunikasikan telah terpenuhi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, H. Rozali, dan Syamsir. 2002. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Affan Gaffar.2002. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian.1980. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta:LP3ES.
- Anonim.1993.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50 tahun 1993 tentang *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.
-2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 : *tentang Standar Isi*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi.2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jogjakarta: FHUII Press.
- Budimansyah, Dasim.2002. *Model Pembelajaran dan Penelian Portofolio*. Bandung:PT. Genesindo.
- Budiardjo, Prof. Miriam.1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Depdiknas.2006. *Standar Kompetensi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan* tahun 2006. Jakarta: Depdiknas.
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba.1984. *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaelan, MS.2004. *Pendidikan Pancasila*. Jogjakarta: Edisi reformasi, penerbit Paradigma.
- L e m h a n a s , 2 0 0 1 . *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Magnis-Suseno. Franz. 2000. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Malian. Sobirin dan Marzuki Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: UII Press.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 tahun 1999 : *tentang Hak Asasi Manusia*.

Tilaar, HAR, et, al, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.



PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DI SEKOLAH

Muhammad Iqbal Birsyada

Dosen Pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2014

Disetujui Desember 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords :

*Education , Social Studies,
Constructivism , School*

Abstrak

Pendidikan IPS menempati posisi yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Posisi penting itu adalah dalam rangka menumbuh kembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecerdasan sosial untuk menjadi warga negara yang baik. Pergantian kurikulum pendidikan membuat pendidik pengampu mata pelajaran IPS memerlukan terobosan pendekatan pengajaran yang lebih merangsang minat peserta didik dalam belajar IPS di sekolah. Untuk merangsang minat belajar IPS, para peserta didik harus didekatkan dengan isu-isu sosial di sekitar lingkungannya sehingga timbul kesadaran kritis yang konstruktif dalam memandang persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat. Dalam hal inilah model pendidikan IPS haruslah bersifat konstruktif dan kritis. Peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran tidaklah lagi terdominasi oleh setiap instruksi dan wacana pemikiran dari guru. Namun, peserta didiklah yang akan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara sadar dan kritis tanpa dominasi dari siapapun. Artikel ini ingin memberikan pandangan pemikiran tentang model pendidikan IPS berbasis konstruktivistik di sekolah. Pendidikan konstruktivistik dalam artikel ini adalah mempergunakan pendekatan *critical pedagogy*. Pendekatan *critical pedagogy* dapat mengantarkan peserta didik menjadi pribadi warga negara yang baik secara kritis dan bertanggungjawab.

Abstract

Social science plays an important roles in the development of Indonesian educational system. It supports the students to gain the competency of well human being and citizenship. The reconstruction of the curriculum for several times makes the teacher of social science studies think an alternative methodology of teaching. This alternative methodology should be constructive and critical. To stimulate the students learning interest, they are needed to be brought closer to the social issues around their environment. It is expected to construct their critical awareness to their communities. They are not longer dominated by the teacher in the learning process. The teacher just provides the discourse and facilitates them to have some critical pedagogy activities. The aim of this article is to give an overview of Social Science learning process based on the constructivism model. This theory supports a critical pedagogy development which brings the students become a good critically and responsibility citizen.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
iqbal_birsyada@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sejak semula fungsi pendidikan telah melekat pada peranan keluarga, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai dorongan untuk mengembangkan keturunan serta melestarikan jenisnya. Untuk itu setiap pasangan suami istri berusaha secara alami agar anak keturunan mereka dapat tetap 'survive' meski harus menghadapi kondisi lingkungan hidup fisik maupun sosial yang tidak ramah sekalipun. Di satu pihak, mereka harus berusaha agar nilai-nilai hidup yang telah dihayati selama mereka mengarungi hidup, dapat digunakan oleh anak keturunan mereka. Ini berarti nilai-nilai hidup mereka mendapat jaminan untuk dilestarikan (Abu Suud, 2008). Di pihak lain, mereka juga berusaha agar keturunan mereka dapat mengembangkan kemampuan individual maupun kelompok dengan sebaik-baiknya, untuk menghadapi lingkungan hidup mereka kelak. Tujuannya adalah agar potensi-potensi sosial mereka kelak dapat berfungsi secara wajar, tepat dan tidak menyimpang dari tata nilai yang mapan. Oleh karena itu pendidikan berfungsi sebagai *transfer of values* yang senantiasa di sosialisasikan dalam masyarakat.

Dalam mengembangkan potensi individual maupun sosial peranan pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan kreatifitas peserta didik sekaligus dalam rangka memahami dan memecahkan persoalan-persoalan sosial di sekitar tempat tinggalnya. Disinilah sebenarnya peran serta orangtua, masyarakat sekaligus guru dipertaruhkan. Diantara beberapa guru yang ada, guru IPS adalah sebagai penopang dasar untuk mewujudkan

peserta didik dalam rangka menjadi warga negara yang baik. Alan J. Singer (2003) memberikan laporan bahwasanya perasaan rendah diri dan frustrasi seringkali menghinggapi guru IPS di Amerika Serikat dimana negara tersebut adalah penggagas munculnya kurikulum *social studies* atau *social sciences*. Perasaan tersebut dikarenakan angka partisipasi kehadiran siswa sangat rendah pada mereka yang lingkungan keluarga peserta didik sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan serta dari keluarga pengangguran. Guru juga merasakan betapa rendahnya minat siswa untuk belajar IPS.

Pandangan yang dikemukakan Alan J. Singer (2003) adalah bentuk dari ketidakberdayaan pendidikan dalam hal pembelaan dan pembebasan pada kaum tertindas. Kemiskinan dan pengangguran adalah potret kesenjangan sosial dikarenakan pemerintah tidak mampu memberikan kenyamanan pada masyarakat yang terpinggirkan dalam memperoleh hasil produksi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Mereka keluarga miskin merasa bahwasanya pendidikan tidak berkolerasi secara langsung dengan ekonomi mereka, baik secara struktur maupun fungsi pada realitas penghidupan mereka. Pendidikan tidak menjamin mereka dapat keluar dari kungkungan dominasi kapitalisasi industri yang memojokkan mereka. Belajar di sekolah menjadi hal nomor dua (*the second coice*). Pilihan pertama adalah pemenuhan kebutuhan primer.

Pandangan tentang respon peserta didik pada minat belajar sebagaimana dijelaskan di atas rupanya tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Pandangan konstruksi masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak beranggapan bahwasanya studi IPS hanyalah penuh dengan hafalan, dan nyaris tidak ada daya pikat untuk belajar. Belum lagi jika dilihat bidang studi IPS terdiri dari banyak komponen, yang meliputi sejarah, geografi, dan ekonomi.

Abu Suud (2008) meneliti tentang *Penggunaan Isu Kontroversial dalam Kelas Sejarah di Era Reformasi*. Dalam penelitiannya Abu Suud menjelaskan kendala umum dalam proses pembelajaran IPS sejarah yang dirasakan para siswa/mahasiswa sejarah adalah betapa tidak menariknya proses pembelajaran, sementara pelajaran sejarah sebagai bagian dari pembelajaran IPS amat penting dalam upaya menyiapkan warga Negara yang baik maupun ilmuan yang berwawasan luas. Pembelajaran sejarah yang monoton dan tidak menarik adalah salah satu yang membuat mata pelajaran sejarah kurang diminati oleh peserta didik. Peranan guru IPS sejarah yang tidak dapat mengembangkan pemikiran kritis pada peserta didik di kelas adalah salah satu pokok permasalahan yang menyebabkan kurang diminatinya mata pelajaran IPS Sejarah di sekolah.

Senada dengan pemaparan Abu Suud (2008), Azinar (2010) menyampaikan hasil penelitiannya tentang pengembangan pembelajaran sejarah kritis yang berjudul *“Implementasi Critical Pedagogy Dalam Pembelajaran Sejarah Kontroversial Pada SMA Negeri Kota Semarang”*. Hasil dari penelitian diantaranya adalah ada guru yang sudah dapat berpikir maju dan kritis serta siap pada beberapa kesempatan menggunakan model pembelajaran IPS sejarah kontroversial secara kritis kepada peserta

didiknya. Adapula guru yang masih biasa-biasa saja dalam membelajarkan peristiwa sejarah kepada peserta didiknya. Pembelajaran sejarah kontroversial yang dijadikan bahan penelitian adalah pada materi peristiwa G-30 S/PKI.

Beberapa guru IPS Sejarah masih setengah hati dalam menyampaikan cerita sejarah kontroversial pada peristiwa G30 S/PKI pada siswanya sehingga materi sejarah yang diajarkan terkesan monoton dan terkesan hafalan. Proses pembelajaran sejarah yang diajarkan hanya datar-datar saja akhirnya kurang merangsang siswa untuk berpikir kritis. Ketika kurang memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis siswa tidak dapat mencoba menemukan dan menelusuri tentang hakekat dalam sebuah peristiwa sejarah tersebut, dengan demikian artinya peristiwa sejarah yang diajarkan guru pada siswa tidak mampu mencapai kesadaran kritis akan sejarah pada peserta didik (Azinar, 2010).

Pembelajaran sejarah kontroversial dengan *critical pedagogy* kurang berhasil dilaksanakan di SMA karena persoalan-persoalan berikut. *Pertama*, tidak adanya kebijakan yang pasti kepada guru untuk mengajarkan sejarah kontroversial kepada peserta didiknya. *Kedua*, perlunya penguatan relevansi materi kontroversial dalam sejarah ke dalam muatan kurikulum pendidikan sejarah sampai kepada SK/KD kurikulum. *Ketiga*, ketersediaan sumber dan metode yang sebenarnya mudah didapat sehingga tidak ada lagi guru yang tidak kreatif dalam membelajarkan sejarah di kelas. *Keempat*, perlunya perencanaan yang matang yang dimasukkan kedalam RPP tentang membelajarkan sejarah kontroversial kepada

siswa guna merangsang proses belajar mengajar dikelas. Perlunya perencanaan pembelajaran ini juga harus diimplementasikan kedalam cara melakukan evaluasi ketika mengajarkan sejarah kontroversial kepada peserta didik (Azinar, 2010).

Pandangan hasil penelitian dari Azinar (2010) juga senada dengan apa yang di temukan oleh Birsyada (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peristiwa Konflik Pecahnya Keluarga Di Kerajaan Demak Dalam Perspektif Para Penulis Babad*”. Pembelajaran IPS sejarah di sekolah terutama di SMA masih banyak dijumpai guru sejarah yang belum mau mempergunakan model pembelajaran secara kritis. Birsyada mencotohkan temuannya pada kasus pembelajaran sejarah di Kabupaten Demak. Kebanyakan para guru tidak memberikan informasi secara keseluruhan dan mengedepankan kekritisitas kepada siswa mengenai sejarah konflik perpecahan keluarga di Kerajaan Demak. Hal tersebut karena dianggap sebagai fitnah atau *aib* masa lalu yang tidak perlu di permasalahan secara mendalam dan kritis.

Bertolak dari pandangan di atas dapat dijelaskan bahwasanya pengembangan pembelajaran IPS untuk memacu nilai kekritisitas peserta didik masih perlu dilakukan. Beberapa akademisi IPS di negeri ini mulai mencoba untuk memformulasikan konsep pendidikan serta pembelajaran IPS yang disesuaikan dengan nilai-nilai Ke-Indonesiaan. Artinya konsep pembelajaran IPS di Indonesia walaupun terilhami dari pemikiran *import* barat namun harus menunjukkan ciri khas yang berdaulat yang beridiri sendiri dimana konteks sosial barat dengan Indonesia sangat berbeda. Nilai-nilai

tersebut dibingkai dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Paradigma pendidikan IPS di Indonesia tidak boleh terhegemoni ataupun tersubordinasi oleh paradigma orientasi barat. Konteks sosial masyarakat di barat dan Indonesia yang berbeda karakter membuat corak pendidikan IPS seharusnya memang tidak sama (Abu Suud, 2008). Leluhur kita memiliki nilai-nilai sosial budaya yang sejak lama di anut dan di internalisasikan kepada anak cucunya sehingga menjadi karakter dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Sehingga segala rumpun keilmuan haruslah dalam kerangka pembangunan nilai karakter ke-Indonesiaan. Zuchdi (2010) mencoba menggagas pendidikan karakter berbasis Ke-Indonesiaan yakni karakter Pancasila untuk dapat di internalisasikan ke dalam segala mata pelajaran di sekolah. Peserta didik harus dikenalkan dengan nilai-nilai humanitas (universal) moral sejak dini mungkin.

Somantri (2001) juga telah menggagas pembaharuan pendidikan IPS dengan memantapkan jatidiri pendidikan IPS di Indonesia dengan pendekatan fungsional struktural. Pendidikan IPS harus mengacu pada kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat dengan meminjam ilmu-ilmu sosial dalam tujuan pendidikan. Jatidiri pendidikan IPS adalah kerjasama ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan, yaitu adanya seperangkat kemampuan: (a) memilih (menyederhanakan) bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan *humanities* untuk tujuan pendidikan; (b) mengorganisasikan bahan

pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan; (c) menyajikan metode pendidikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan; (d) menilai hasil belajar pendidikan IPS. Oleh karena itu kajian pendidikan IPS haruslah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kajian filsafat ilmu IPS (Somantri, 2001).

Somantri (2001) memandang pendidikan IPS yang telah disepakati di Indonesia adalah yang memakai kerangka teori beberapa rumpun ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, PKn, Ekonomi) dan tujuan pengembangan pendidikan. Dalam hal ini seluruh kajian pendidikan IPS dalam kerangka kajian sosial diharapkan banyak meminjam teori-teori sosial untuk tujuan pendidikan. Batasan pendidikan IPS di Indonesia sampai sekarang masih mengadopsi dari batasan Edgar Wesley, Frasser dan West dan *National Council for the Social Studies* (NCSS) yaitu organisasi yang mengembangkan model kurikulum pendidikan IPS pada tingkat dasar dan menengah serta keterkaitan antara disiplin ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan.

Gagasan Somantri tentang pembaharuan pendidikan IPS di tingkat sekolah menekankan pada pemuatan kurikulum IPS di sekolah harus memuat tujuan institusional dan tujuan pendidikan nasional. Bahan-bahan ajar IPS hendaknya berisikan bahan yang membuat peserta didik untuk dapat berpikir kritis, analitis dan kreatif serta dapat membiasakan diri dalam proses berpikir ilmiah sosial dan proses internalisasi yang menekankan pada proses mengambil keputusan secara rasional berdasarkan pengetahuan yang sudah di sederhanakan

(Somantri, 2001). Artinya *output* pembelajaran IPS pada peserta didik adalah menjadikan siswa mencapai tahapan berpikir kesadaran kritis. Supardan (2009) juga menulis kajian ilmu-ilmu rumpun IPS dalam kerangka pendekatan teori sosial struktural dimana mencoba menguraikan masing-masing sub ilmu-ilmu sosial (IPS) secara terperinci. Walaupun kajian tentang pendekatan ilmu-ilmu sosial dijelaskan secara panjang lebar. Namun kurang menyentuh pada aspek *pedagogy* bagaimana mempergunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial tersebut dalam kerangka pendidikan. Atau paling tidak mencoba menghubungkan antara ilmu sosial dengan materi pendidikan IPS di sekolah. Abu Suud (2008) mencoba memberikan rancangan desain dengan tema revitalisasi pendidikan IPS. Pendidikan IPS di Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa pasca reformasi masih saja berjalan ditempat. Dunia pendidikan dan sosial masih banyak bertambah problem-problem sosial baik itu muncul pada peserta didik di lingkungan sekolah maupun problem sosial di masyarakat (Abu Suud, 2008). Pandangan sosial ini mencerminkan bahwasanya pendidikan IPS di Indonesia masih gagal. Gagal di sini dalam arti belum dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial yang baik.

Menurut Dunham's tujuan dari pendidikan IPS adalah tidak lain bagi siswa adalah agar mereka dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sehingga menjadi warga negara yang baik. Sosialisasi disini dapat diartikan sebagai "... suatu proses yang membuat anak-anak menyatu dalam budaya kelompoknya, sehingga menjadi

orang yang dapat diterima dalam masyarakat ..." (*... the process by which the newborn child is moulded into the culture of his group and hence becomes an acceptable person in that society ...*) (Abu Suud, 2008). Sosialisasi adalah suatu proses yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menghayati tata cara yang hidup dalam masyarakat, sehingga dia dapat berperan di dalamnya (*... the process by which someone learns the ways or a given society or social group, so that he can function within it*) (Lindzey and Aronson, 1975:474). Dalam proses tersebut anak menghayati peranan-peranan sosial yang seharusnya ada, lewat interaksi yang dimotivasi oleh harapan-harapan masyarakat (Lindzey, Gardner and Elliot Aronson (ed), 1975).

Dalam pandangan Abu Suud (2008) tujuan dan capaian pendidikan IPS adalah terbentuknya masyarakat yang berintegrasi (integrasi sosial) menjadi warga negara yang baik. Masyarakat dapat melaksanakan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya sesuai wewenangnya masing-masing. Terbentuknya manusia yang saling menghargai antara satu dengan yang lain serta memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Pandangan dan tujuan pendidikan IPS juga dikemukakan oleh Pramono (2013:38) yang mencoba menggali hakikat pendidikan IPS. Menurutnya, pembelajaran IPS di sekolah harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan memecahkan persoalan masyarakat serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan dan perbaikan manusia dan mengembangkan sikap kepribadian menjadi warga negara yang baik. Artinya pendidikan

IPS tak akan pernah lepas dari permasalahan sosial yang ada pada masyarakat.

Pandangan di atas dapat dipahami jika kita meyakini, bahwa peserta didik baru merasakan arti hidup yang sebenarnya ketika berada dalam lingkungan sosialnya. Di sana setiap orang akan menempati posisi-posisi tertentu, dan selanjutnya mempunyai peranan tertentu, dan tampil sesuai dengan kedudukan serta peran yang dipegangnya. Dalam kaitan dengan peran sosial itulah sesuatu penampilan dapat dipahami dan mempunyai makna.

Bertolak dari pandangan uraian pemikiran di atas penulis mencoba untuk memberikan pandangan konsep pembelajaran IPS melalui pendekatan konstruktivisme yang tentunya agak berbeda dengan pendahulunya Soemantri (2001) yang mencoba mendekati melalui struktural fungsional dalam ranah pendidikan IPS. Supardan (2009) yang juga mendekati ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan struktural. Begitu juga Abu Suud (2008) yang mencoba mendekati IPS lewat pandangan integrasi sosial dan pemecahan problem-problem sosial. Berbeda dari pendahulunya seperti Soemantri yang memakai pendekatan struktural fungsional. Pramono (2013) yang mencoba mendekati pendidikan IPS pada tataran hakikat filosofis sampai dengan praksisnya. Pada kajian ini yang akan ditawarkan adalah model pembelajaran pada materi pendidikan IPS dengan pendekatan konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme pada akhir-akhir ini banyak diperhatikan akademisi, karena dengan menerapkan model ini dimungkinkan terjadinya proses pendidikan di sekolah (learning) pada diri peserta didik dapat

dioptimalkan karena konsep konstruktivisme memadukan antara kecerdasan kognitif serta kecerdasan sosialnya sehingga dapat memposisikan dirinya secara baik di masyarakat.

Pemahaman tentang teori konstruktivisme memang telah banyak dipakai oleh para ilmuwan sosial dan ilmuwan pendidikan pada awal abad ke-20. Diantara ilmuwan sosial tersebut adalah Peter L. Berger mengembangkan teori konstruksi sosial dengan mengajukan sebuah pertanyaan tentang realitas sosial: Apakah yang nyata itu? Bagaimana kita tahu? Pertanyaan ini diajukan karena yang “nyata” itu tidak sebagaimana dijelaskan oleh banyak ahli ilmuwan sosial. Sedangkan untuk mengetahui yang nyata harus dengan pengetahuan. Berger mulai dengan proposisi bahwa manusia membangun kenyataan sosial melalui proses subyektif yang kemudian diobjektifkan (*human beings constructs social reality in which subjective processes can become objectified*) (Waters, 1994).

Konstruksi dalam pemikiran Berger adalah sebuah kenyataan yang dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Berger, 1990:1).

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas

dasar itulah kemudian Berger menyatakan bahwa dasar-dasar konstruksi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk. Dalam proses pengobjektivan, Berger menekankan adanya kesadaran, dan kesadaran itu selalu intensional karena ia selalu terarah pada objek. Dasar kesadaran (esensi) memang tidak pernah dapat disadari, karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu (fenomena); baik menyangkut kenyataan fisik lahiriah maupun kenyataan subjektif batiniah. Seperti halnya manusia, yang juga memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang dipersepsikan sehingga menjadi konstruksi sosial. Jadi, proses konstruksi sosial menurut Peter L. Berger adalah dialektika sosial antara Eksternalisasi, Objektivikasi dan Internalisasi. (Waters, 1994; Etzkowitz and Glassman, 1991; Zeitlin, 1973; Berger and Luckmann, 1990; Barnes, 1971).

Pemahaman pemikiran tentang konstruksi sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian banyak diadopsi oleh ahli pendidikan sebagai salah satu pengembangan model pembelajaran. Bagi ilmuwan pendidikan yang berpandangan konstruktivisme memandang belajar itu proses berfikir untuk mengkonstruksi pengetahuan yang telah diterimanya melalui proses objektivikasi pengetahuan (Berger and Luckmann, 1990). Pada proses tahap objektivikasi inilah peserta didik akan memberikan penilaian pada setiap informasi pengetahuan yang telah diterimanya secara kritis. Sedangkan informasi dan pengaruh

dari lingkungan eksternal peserta didik akan memberikan dorongan untuk memberikan penilaian secara objektif pada apa yang telah di pelajari oleh peserta didik. Proses pembelajaran konstruktivisme pada prinsipnya adalah menemukan. Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka (Vitalis, 2012).

Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dimulai dari masalah (sering muncul dari siswa sendiri) dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Dalam bangunan teori konstruktivisme dinyatakan, bahwa setiap manusia (learner) menempatkan bersama-sama gagasan (baru) dan struktur yang dimiliki dalam belajar. Pengetahuan tidak dapat ditransfer seseorang ke yang lainnya seperti mengisi air dalam gelas dan tidak dapat diobservasi secara independen, tetapi pengetahuan diperoleh secara personal dalam perasaan. Apa yang diperoleh kemudian terstruktur melalui proses penyusunan makna yang hampir terjadi setiap saat walaupun tanpa guru, buku teks, dan sekolah (Wahap, 2007).

Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme memandang proses belajar sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi dan interpretasi (Vitalis, 2012). Tidak jauh beda dengan Vitalis, Gustone sebagaimana yang dikutip Poedjiadi dalam Fajar (2004), memandang model pembelajaran konstruktivisme adalah memberikan kesempatan pada tiap individu untuk

membangun maknanya sendiri sehingga peserta didik dapat menemukan alternatif-alternatif jawaban atas pengalaman pembelajaran di sekolah. Apabila peserta didik menerima stimulus dan respon dari guru serta mampu menemukan konsep alternatif pada tiap pemecahan persoalan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal tersebut mengandung makna bahwasanya proses konstruksi pengetahuan pada masing-masing individu atas pemaknaan dari hasil pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam pembelajaran konstruktivisme pikiran peserta didik tidak boleh di subordinasikan oleh penguasaan dominasi pemikiran guru. Model pembelajaran ini menekankan pada kebebasan pada peserta didik untuk menemukan hasil belajarnya melalui pengalaman sendiri. Peserta didik dapat menemukan sekaligus menghubungkan antara materi pembelajaran dengan realitas sosial yang ada. Proses menemukan inilah dalam pandangan Peter L. Berger dinamai dengan objektifikasi.

Yager dalam Arnie Fajar (2004) spesifik menyodorkan empat tahap strategi dalam pembelajaran dengan mempergunakan model pembelajaran konstruktivistik, yaitu: Invitasi yang mempunyai arti yaitu mengamati hal yang menarik di sekitar siswa. Selanjutnya eksplorasi yang bermakna memberikan sumbang saran alternatif yang sesuai tentang informasi yang akan dicari, mengobservasi fenomena, mengumpulkan data, memecahkan masalah dan menganalisis data. Setelah data coba di analisis maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengajukan penjelasan dan solusi; menyampaikan gagasan, menyusun model, membuat penjelasan baru,

membuat solusi, memadukan solusi dengan teori dan pengalaman. Langkah selanjutnya adalah menentukan langkah; membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan ketrampilan, *share* informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan dengan tema dan pertanyaan yang tak menyimpang dari materi kajian.

Bertolak dari pandangan di atas, model pembelajaran konstruktivisme pada hakikatnya merupakan kegiatan pendidikan mental yang memerlukan kemampuan menghubungkan teks dan konteks, dan kemudian membentuk pemahaman (Brooks dan Brooks, 1999). Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2005), memberikan pemahamannya tentang pembelajaran konstruktivisme yang tidak lain adalah mengarah pada pembelajaran kontekstual dengan menekankan belajar pada kehidupan nyata dengan mengalami dan menemukan sendiri merupakan realita pembelajaran yang lebih bermakna melalui proses objektivikasi ilmu pengetahuan. Jadi konstruktivisme dalam pembelajaran, mengarah pada proses belajar-mengajar dilakukan bersama-sama oleh guru dan peserta didik dengan produk kegiatannya membangun persepsi dan cara pandang siswa mengenai materi yang dipelajari, mengembangkan masalah baru, dan membangun konsep-konsep baru. Dalam konteks ini, siswa dipandang sebagai individu yang mandiri, memiliki potensi belajar yang sangat tinggi, dan mampu sebagai pengembang ilmu. Setelah peserta didik menemukan pengetahuan lewat objektivikasi ilmu pengetahuan dari proses belajarnya, maka selanjutnya akan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu otonom.

DISKURSUS PEMBELAJARAN IPS KONSTRUKTIVISME BERBASIS *CRITICAL PEDAGOGY*

Pengembangan model pembelajaran IPS yang berorientasi pada pembangunan karakter manusia Indonesia yang cerdas sosial sampai saat ini masih terus menerus menjadi diskursus wacana perdebatan akademik dikalangan akademisi pendidikan. Sebagaimana ahli pendidikan IPS menginginkan pengembangan model pembelajaran IPS di sesuaikan dengan jatidiri karakter bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Sebagaimana ahli yang lain berusaha menjadikan proses pembelajaran IPS sesuai dengan kesepakatan dan sebagaimana yang dikembangkan oleh negara barat dengan tetap mempergunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001).

Pada artikel ini yang ingin digagas adalah model pengembangan pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme *critical pedagogy*. Model pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme *critical pedagogy* dapat mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kesadaran kritis terhadap persoalan-persoalan lingkungan sekitarnya. Guru dalam membelajarkan IPS di sekolah haruslah mampu mendekati peserta didik dengan isu-isu masalah sosial yang sedang aktual terjadi. Dengan model pembelajaran seperti ini siswa dapat secara bebas dan kritis memaknai gejala fenomena sosial tanpa dominasi dari pihak guru maupun siapapun yang bersifat doktrinasi. Peserta didik sejak dini diperkenalkan dengan mekanisme kerja ilmuwan sosial dalam memandang problem sosial untuk mencoba di pahami dan di

pecahkan secara kritis sesuai pengalaman belajarnya.

McLaren dan Leonard (2004.) menjelaskan bahwasanya pembelajaran IPS model *critical pedagogy* banyak merujuk pada pemikiran Paolo Freire yang mengembangkan model pendidikan anti penindasan di Amerika Latin (Brazil). *Critical Pedagogy* merupakan proses dialektika anti tesis dari model pendidikan behavioristik yang cenderung mengkondisikan peserta didik sesuai dengan keinginan guru (*teaching centered*). Menurut Paolo Freire jika penguasa saja tidak boleh menindas rakyatnya maka pendidikan-pun tidaklah boleh menindas rakyat. Begitu juga dengan guru tidaklah boleh mendominasi pemikirannya dengan memaksakan pendapatnya terhadap peserta didik atas gagasannya.

Pembelajaran IPS konstruktivisme *critical pedagogy* berusaha mengkonstruksi nilai-nilai kritis dari dominasi siapapun. Dengan berpikir kritis maka peserta didik diharapkan dapat menemukan konstruksi pemikirannya sendiri tanpa di doktrinasi oleh siapapun sehingga peserta didik dapat menemukan dan menentukan jalan pikirannya sendiri secara sadar, tanggungjawab dan kritis (objektifikasi). Peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran IPS haruslah terbebas dari dominasi ideologi ataupun kepentingan kekuasaan. Dalam konteks ini, pembelajaran konstruktivisme *critical pedagogy* menolak guru pasif di kelas. Guru harus dapat membebaskan pikiran peserta didik untuk dapat bangkit menghadapi tantangan-tantangan masalah sosial seperti ketidakadilan, kesetaraan, kemiskinan, demokrasi, humanisasi dan lainnya. Dengan demikian peserta didik

mencapai pada tahapan kesadaran kritis.

Senada dengan pandangan pemikiran di atas, Fredericks (2000) memberikan pandangan bahwa dalam prose pembelajaran IPS siswa harus diberi banyak kesempatan untuk menyelidiki lingkungan sosial mereka baik sekeliling tempat tinggalnya harus memberikan kebebasan berpikir siswa dan bukan menghafal materi pelajaran. Studi sosial harus merangsang siswa untuk menemukan pengalaman dan ide-ide baru lewat proses pembelajaran IPS secara kritis. Pandangan Fredericks di atas menyebutkan bahwasanya proses pembelajaran IPS harus di ajarkan dengan terintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Pola berpikir pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme *Critical Pedagogy* adalah menempatkan peserta didik untuk mampu menghadapi dominasi. Peserta didik di ajarkan untuk dapat mengaitkan antara permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan materi pembelajaran IPS di sekolah. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali dan menemukan makna terhadap kajian IPS yang telah di kontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari. Jika dalam pandangan konservatif pembelajaran bertujuan menjaga *status quo*, sementara bagi kaum liberal untuk perubahan moderat dan cenderung bersifat mekanis, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam struktur pembelajaran dan pendidikan (Mansour Fakih, 2001).

Menurut Paulo Freire yang dikutip Monchinski (2008:2) menjelaskan bahwa "...*make oppression and its causes objects of reflection by the oppressed with the hope that from that reflection eill come*

liberation". Paulo Freire pada awalnya memandang bahwa model pendidikan dan pembelajaran *critical pedagogy* pada dasarnya adalah sebuah refleksi serta reaksi terhadap ketertindasan dan berbagai alasan yang menyebabkannya, sehingga dengan refleksi itu diharapkan akan menuju kepada kebebasan. Kebebasan disini adalah dimana pendidikan bebas dari dominasi kekuasaan maupun ideologi manapun.

Pandangan Paolo Freire di atas senada dengan apa yang di kemukakan oleh Miller (2008) yang menyatakan bahwa *critical pedagogy* lebih khusus menekankan pada perspektif implementasi pendidikan disekolah di mana pihak sekolah seharusnya memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk belajar secara efektif secara menyeluruh. Sedangkan guru memberikan penilaian sesuai standar kriteria tiap-tiap tingkatan pemahaman peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menemukan konstruksi pemikirannya sendiri lewat pemahaman pendidikannya lewat pengalaman belajar peserta didik. Tujuan akhir dari konstruksi pemikiran peserta didik adalah tercapainya kesadaran kritis dalam pemahaman peserta didik.

Dalam prose pembelajaran *critical pedagogy* materi pembelajaran IPS lebih di tekankan pada penguatan analisis isu-isu kontekstual sehingga siswa diberi kebebasan untuk menilai atas isu tersebut. "*How do we instill in our students the ability to be effective judges over their own learning? Part of that process for me means supporting a shift in student's thinking about conventional traditional ways of grading. The teacher keeps record of assignments completed and assign a grade based on that criteria. As most*

at as know, grades do not accurately reflect back to students what they have learned or acquired throughout a given course. As a liberatory educator (Freire, 1970) in English education, one who attempts to create equanimity through out all elements of classroom practice, I Strive to empower students to act on and transform their worlds through acts of cognition and action. This means that I must also reconsider the grading process and how I assess student learning".

Menurut pandangan Miller (2008) pembelajaran *Critical pedagogy* menekankan pada proses dialog menganalisis segala sesuatu yang ada dilingkungan sekitar peserta didik melalui cara pembelajaran yang kreatif menekankan pada kebebasan berpikir tanpa dominasi dari guru. "*Critical pedagogy need to construct environments that allow for maximum flexibility of thought, dialogue and practice on major educational issues and provide students with real experience of each. How many of us thought, have reached the point when we know that what we are assessing reinforces the message that assessments is a manifestation of power? On the one hand, we are expected to assign grades, and on the other, we know that assessment's a manifestation of power? On the one hand, we are expected to assign grades, and on the other, we know that assigning grades is a subjective act that split the internal existensial*". Dengan demikian, pembelajaran *critical pedagogy* mencoba melakukan pendekatan yang lebih lentur untuk mendekonstruksi struktur hirarkis yang melemahkan demokratisasi dalam kelas, dan melakukan redefinisi atas

pengetahuan, dan memahami bagaimana pengetahuan itu dibuat dan mengubah ketidakadilan (Ochoa & Lassale, 2008:1).

Dalam pembelajaran berbasis *critical pedagogy* Freire sebagaimana dikutip Smith (2008) mengolongkan menjadi 3 tahapan seseorang dalam berpikir kritis. Pertama adalah yang dinamakan dengan kesadaran *magis*. Pada tahap ini masyarakat tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran *magis* lebih melihat faktor diluar manusia (natural maupun supranatural) sebagai penyebab dan ketidakberdayaan.

Kedua, adalah masyarakat dalam tahap kesadaran naïf, keadaan yang dikategorikan dalam tingkatan ini adalah lebih melihat pada aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Sedangkan pada tahap ketiga adalah tingkatan pada pemahaman kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari "*blaming the victims*" dan lebih menganalisis. Untuk secara kritis menyadari struktur dan system social, politik, ekonomi, budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat.

Henry Giroux yang dikutip Monhinski (2008:2) menyatakan bahwa *critical pedagogy* sama dengan *political pedagogy*, artinya adalah *critical pedagogy* menyatakan bahwa proses pendidikan pada dasarnya bersifat politik, yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keterhubungan, kesepahaman, dan keterpautan secara kritis dengan berbagai isu-isu social dan bagai-

mana memaknainya. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya melakukan sebuah sikap yang kritis tetapi juga cukup tanggap untuk "bertarung" dengan kondisi politik dan ekonomi sehingga mampu mewujudkan sebuah demokratisasi.

Kincheloe (2008:3) menjelaskan *critical pedagogy* merupakan suatu pemahaman masyarakat melihat lingkungannya yang telah dalam kondisi dominasi kelas. Dominasi ini meliputi ideology, pendidikan yang dipergunakan penguasa untuk menindas masyarakat lemah. "*A key task of critical pedagogy involves helping people understand the ideological and epistemological inscription on the ways of seeing promoted by the dominant power blocs of the west. In such work, criticalist uncover both old and new knowledges that stimulate our ethical, ideological, and pedagogical imagination to change our relationship with the world and other people. Concurrently, such critical labor facilitates the construction of a new mode of emancipation derived from our understandings of the successes and failures of the past and the present. The first decade of the twenty-first century, the hegemonic politics of knowledge and the crypto-positivistic epistemology that is its conjoined twin are destroying the world*". Oleh karena itulah *critical pedagogy* merupakan sebuah alat dalam dunia pendidikan untuk perjuangan kaum tertindas. Karena peserta didik akan dibangun kesadaran kritis untuk melihat fenomena serta fakta-fakta disekitar lingkungan peserta didik.

Hal penting yang dibangun dalam *critical pedagogy* dalam pembelajaran IPS konstruktivisme adalah tercapainya

kesadaran kritis peserta didik agar mereka mampu mendemestifikasi kepentingan ideologis yang menyelimuti realitas (Agus Nuryanto, 2008:2). Paulo Freire dalam Au (2007:3) menyatakan bahwa kesadaran itu penting terhadap manusia karena manusia *“are not only in the world, but with the world and have the capacity to adapt...to reality plus the critical capacity to make choices and transform that reality”*. Artinya adalah bahwa manusia tidak hanya di dunia, tetapi didalam dunia dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri terhadap realitas dan memiliki kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubah realitas. Kesadaran ini mengalami peningkatan dimana setiap individu mampu melihat system social secara kritis. Mereka memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama.

Apabila ingin mencapai kesadaran dibutuhkan adanya proses yang disebut penyadaran atau *conscientization*. Penyadaran diartikan adanya proses belajar memahami kontradiksi social, politik, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut (Freire, 2008:1). Senada dengan itu, Pepi Leistyana (2004:17) menjelaskan bahwa penyadaran adalah *“ability to analyze, problematize (pose questions), and affect the sociopolitical, economic, and cultural realities that shape our lives”*, yaitu kemampuan untuk menguraikan, mempermasalahkan (menyikapi pertanyaan-pertanyaan), dan

memberikan suatu sentuhan perasaan terhadap keadaan sosiopolitik, ekonomi serta realitas kebudayaan yang melingkupi hidup kita. Proses penyadaran ini menurut Paulo Freire (2008:2-3) memungkinkan seseorang untuk memasuki proses sejarah sebagai subjek-subjek yang bertanggung jawab, dan mengantarkan mereka masuk kedalam pencapaian afirmasi diri sendiri sehingga menghindarkan fanatisme.

KONSEP KONSTRUKTIVISME CRITICAL PEDAGOGY DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Wineburg (2006) mengemukakan tujuan dasar mempelajari sejarah adalah mengajarkan kita sebuah cara menentukan pilihan, untuk mempertimbangkan berbagai pendapat, untuk membawakan berbagai kisah yang meragukan sendiri bila perlu kisah-kisah yang kita bawakan secara kritis. Dengan kita mempelajari sejarah maka dapat mempersatukan masyarakat akan kesadaran jatidiri pribadinya. Bagi siswa, dengan belajar sejarah maka kita dapat menimbulkan rendah hati, budi pekerti, patriotisme. Masa lalu dapat dipergunakan oleh guru untuk meneropong lebih jauh membuka didalam kulit-kulit sejarah yang mendalam. Sehingga pembelajaran sejarah dapat bermakna bagi siswa. Mata pelajaran sejarah menjadi cabang ilmu tersendiri karena mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Kasmadi, 2001:16).

Senada dengan Kasmadi (2001),

Wineburg (2006), Kuntowijoyo (1995) menyarankan untuk membelajarkan IPS sejarah di sekolah dengan kritis. Pembelajaran kritis berarti menghindari guru untuk bersikap dominasi pada peserta didik. Dalam membelajarkan sejarah kritis pada peserta didik haruslah mempergunakan beberapa tahapan demi tahapan dalam membangun kesadaran kritis siswa di kelas. Dalam pandangan Kuntowijoyo (1995) pembelajaran dengan basis *critical pedagogy* pada dasarnya menyangkut tiga hal, yakni aspek (1) mengapa sesuatu terjadi, (2) apa yang sebenarnya terjadi, serta (3) ke mana arah kejadian-kejadian itu. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan yang harus terdapat dalam *critical pedagogy* dalam pembelajaran sejarah meliputi aspek (1) kausalitas, (2) kronologis, (3) komprehensif, serta (4) kesinambungan. John Lynch (2006) menjelaskan lebih rinci bahwasanya materi sejarah kritis sudah bisa diterapkan pada tingkat SMP dan sebagai pondasi dasar sejarah lokal harus diperkuat.

Kuntowijoyo (1995) memandang aspek kausalitas menggambarkan kondisi masyarakat dalam berbagai aspek yang turut melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa. Aspek kronologis adalah urutan terjadinya suatu peristiwa. Aspek kronologis yang dimaksud adalah bahwa dalam pembelajaran sejarah kontroversial, berbagai pendapat yang menyatakan tentang peristiwa tersebut harus disampaikan, sehingga pemikiran peserta didik terbuka terhadap suatu peristiwa sejarah yang bersifat kontroversial.

Aspek keempat adalah aspek kesinambungan atau keberlanjutan dan keterkaitan peristiwa tersebut dengan

peristiwa lainnya. Hal ini disebabkan peristiwa sejarah memiliki keterkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi setelahnya. Relevansi *critical pedagogy* dalam pendidikan sejarah, khususnya pembelajaran sejarah disebabkan pula oleh adanya kesamaan-kesamaan pandangan di antara keduanya. Persamaan pertama, keduanya memandang bahwa ada keterkaitan antara pendidikan dengan politik, bahwa ada dalam pendidikan terdapat kepentingan-kepentingan politik, begitu pula sebaliknya bahwa dalam aktivitas politik terdapat muatan-muatan edukatif. Persamaan kedua adalah keduanya tidak dapat melepaskan diri dari konteks yang melingkupinya. Pendidikan sejarah maupun *critical pedagogy* memandang bahwa kondisi sekitar, baik kondisi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan senantiasa mengaitkan antara realitas dengan konsep-konsep. Persamaan ketiga ditinjau dari tujuan yang dicapai, yakni keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni terbangunnya kesadaran kritis dari peserta didik atau masyarakat dalam melihat realitas yang menjadikannya sebagai landasan dalam bertindak.

Penerapan model pembelajaran *critical pedagogy* pada materi IPS sejarah di sekolah dapat mengantarkan peserta didik mempunyai konstruksi pemikiran kritis. Penerapan model pembelajaran tersebut harus mendapatkan dukungan dari beberapa pihak terutama guru dan pemangku kebijakan kurikulum pendidikan. Sebagian guru tidak membelajarkan sejarah kritis karena memang tidak ada panduan secara khusus untuk membelajarkan dengan sistem belajar *critical pedagogy*. Keengganan guru

dalam memakai pendekatan kritis inilah yang seringkali membuat materi sejarah kurang menarik dan terkesan hafalan. Materi sejarah yang seharusnya dapat diajarkan secara menarik dan kritis sehingga peserta didik dapat mengkonstruksi dan memberi penilaian sendiri atas peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau akhirnya harus pasif dalam menerima pembelajaran dari guru sejarah (Abu Suud, 2008, Azinar, 2010, Birsyada, 2012).

Posisi guru sejarah dalam proses pembelajaran konstruktivisme *critical pedagogy* harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami keterkaitan antara teori dan praktik atau antara refleksi dan aksi. Konsep ini dalam *critical pedagogy* dikenal dengan istilah “praxis” (Listyana, Lavandez, & Nelson, 2004:7). Program yang dirancang oleh guru harus mampu mengembangkan *critical languages* untuk menjelaskan dunia yang melingkupi kehidupan keseharian masyarakat, tentang mengapa dan bagaimana sesuatu hal terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ada pertanyaan yang harus dipahami oleh guru, seperti “apa kacamata ideologis yang digunakan untuk melihat realitas sosial yang terjadi?”, “bagaimana cara kita merasakan aspek sosial, politik, ekonomi, dan institusional yang melingkupi kehidupan kita?”, bagaimana kita dapat mengenali dan melihat hubungan dan penyalahgunaan power dan berapa besar tingkat signifikansinya dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat?” (Listyana, Lavandez, & Nelson, 2004:8). Menurut perspektif *critical pedagogy* sejarah tidak bersifat *unidimensional* (Carr, 2008:86).

Bertolak dari konsep pemikiran diskursus di atas bahwasanya penerapan model pembelajaran IPS sejarah dengan pendekatan konstruktivisme *critical pedagogy* mampu mengantarkan peserta didik dapat mencapai tahap mengkonstruksi pengetahuan yang didapatnya secara kritis. Kesadaran kritis inilah yang mengantarkan peserta didik dapat mengenal jati diri sebenarnya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter kepribadian berkebangsaan yang kuat.

PENUTUP

Seorang guru IPS dalam proses pembelajaran di kelas bukanlah sekedar menyampaikan materi tetapi juga harus berupaya agar materi pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam pembelajaran konstruktivisme peserta didik diberikan keleluasaan untuk dapat menemukan makna sendiri tentang apa yang dipelajarinya lewat proses objektivikasi pengalaman belajar. Proses penemuan makna ini selanjutnya dinamakan dengan konstruksi. Proses pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme dapat menjadikan peserta didik mencapai tahap pemikiran kesadaran kritis. Apabila guru tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat dan menarik serta tidak dapat memancing rasa bertanya dan kekritisan peserta didik hal ini dapat menimbulkan kesulitan belajar, sehingga siswa mengalami ketidaktuntasan dalam belajarnya. Pendidikan IPS di dalam kelas yang diajarkan tidak akan pernah membekas pada diri

peserta didik apabila tidak mampu mencoba menghubungkan materi pelajaran dengan realitas sosial yang ada di sekitar peserta didik.

Berangkat dari sinilah perlu diterapkannya pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme di sekolah. Membelajarkan IPS di sekolah dengan pendekatan konstruktivisme *critical pedagogy* mampu meningkatkan rasa daya kekritisan peserta didik dalam setiap memahami setiap permasalahan sosial yang ada pada materi pelajaran. Peningkatan daya kekritisan peserta didik perlu didukung banyak faktor diantaranya adalah guru dan kurikulum materi pelajaran IPS yang memungkinkan untuk diajarkan secara kritis. Keterbukaan dari guru untuk memberikan stimulus materi-materi pelajaran IPS yang akan membangkitkan daya kekritisan siswa sangat dibutuhkan.

Dengan membelajarkan IPS konstruktivisme *critical pedagogy* di sekolah diharapkan peserta didik mempunyai kemampuan untuk menguraikan, mempermasalahakan (menyikapi pertanyaan-pertanyaan), dan memberikan suatu sentuhan perasaan terhadap keadaan sosiopolitik, ekonomi serta relitas kebudayaan yang melingkupi hidup kita. Proses penyadaran ini peserta didik untuk memasuki proses sosial sebagai subjek-subjek yang bertanggung jawab, dan mengantarkan mereka masuk kedalam pencapaian afirmasi diri sendiri sehingga menghindari fanatisme. Dengan membelajarkan IPS secara kritis, proses penyadaran menjadikan seseorang memiliki *critical awareness*, sehingga mampu melihat secara kritis kontradiksi-kontradiksi sosial yang ada di sekelilingnya dan mengubahnya

(objektifikasi).

Proses pembelajaran mengantarkan peserta didik dapat mengkonstruksi pemikirannya sendiri atas apa yang menjadi bahan materi kajiannya sehingga dapat mencapai kesadaran kritis dapat dicapai melalui beberapa tahapan yaitu: Kausalitas, Kronologi, Komperhensif dan Kesinambungan sehingga peserta didik dalam memahami materi sejarah dapat memahami secara mendalam dan kritis tanpa domonasi sedikitpun dari pihak-pihak manapun. Dengan mengembangkan model pembelajaran IPS konstruktivisme diharapkan dapat diterapkan pada tiap-tiap kelas IPS di sekolah. Pembelajaran IPS model konstruktivisme dapat mendidik peserta didik menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung-jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme dapat menjadi diskursus bahan kajian dalam lingkungan akademik khususnya para ahli pendidikan IPS yang dikemudian hari dapat mengembangkan dan menyempurnakan konsep pengembangan model pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme yang lebih mapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Suud. 2008. *Revitalisasi Pendidikan IPS*. Semarang: Unnes Press.
- , 2008. *Penggunaan Isu Kontroversial dalam Kelas Sejarah di Era Reformasi* : Lemlit Unnes. Tidak diterbitkan.
- Azinar, Ahmad Tsabit. 2010. *Implementasi Critical Pedagogy Dalam Pem-*

- belajaran Sejarah Kontroversial Pada SMA Negeri Kota Semarang*. Tesis UNS. Tidak diterbitkan.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Birsyada, Muhammad Iqbal, 2012. *Peristiwa Konflik Pecahnya Keluarga Di Kerajaan Demak Dalam Persepsi Penulis Babad*. Tesis UNNES. Tidak diterbitkan.
- Kasmadi, Hartono, 2001. *Pengembangan Pembelajaran Dengan Pendekatan Model-Model Pengajaran Sejarah*. Semarang: PT. Prima Nugraha Pratama.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lestyana, Pepi, Lavandez, Magaly & Nelson, Thomas. 2004. "Critical pedagogy: Revitalizing and Demoralizing Teacher Education". *Teacher Education Quarterly*. Winter 2004. Hlm. 3-15. Dalam <http://www.teqjournal.org/backvols/2004/311/volume1.htm> Di unduh 5 Mei 2011.
- Smith, William A. 2008. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire terjemahan Agung Prihantoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardan, Dadang, 2009. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Somantri, Muhammad Numan, 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahap., Abdul Aziz, 2007. *Metode dan Model-model Mengajar IPS*. Bandung: Alfabeta.
- Wineburg, Sam, 2006. *Historical Thinking and other Unnatural Acts Charting the Future of Teaching the Past*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan Yayasan Obor Indonesia.